



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2021.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2022.
- (4) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2022.
 - c. Pedoman penyusunan RKA-PD.

Pasal 3

Penjabaran RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Juli 2021



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 27 SERIE

REKAMERSIP
KABUPATEN
14 JULI 2021
11.05.21

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022. RKPD Kota Dumai Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah dan dengan tema pembangunan Tahun 2022 **“Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”**

Kemudian Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 sebagai penjabaran tahun pertama periode RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen Perangkat Daerah dan Stakeholder dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2022. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2021 – 2026 nantinya.

Akhirnya, Kami berharap semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-13
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
b. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
c. Topografi	II-2
d. Geologi	II-3
e. Hidrologi	II-3
f. Klimatologi	II-4
g. Demografi	II-5
h. Wilayah Rawan Bencana	II-10
i. Potensi Pengembangan Wilayah	II-12
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-13
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-32
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-38
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-43
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-43
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-97
2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan	II-136
2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang	II-145
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-151
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-151
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-151
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-154
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-169
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2020 dan REALISASI RPJMD Tahun ke 4	II-166
2.2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2020	II-167
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-171
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERTHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-171
a. Aspek Geografi dan Demografi	II-172
b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-172
c. Aspek Pelayanan Umum	II-174
d. Aspek Daya Saing Daerah	II-175
e. Isu Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sustainable development goals (SDG's) Tahun 2020	II-181
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	II-192
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-192
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-197

C. Urusan Pilihan	II-203
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	II-205
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 Dan Perkiraan Tahun 2022	III-2
3.1.2 Telaahan Kebijakan Nasional Yang Terkait Dengan Kota Dumai	III-14
3.1.3 Telaahan Kebijakan Provinsi Yang Terkait Dengan Kota Dumai	III-17
3.1.4 Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum	III-20
3.1.5 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 Dan Tahun 2022	III-21
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-23
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-24
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-29
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-29
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-33
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-60
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-1
4.1.1 RPJMD Tahun 2021-2026	IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	IV-5
4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV-13
4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2022	IV-14
4.1.6 Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	IV-16
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021	IV-18
4.3 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2022 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2022	IV-53
4.4 Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG'S) Target Kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-55
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2020 DAN REALISASI RPJMD KOTA DUMAI 2021-2026	
LAMPIRAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022	

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1. 1	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020	I. 1
------------	--	------

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Sungai-sungai yang mengalir menurut kecamatan di Kota Dumai	II -4
Tabel 2.2	Banyaknya hari hujan di kota dumai selama tahun 2011-2020	II -5
Tabel 2.3	Banyaknya curah hujan di kota dumai selama tahun 2011-2020	II -5
Tabel 2.4	Laju pertumbuhan penduduk kota dumai tahun 2014-2020	II -6
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2012-2020 Menurut Kecamatan	II -6
Tabel 2.6	Kepadatan penduduk kota dumai tahun 2012-2020	II -7
Tabel 2.7	Rasio jenis kelamin penduduk kota dumai tahun 2014-2020	II -8
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2020	II -9
Tabel 2.9	Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai Tahun 2020	II -11
Tabel 2.10	Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai	II -11
Tabel 2.11	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2020	II -14
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2015-2020	II -15
Tabel 2.13	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020	II -18
Tabel 2.14	Kontribusi Sektoral PDRB 2014-2019	II -19
Tabel 2.15	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2015-2020	II -20
Tabel 2.16	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2014-2019	II -21
Tabel 2.17	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -22
Tabel 2.18	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -23
Tabel 2.19	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -24
Tabel 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -27
Tabel 2.21	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2016-2020 Kota Dumai	II -29
Tabel 2.22	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -31
Tabel 2.23	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2020	II -31
Tabel 2.24	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2020	II -32
Tabel 2.25	Penerima Batuan Iuran (PBI)	II -36
Tabel 2.26	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar	II -38
Tabel 2.27	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -39
Tabel 2.28	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -39
Tabel 2.29	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -39
Tabel 2.30	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -40
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Sasaran urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020	II -40
Tabel 2.32	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II -41
Tabel 2.33	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga	II -42
Tabel 2.34	Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau	II -42
Tabel 2.35	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -43
Tabel 2.36	Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2019/2020	II -44
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -45
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -46
Tabel 2.39	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2013-2019	II -48
Tabel 2.40	Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2020	II -49
Tabel 2.41	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2020	II -59
Tabel 2.42	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013 - 2020	II -51
Tabel 2.43	Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -52

Tabel 2.44	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -53
Tabel 2.45	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -54
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -54
Tabel 2.47	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai	II -54
Tabel 2.48	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2013-2020	II -56
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -57
Tabel 2.50	Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -58
Tabel 2.51	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai	II -59
Tabel 2.52	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2019-2020	II -68
Tabel 2.53	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2020	II -72
Tabel 2.54	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -72
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -73
Tabel 2.56	Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2020	II -73
Tabel 2.57	Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai	II -74
Tabel 2.58	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -75
Tabel 2.59	Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020	II -78
Tabel 2.60	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -79
Tabel 2.61	Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2020 per Kecamatan	II -80
Tabel 2.62	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2020	II -81
Tabel 2.63	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -82
Tabel 2.64	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -84
Tabel 2.65	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -84
Tabel 2.66	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai	II -86
Tabel 2.67	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai	II -87
Tabel 2.68	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2016-2020	II -88
Tabel 2.69	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2018-2020	II -89
Tabel 2.70	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -90
Tabel 2.71	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -91
Tabel 2.72	Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -92
Tabel 2.73	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai	II -92
Tabel 2.74	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai	II -93
Tabel 2.75	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai	II -93
Tabel 2.76	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai	II -93
Tabel 2.77	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai	II -94
Tabel 2.78	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai	II -94
Tabel 2.79	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -94
Tabel 2.80	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -98
Tabel 2.81	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019	II -100
Tabel 2.82	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -100
Tabel 2.83	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2018 dan 2020	II -101
Tabel 2.84	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2013- 2020	II -101
Tabel 2.85	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -102
Tabel 2.86	Perusahaan Wajib Laport Tahun 2011-2016	II -102
Tabel 2.87	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012-2020	II -103
Tabel 2.88	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -103
Tabel 2.89	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -104
Tabel 2.90	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -105
Tabel 2.91	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2019-2020	II -105
Tabel 2.92	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai	II -106
Tabel 2.93	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011-2017	II -107

Tabel 2.94	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani	II -108
Tabel 2.95	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan	II -111
Tabel 2.96	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -112
Tabel 2.97	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -112
Tabel 2.98	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -113
Tabel 2.99	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2020	II -114
Tabel 2.100	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2020	II -114
Tabel 2.101	Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur	II -115
Tabel 2.102	Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2019-2020	II -116
Tabel 2.103	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai	II -117
Tabel 2.104	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2018-2020	II -118
Tabel 2.105	Kepemilikan KTP Tahun 2012-2020	II -119
Tabel 2.106	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2012-2020	II -120
Tabel 2.107	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2012-2020	II -120
Tabel 2.108	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -120
Tabel 2.109	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -121
Tabel 2.110	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai	II -122
Tabel 2.111	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -122
Tabel 2.112	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -123
Tabel 2.113	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012-2020	II -124
Tabel 2.114	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -124
Tabel 2.115	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -125
Tabel 2.116	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2012-2020	II -125
Tabel 2.117	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2020	II -126
Tabel 2.118	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai	II -127
Tabel 2.119	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2020	II -128
Tabel 2.120	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2020	II -128
Tabel 2.121	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020	II -129
Tabel 2.122	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2017 - 2020	II -129
Tabel 2.123	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -130
Tabel 2.124	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2013-2020	II -130
Tabel 2.125	Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai	II -131
Tabel 2.126	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -131
Tabel 2.127	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -132
Tabel 2.128	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012-2020	II -132
Tabel 2.129	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -132
Tabel 2.130	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -133
Tabel 2.131	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai	II -133
Tabel 2.132	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2020	II -134
Tabel 2.133	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2012-2020	II -135
Tabel 2.134	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2020	II -136
Tabel 2.135	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -136
Tabel 2.136	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok	II -137
Tabel 2.137	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2020	II -138
Tabel 2.138	Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	II -138
Tabel 2.139	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2011-2020 (%)	II -139
Tabel 2.140	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -140
Tabel 2.141	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -141
Tabel 2.142	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020	II -142
Tabel 2.143	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -142
Tabel 2.144	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020	II -143
Tabel 2.145	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -143
Tabel 2.146	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai	II -143
Tabel 2.147	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2020	II -147
Tabel 2.148	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan,	II-148

	dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014-2020	
Tabel 2.149	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2020	II-150
Tabel 2.150	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2012-2020	II-150
Tabel 2.151	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2012-2020	II-150
Tabel 2.152	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai	II-151
Tabel 2.153	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai	II-151
Tabel 2.154	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2020	II-152
Tabel 2.155	Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2015-2020	II-153
Tabel 2.156	Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2012-2020	II-154
Tabel 2.157	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	II-154
Tabel 2.158	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai	II-155
Tabel 2.159	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020	II-158
Tabel 2.160	Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Dumai tahun 2020	II-159
Tabel 2.161	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II-161
Tabel 2.162	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -162
Tabel 2.163	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai	II -163
Tabel 2.164	Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020	II -169
Tabel 2.165	Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)	II -172
Tabel 2.166	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	II 184
Tabel 2.167	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II -186
Tabel 2.168	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II -186
Tabel 2.169	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia	II -189
Tabel 2.170	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	II -190
Tabel 2.171	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	II -191
Tabel 2.172	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	II -191
Tabel 2.173	Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	II -226
Tabel 2.174	Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	II -226
Tabel 2.175	Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	II -226

BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2017.....	III - 5
Tabel 3.2	IHK dan Tingkat Infl asi di Kota Dumai Bulan Maret 2021, Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)	III - 7
Tabel 3.3	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019	III - 9
Tabel 3.4	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020	III - 10
Tabel 3.5	Tabel 3.5. Usulan Teknis Daerah (Prioritas Nasional) Tahun 2022	III - 19
Tabel 3.6	Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai	III - 25
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2022	III - 35
Tabel 3.8	Rekap Perbandingan Pagu Rancangan Awal, Pagu Rancangan dan Pagu Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2022	III - 40
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2018 - 2022	III - 55

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah	IV - 7
Tabel 4.2	Perbandingan Prioritas Tahun 2021 dan 2022 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan	IV - 18
Tabel 4.3	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022	IV - 19
Tabel 4.4	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan indikatif untuk prioritas pembangunan daerah Tahun 2022	IV - 23
Tabel 4.5	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun	IV - 31

	2022	
Tabel 4.6	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV - 32
Tabel 4.7	Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022	IV - 33
Tabel 4.8	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV - 53
Tabel 4.9	Sinkronisasi SPM Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV - 54
Tabel 4.10	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022	IV - 55
Tabel 4.11	Tujuan , Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	IV - 57

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

Tabel 5. 1	Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2022	V - 1
Tabel 5. 2	Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022	V - 14
Tabel 5. 3	Proporsi Pendanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mandatory Kota Dumai Tahun 2022	V - 35

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai	VI - 1
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022	VI - 3
Tabel 6. 3	Indikator Kinerja Utama	VI - 11

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1	Diagram Alir Penyusunan RKPDP	I -1
Gambar 1. 2	Hubungan RPJMD dengan RKPDP	I -7
Gambar 1. 3	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	I -7

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Kota Dumai	II -2
Gambar 2.2	Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai	II -3
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020	II -10
Gambar 2.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau	II -16
Gambar 2.5	Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -20
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2019	II -21
Gambar 2.7	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -25
Gambar 2.8	Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2015-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -25
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -26
Gambar 2.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -27
Gambar 2.11	Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -28
Gambar 2.12	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2020 Kota Dumai vs Provinsi Riau	II -29
Gambar 2.13	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2020	II -32
Gambar 2.14	Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -33
Gambar 2.15	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2020	II -34
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2018	II -34
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2020	II -37
Gambar 2.18	Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -46
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -47
Gambar 2.20	Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020	II -49
Gambar 2.21	Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020	II -50
Gambar 2.22	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -51
Gambar 2.23	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -52
Gambar 2.24	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -53
Gambar 2.25	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019	II -54
Gambar 2.26	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai	II -55
Gambar 2.27	Guru Bersertifikasi Tahun 2012-2019	II -55
Gambar 2.28	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -56
Gambar 2.29	Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -57
Gambar 2.30	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -58
Gambar 2.31	Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2014 sampai dengan 2020	II -60
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -61
Gambar 2.33	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -62
Gambar 2.34	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -64
Gambar 2.35	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai	II -66
Gambar 2.36	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II -69
Gambar 2.37	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -70
Gambar 2.38	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai	II -71

Gambar 2.39	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -80
Gambar 2.40	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020	II -82
Gambar 2.41	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai	II -83
Gambar 2.42	Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -84
Gambar 2.43	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai	II -85
Gambar 2.44	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -85
Gambar 2.45	Jumlah Pelanggan Kota Dumai	II -86
Gambar 2.46	Jumlah Kawasan Kumuh	II -89
Gambar 2.47	Rumah Layak Huni	II -89
Gambar 2.48	Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	II -90
Gambar 2.49	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -104
Gambar 2.50	Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017	II -107
Gambar 2.51	Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2020	II -134
Gambar 2.51	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014-2020	II -135
Gambar 2.52	Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2013-2019	II -137
Gambar 2.53	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2013-2020	II -140
Gambar 2.54	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai	II -142
Gambar 2.55	Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2014-2020	II -152
Gambar 2.56	Fokus <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	II -183

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai	III -5
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2016-2020	III -6
Gambar 3.3	IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2016-2020	III -7
Gambar 3.4	Trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia	III -11
Gambar 3.5	Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2016-2020	III -12
Gambar 3.6	Jumlah penduduk miskin danditingkat kemiskinan Kota Dumai	III -12
Gambar 3.7	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2017-2020	III -13
Gambar 3.8	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2020	III -14

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Gambar 4.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022	IV- 25
------------	--	--------



**PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022**
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01** Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02** Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03** Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05** Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB I PENDAHULUAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

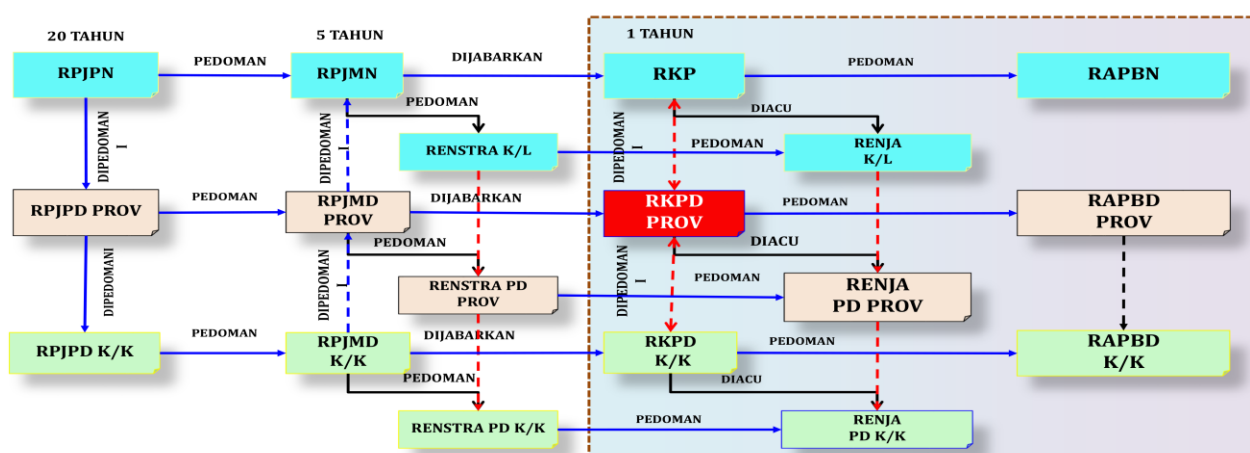
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKPD
 Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tahun ke-2. Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2022 ini sudah mengacu pada peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Dumai Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, RKP Tahun 2022, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-*

down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak triwulan pertama tahun 2020 sampai saat ini, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Kota Dumai, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Corona virus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Meskipun penerapan protokol kesehatan dan proses vaksinasi telah dilaksanakan, namun dampak yang dirasakan Indonesia khususnya Kota Dumai juga masih cukup besar seperti terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terganggunya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, pariwisata dan sektor informal yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Riau : (3-209/2019);
 22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

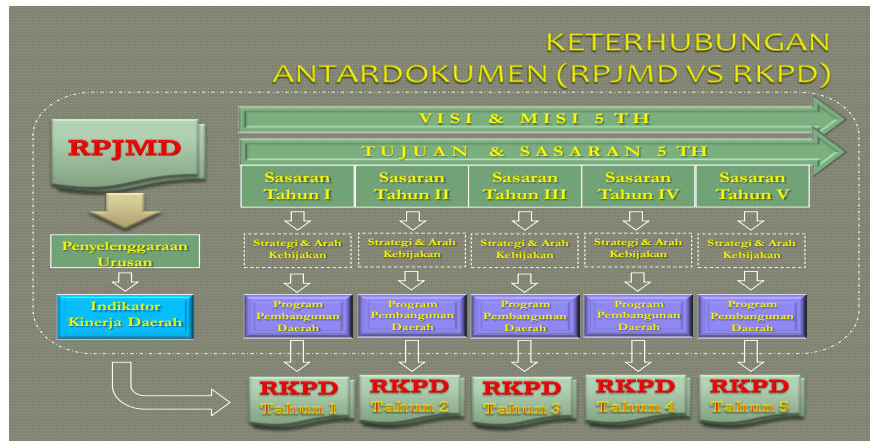
RKPD Kota Dumai Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

RKPD Kota Dumai Tahun 2022 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun kedua pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun kedua pada tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah ***Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu***. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2022. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai

prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2022.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan RKPD
Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017



Gambar 1.3 Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
Sumber: Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2022. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-3 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dengan tema ***Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima***. Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022 adalah (1). Industri; (2). Pertanian; (3). Pariwisata; (4). Infrastruktur (5). Sumber Daya Manusia,(6) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik

yang Prima. Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2022.

Adapun sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tersebut tersaji pada Tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 1.1. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1. Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki iklim dan promosi investasi 2. Meningkatkan produksi hasil industri 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerjasama, Fasilitas dan Pengembangan Perwilayahan Industri 2. Program pembangunan jalan dan jembatan 3. Program Preservasi jalan dan jembatan
2. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan 2. Meningkatkan produksi pertanian 3. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi 4. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS 6. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3. Program pembangunan jalan dan jembatan 4. Program Preservasi jalan dan jembatan 5. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 7. Pengembangan Budidaya Perikanan 8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 9. Program Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut 10. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau 2. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata 4. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu 5. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6. Program pembangunan jalan dan jembatan
4. Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan jalan dan jembatan 2. Memantapkan pelabuhan 3. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi 4. Meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas 5. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruh wilayah 6. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh 7. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir 8. Meningkatkan pengelolaan pra bencana , tanggap bencana dan pasca bencana 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Preservasi Jalan dan Jembatan 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Program Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 5. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Perhubungan Darat 8. Program Perhubungan Laut
5. Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik 3. Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa 5. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Bantuan Operasional Sekolah 4. Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus 5. Program Pembiayaan Kesehatan 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 8. Program Pelayanan Kefarmasian Dan Alkes 9. Program Peningkatan Masyarakat 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11. Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 12. Program Pencegahan Dan

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	<p>7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin</p> <p>8. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa</p> <p>9. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja</p> <p>10. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan</p> <p>11. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</p> <p>12. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</p> <p>13. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam</p> <p>14. rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</p> <p>15. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat</p>	<p>Pengendalian Penyakit</p> <p>13. Program Bantuan Sembako</p> <p>14. Program PKH</p> <p>15. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>16. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>17. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>18. Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>19. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga</p> <p>20. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak</p> <p>21. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</p> <p>22. Program Keluarga Berencana</p> <p>23. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan</p> <p>24. Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan Dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>25. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>26. Program Pendidikan Politik</p>

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi 4. informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program Reformasi Birokrasi 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sumber: Ringkasan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2022.

3. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan RKP Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun keempat pada RPJMN 2019-2024. RKP Tahun 2022 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2019-2024. Tema RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan:
 - i. Kawasan Industri dan 31 Smelter;
 - ii. Peningkatan Peran UMKM;

- iii. Energi Terbarukan;
 - iv. Food Estate;
 - v. 10 Destinasi Wisata.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:
- i. Major Project di Wilayah Papua;
 - ii. Ibu Kota Negara.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing dengan program prioritas:
- i. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
 - ii. Sistem Kesehatan Nasional;
 - iii. Reformasi Pendidikan Keterampilan.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan program prioritas:
- i. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - ii. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - iii. Memperkuat Moderasi Beragama;
 - iv. Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar:
- i. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
 - ii. Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan Enabler).
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan program prioritas:
- i) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - ii) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - iii) Pembangunan Rendah Karbon;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi pelayanan Publik dengan program prioritas:
- i) Konsolidasi Demokrasi;
 - ii) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - iii) Penegakan Hukum Nasional;
 - iv) Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
 - v) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2022 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional serta masih berorientasi pada pemulihanekonomi dan reformasi sosial yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (untuk lebih jelas akan dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi

- antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2022 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
 3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2022;
 4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
 5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian

dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2020 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. subbab ini

menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2022.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB II GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

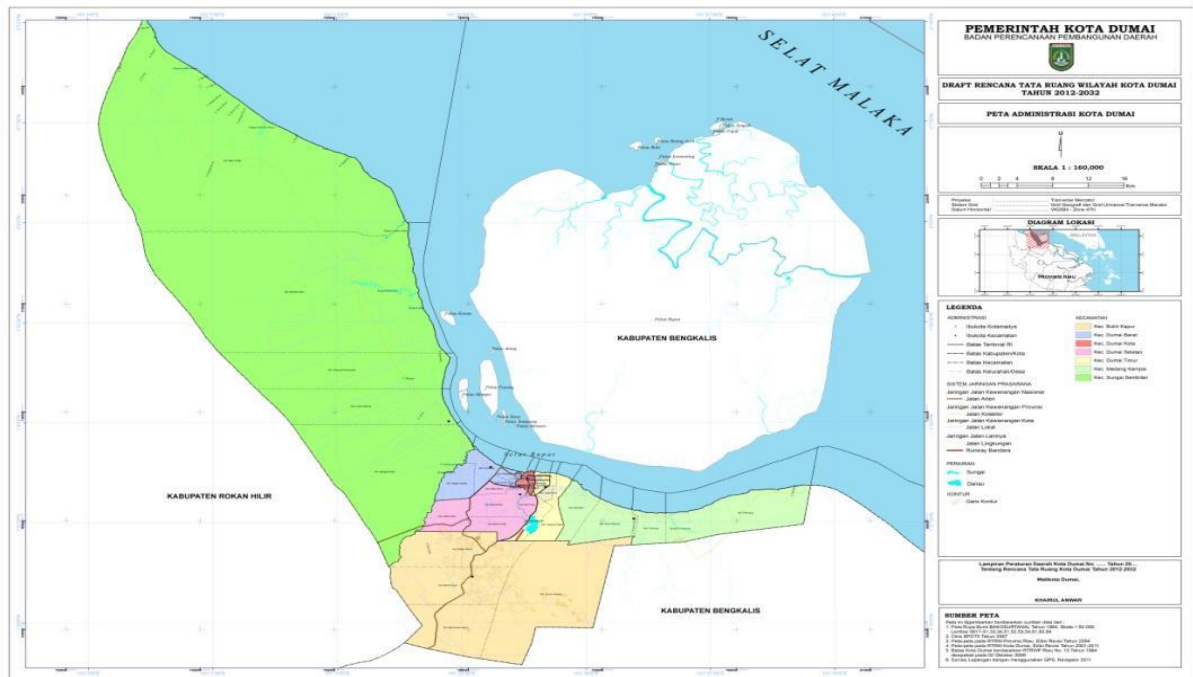
Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 206.673,36 Ha. Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Utara : Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis.
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'00" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 206.673,36 Ha.

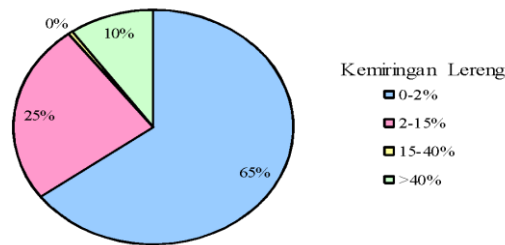
Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.



Gambar 2.1 Peta Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

c. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0 - 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 0–15 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40%, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut.

Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis Podsolid Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis alluvial di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan gley hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.

Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	1. Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2020 berkisar antara 81%-

88%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2020 berkisar antara 26,7°C-27,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2020 terjadi pada bulan November yaitu 366,8 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu 69,1 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September dan November sebanyak 25 hari dan terkecil pada bulan Maret sebanyak 11 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020

Bulan	Tahun									
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	19	13	13	13	13	16	20	14	10	13
Februari	6	11	11	11	11	11	21	5	5	13
Maret	15	11	11	11	11	9	12	12	8	11
April	16	11	11	11	11	17	21	11	15	20
Mei	5	14	14	14	14	15	21	19	7	19
Juni	9	7	7	7	7	15	6	4	10	15
Juli	9	14	14	14	14	13	9	10	5	16
Agustus	8	18	18	18	18	9	17	14	7	15
September	15	7	7	7	7	13	20	13	8	25
Oktober	22	17	17	17	17	15	20	22	23	13
Nopember	26	21	21	21	21	21	20	21	12	25
Desember	14	24	24	24	24	20	19	18	9	21
	164	168	168	168	168	174	206	163	119	196

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Tabel 2.3 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020

Bulan	Curah Hujan (mm ³)									
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6	411,7	96,6	150,6	78,413
Februari	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3	418,0	44,3	43,0	74,713
Maret	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0	182,6	90,7	132,0	69,111
April	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2	181,0	166,3	177,0	240,52
Mei	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3	145,0	187,4	86,0	304,11
Juni	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6	95,0	48,6	185,0	178,51
Juli	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4	106,7	157,4	93,0	268,01
Agustus	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7	237,5	79,9	66,0	213,41
September	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7	237,8	447,3	79,0	350,42
Oktober	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3	179,4	447,3	347,0	153,51
Nopember	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0	238,3	289,7	178,0	366,82
Desember	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5	166,0	247,3	182,7	209,92
	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6	2.599,0	2.302,8	1.719,3	2.24,52

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

g. Demografi

1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2014-2020. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 2,74%. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,96%. Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tersebut adalah 2,15% ± 0,12%. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2020 jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertumbuhan bersifat fluktuasi, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami turun-naik. Selain kematian penduduk, rendahnya tingkat kelahiran dan proses migrasi penduduk karena kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan menjadi salah satu indikator menurunnya jumlah penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08
2017	152.731	144.907	297.638	1,96
2018	155.638	147.654	303.292	2,74
2019	158.287	150.525	308.812	2,15
2020	162.769	154.013	316.782	2,17

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2012-2020 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Berikut tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Selama Tahun 2012-2020.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2012-2020 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)									Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Bukit Kapur	42.082	45.933	42.399	43.403	44.447	45.479	46.522	47.565	51.564	0.01
Medang Kampai	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	11.923	12.140	12.351	16.794	0.01
Sungai Sembilan	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	32.546	33.231	33.909	41.738	0.01
Dumai Barat	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	42.364	43.247	44.119	44.292	0.01
Dumai Timur	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	64.127	65.299	66.435	68.930	0.09
Dumai Kota	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	47.570	48.261	48.910	40.673	0.01
Dumai Selatan	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	53.629	54.592	55.523	52.791	0.01
Kota Dumai	271.523	280.027	280.199	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	0.01

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Tiga kecamatan di Kota Dumai dengan kepadatan penduduk paling tinggi berturut-turut adalah Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Dumai Kota. Kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di ketiga kecamatan tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Dumai mencapai 316.782 jiwa, dengan jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 68.930 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 3.129 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 43 jiwa/km². kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2001. Berikut ini tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bukit Kapur	200,00	210	230	212	217	222	227	233	238	258
Medang Kampai	373,00	29	30	30	31	31	33	33	33	45
Sungai Sembilan	975,38	31	33	31	32	33	33	34	35	43
Dumai Barat	44,98	864	846	882	902	922	942	961	981	985
Dumai Timur	47,52	1.237	1.273	1.272	1.298	1.324	1.349	1 374	1398	1.451
Dumai Kota	13,00	3.240	3.217	3.482	3.543	3.603	3.659	3 712	3762	3.129
Dumai Selatan	73,50	663	686	688	702	716	730	743	755	718
Kota Dumai	1.727,38	157	157	162	165	169	172	176	179	183

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

3. Struktur Penduduk

a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kota Dumai pada tahun 2014 sebesar 106, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kota Dumai terdapat 106 penduduk laki-laki. Seluruh Kecamatan di Kota Dumai memiliki *sex ratio* > 100, artinya

seluruh kecamatan di Kota Dumai jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk Kota Dumai masih cukup baik. Jika angka sex ratio ini dibawah 100 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik. Disisi lain hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ke depan, terutama untuk kebijakan pembangunan yang terkait gender. Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara proporsional, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah. Berikut Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2020.

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2020

TAHUN	P E N D U D U K			SEX RATIO
	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	LAKI-LAKI + PEREMPUAN (Jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	143.900	136.209	280.109	106
2015	146.792	139.175	285.967	105
2016	149.791	142.117	291.908	105
2017	152.731	144.907	297.638	105
2018	155.638	147.654	303.292	105
2019	158.287	150.525	308.812	105
2020	162.799	154.013	316.782	105

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa Kota Dumai dikategorikan sebagai penduduk muda. Hal tersebut dikarenakan oleh presentase penduduk muda terhadap total penduduk masih cukup besar. Tabel 2.8 berikut adalah table penduduk kota Dumai berdasarkan kelompok Umur.

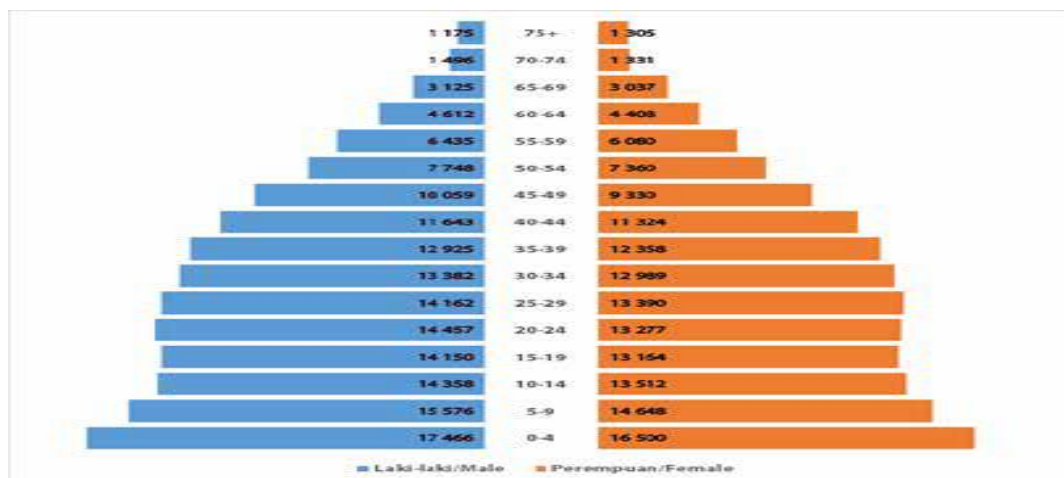
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Dumai Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0 - 4	17.465	16.500
5 - 9	15.576	14.648
10 - 14	14.358	13.512
15 - 19	14.150	13.164
20 - 24	14.457	13.277
25 - 29	14.162	13.390
30 - 34	13.382	12.989
35 - 39	12.925	12.358
40 - 44	11.643	11.324
45 - 49	10.059	9.330
50 - 54	7.748	7.360
55 - 59	6.435	6.080
60 - 64	4.612	4.408
65 - 69	3.125	3.037
70 - 74	1.495	1.331
75+	1.175	1.305
JUMLAH	162.769	154.013
RASIO JENIS KELAMIN	105,69	
RASIO KETERGANTUNGAN (PERBANDINGAN)	49,60	

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kota Dumai memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2020 sebanyak 76,93% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan 23,07% lagi merupakan penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan data tersebut, besar rasio tingkat partisipasi kerja di Kota Dumai adalah 67,15, artinya jumlah penduduk usia kerja di Kota Dumai dua kali lipat lebih penduduk usia non produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif..

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan window of opprtunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 0,49, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Berikut ini gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2020
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut, 1,1% penduduk Kota Dumai merupakan balita 5,6% merupakan penduduk usia 5-9 tahun, dan 3,62% merupakan penduduk usia >65 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-9 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar.

h. Wilayah Rawan Bencana

Kota Dumai mempunyai kawasan rawan bencana yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana yaitu bencana banjir harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana, hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat, disinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai no.15 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah kota Dumai Tahun 2019-2039, Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah potensi rawan banjir, rawan kebakaran dan agin puting beliung. Kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan kebakaran tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan

Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan angin puting beliung tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Kejadian yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2020, dimana bencana kebakaran pada tahun 2020 berturut-turut sebanyak 111 kejadian. Berikut tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai.

Tabel 2.9 Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai tahun 2020

Lokasi Kejadian	2016	2017	2018	2019	2020
Hutan dan Lahan	-	61	136	110	79
Perumahan/Pemukiman	13	13	9	17	19
Pertokoan/Kios/Kafe	7	4	9	9	1
Kantor	2	-		1	-
Lain-lain	5	5	4	7	12
Total	27	83	158	144	111

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah kebakaran perkotaan juga merupakan potensi bencana bagi kota Dumai. Adapun jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Banyaknya Kejadian Kebakaran per Bulan di Kota Dumai

Bulan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	3	-	7	2	-	3	15
Februari	6	36	53	2	29	23	23
Maret	191	16	56	3	33	41	25
April	1	9	8	7	14	45	7
Mei	1	4	-	5	-	46	-
Juni	54	6	10	3	7	47	2
Juli	14	43	10	3	7	51	3
Agustus	1	2	83	1	23	62	3
September	3	11	14	15	2	-	1
Oktober	1	2	18	1	-	-	-
November	-	-	-	5	-	-	-
Desember	-	-	-	2	-	-	-
Jumlah Kejadian	275	129	259	49	115	318	79

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Begitu juga dengan masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang

laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.

i. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia.

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian yang terletak dikecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Dumai Selatan dan perkebunan yang terletak di Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2020 berkisar antara 81%-88%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat

mendukung pengembangan perumahan yang tersebar diseluruh kecamatan maupun perikanan yang terletak diwilayah Kecamatan Sungai Sembilan.

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial*serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 m dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan kewilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan yang diarahkan untuk konservasi air dan tanah dengan tujuan untuk mencegah abrasi, erosi dan amblesan. kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 53 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun RKPD Kota Dumai Tahun 2022, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan PDRB

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data-data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2014-2020, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 45,61 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 73,72 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2020

NO	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1551.17	1687.64	1806.63	1877.80	1929.05	2 079,21
2	Pertambangan dan Penggalian	120.47	121.86	116.79	120.20	128.33	129,58
3	Industri Pengolahan	13544.27	15088.11	16611.66	18671.09	20899.25	21 783,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.03	24.52	27.10	28.10	31.77	73,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.04	4.29	4.74	4.88	5.33	5,60
6	Konstruksi	2869.88	3214.66	3533.02	3786.76	4049.17	3 941,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4691.52	5000.29	5250.80	5416.76	5743.14	5 257,96

NO	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Transportasi dan Pergudangan	807.76	862.15	918.54	973.96	1055.84	726,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	235.07	260.52	280.82	303.92	320.06	258,81
10	Informasi dan Komunikasi	270.71	294.25	333.68	380.26	418.39	457,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	355.03	367.27	375.46	390.06	397.21	409,21
12	Real Estat	127.22	134.71	143.28	153.25	162.04	164,04
13	Jasa Perusahaan	1.42	1.55	1.66	1.84	2.06	1,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	524.62	541.62	553.24	568.68	587.76	590,24
15	Jasa Pendidikan	142.98	149.35	155.05	161.94	177.13	185,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.88	49.79	53.47	56.82	65.84	77,38
17	Jasa lainnya	142.50	159.68	176.90	196.64	220.03	181,04
Produk Domestik Regional Bruto		36192.40	25453.57	27962.26	30342.84	33092.97	36 322,88

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2015-2020

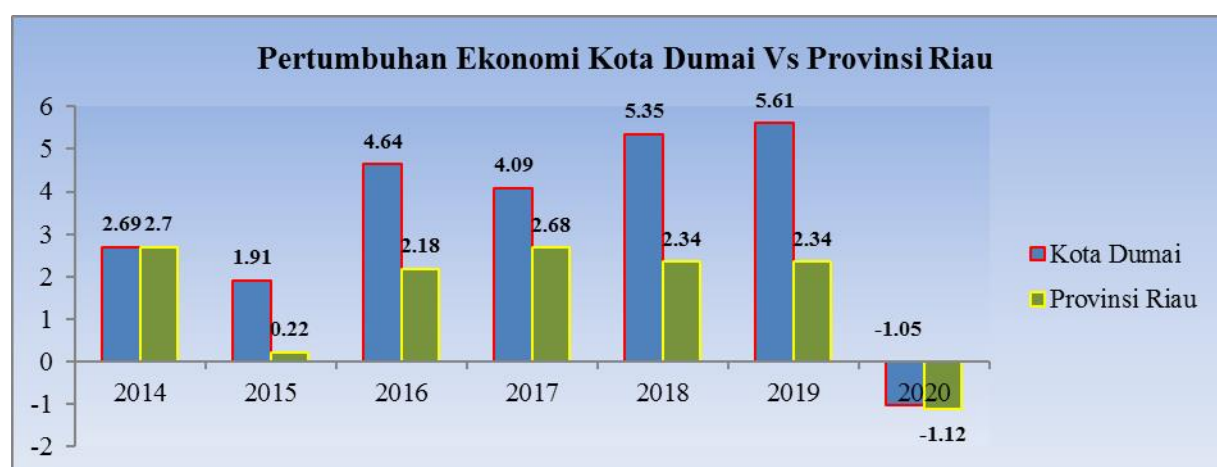
Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,1	1,14	3,31	2,82	2,02	4,18
Pertambangan dan Penggalian	0,19	-4,04	-4,95	-3,74	2,29	-1,30
Industri Pengolahan	2,92	5,71	5,17	7,51	7,17	3,01
Pengadaan Listrik dan Gas	9,75	18,12	1,04	3,21	7,29	138,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,76	(0,16)	4,60	1,13	6,24	3,90
Konstruksi	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,13	2,16	2,84	1,94	2,92	-10,32
Transportasi dan Pergudangan	2,02	3,02	4,82	3,84	5,36	-34,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,58	6,30	6,50	6,50	-20,01
Informasi dan Komunikasi	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	(6,88)	0,51	(0,74)	2,09	0,12	3,44
Real Estat	5,01	1,41	3,43	3,89	5,34	1,65
Jasa Perusahaan	7,67	3,61	6,91	9,07	7,74	-22,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	0,16	0,11	0,28	2,33	-2,16
Jasa Pendidikan	5,24	0,55	2,70	3,94	5,62	1,41

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	0,87	5,49	5,57	10,83	14,62
Jasa lainnya	7,81	5,26	7,99	8,61	8,79	-20,03
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)	2,03	4,14	4,46	5,35	5,61	-1,05

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, tahun 2015 adalah 2,92% dapat dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama penggerak perekonomian tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah beberapa sektor yang ada di Kota Dumai. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2015-2020 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 138,28%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan yang signifikan di tahun 2017.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 2.12 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai berfluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi kota Dumai cenderung melambat, sedangkan dari 2017-2019 pertumbuhan ekonomi kota Dumai mengalami peningkatan yang sangat bagus. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut :



Gambar 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2020 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Dari Gambar di atas terlihat bahwa selama periode 2014-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Meskipun demikian, secara umum perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2020 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau

dapat dikatakan perekonomiannya melambat akibat wabah pandemic Covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi Kota Dumai kedepannya. Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai pada tahun 2020 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis tidak prospektif yaitu industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi ; administrasi pemerintahan, dan jasa lainnya.
2. Sektor non basis tidak prospektif yaitu jasa pendidikan; Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalan; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa shift share dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas ; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi mobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya;
2. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalan; dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan penambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;

2. menyusun tipologi perkembangan wilayah (Tipologi Klassen);
3. sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi;
6. sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Tabel 2.13 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020

No	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1139.16	1152.20	1190.35	1223.87	1248.63	1299,83
2	Pertambangan dan Penggalian	87.42	83.89	79.73	76.75	78.51	77,49
3	Industri Pengolahan	11382.36	12032.42	12654.79	13605.18	14581	15018,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14.48	17.11	17.29	17.84	19.14	45,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.52	3.52	3.68	3.72	3.95	4,11
6	Konstruksi	2119.78	2184.09	2300.70	2360.06	2458.03	2383,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3776.04	3857.61	3967.11	4044.03	4162.14	3730,22
8	Transportasi dan Pergudangan	602.75	620.94	650.89	675.91	712.12	465,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	150.19	154.07	163.77	174.41	181.12	144,75
10	Informasi dan Komunikasi	245.70	255.85	271.85	287.48	308.20	336,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	265.54	266.88	264.91	270.44	270.76	280,07
12	Real Estat	94.77	96.11	99.41	103.27	108.79	110,40
13	Jasa Perusahaan	1.03	1.07	1.14	1.25	1.34	1,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	429.99	430.68	431.15	432.38	442.43	432,88
15	Jasa Pendidikan	94.63	95.15	97.72	101.57	107.28	108,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.31	32.59	34.38	36.29	40.22	46,10
17	Jasa lainnya	102.02	107.39	115.97	125.95	137.02	109,57
Produk Domestik Regional Bruto		24860.69	20541.69	21391.57	22344.83	23540.40	24595,61

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Jika dilihat kontribusi per sektor, maka sektor /lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar (diatas 10%) pada PDRB Kota Dumai selama kurun waktu

2015-2020 adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Kontribusi Sektoral PDRB 2014-2019

No	Sektor / Sub Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)						Pergeseran
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,08	6,09	6,04	5,95	5,67	5,33	-0,34
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,47	0,44	0,38	0,36	0,35	-0,01
3	Industri Pengolahan	52,90	53,21	53,96	54,75	56,42	57,74	1,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
6	Konstruksi	10,84	11,27	11,50	11,64	11,44	11,19	-0,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,42	18,43	17,88	17,30	16,37	15,87	-0,50
8	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,17	3,08	3,03	2,94	2,92	-0,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,92	0,93	0,93	0,92	0,88	-0,04
10	Informasi dan Komunikasi	0,99	1,06	1,05	1,10	1,15	1,16	0,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,55	1,39	1,31	1,24	1,18	1,10	-0,08
12	Real Estat	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	-0,01
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,06	1,94	1,82	1,72	1,62	-0,10
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,56	0,53	0,51	0,49	0,49	0,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,01
17	Jasa lainnya	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,02
PDRB		100	100	100	100	100	100	0,00

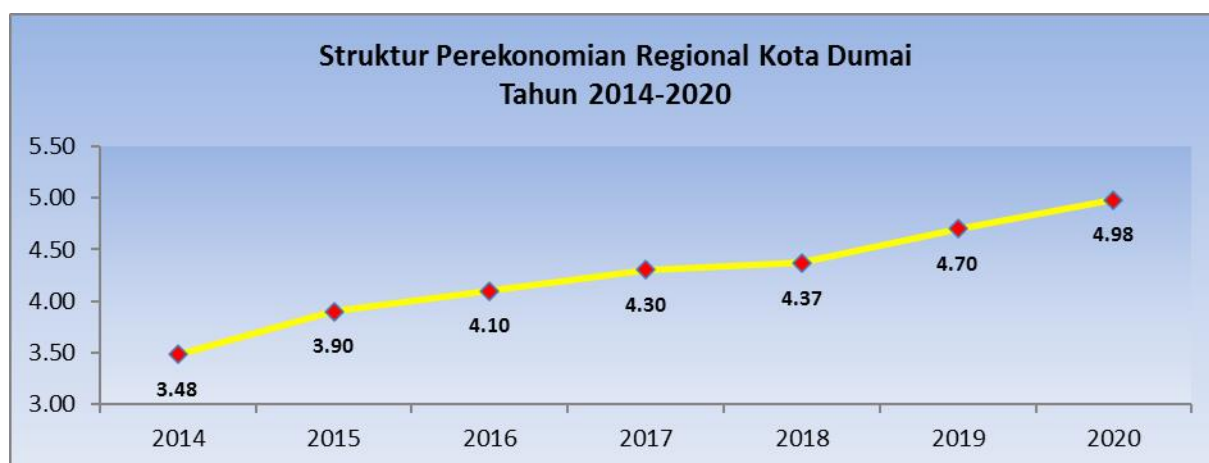
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2015-2020 terlihat pada Tabel 2.15 dan Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2018

Tabel 2.15 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai
Tahun 2015-2020

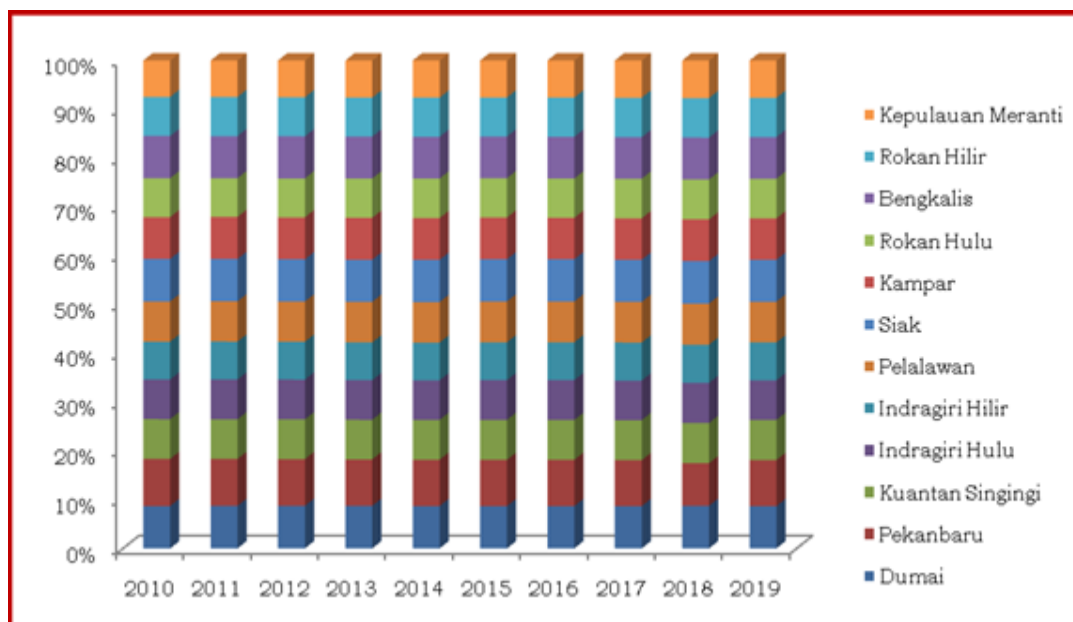
TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB KOTA DUMAI (Juta Rp.)	25.430.570	27.962.260	30.342.837	33.092.966	36.192.405	36 322,88
PDRB PROVINSI RIAU (Juta Rp.)	652.761.630	681.699.030	704.705.030	755.435.020	765.198.300	729 166,64
Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)	3,90%	4,10%	4,31%	4,38%	4,73%	4,98%

(Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)



Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2014-2020
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Dari tabel dan Gambar di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2015-2020 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%, namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Riau tahun 2015-2020 berturut-turut adalah Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kab. Siak. Berikut gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2015-2020.



Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2019 (Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah, dimana dominasi peran suatu sektor menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian sektoral Kota Dumai tahun 2013-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.7. Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2017 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor industri pengolahan dengan besar kontribusi rata-rata >50%. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah **sektor industri pengolahan**. Berdasarkan kriteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) berikut Kota Dumai masuk dalam kategori wilayah industri :

1. PDRB sektor industri <10%, wilayah non industri;
2. PDRB sektor industri 10-20%, wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDRB sektor industri 20-30%, wilayah tergolong semi industri;
4. PDRB sektor industri >30%, wilayah industri.

Tabel 2.16 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2014-2019

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sektor Primer	6,52	6,54	6,54	6,56	6,48	6,33	6,03	5,68
Sektor Sekunder	63.48	63.81	63.81	64.57	65.57	66.50	67.95	69.03
Sektor Tertier	30.00	29.65	29.65	28.84	27.96	27.17	26.00	25.29

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

2. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 2.17 di bawah ini tersaji Salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah adalah Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Adapun pengklasifikasian wilayah berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada Tabel 2.17

Tabel 2.17 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	84.354,54	88.928,34	95.733,57	101.798,70	108.787,11	117.198,81	24.595.613,77
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	109.784,64	102.887,81	104.861,11	105.858,67	110.826,76	110.826,76	490.000.000
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	2,69	1,91	4,64	4,09	5,35	5,61	-1,05
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,71	0,22	2,18	2,68	2,37	2,00	-1,12
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Pada Tabel 2.18 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2014-2018.

Tabel 2.18 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Perkapita Makanan							
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559	608.839	
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64	47,52%	53,12%
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan							
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256	672.279	
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36	52,48	46,88%
Jumlah Pengeluaran Perkapita	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815	1.281.118	12.453

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2019 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 927.230,- menjadi Rp. 1.281.118,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 50,96% pada tahun 2014 menjadi 47,52% di tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2014 menjadi 52,47% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

3. Tingkat Kemiskinan

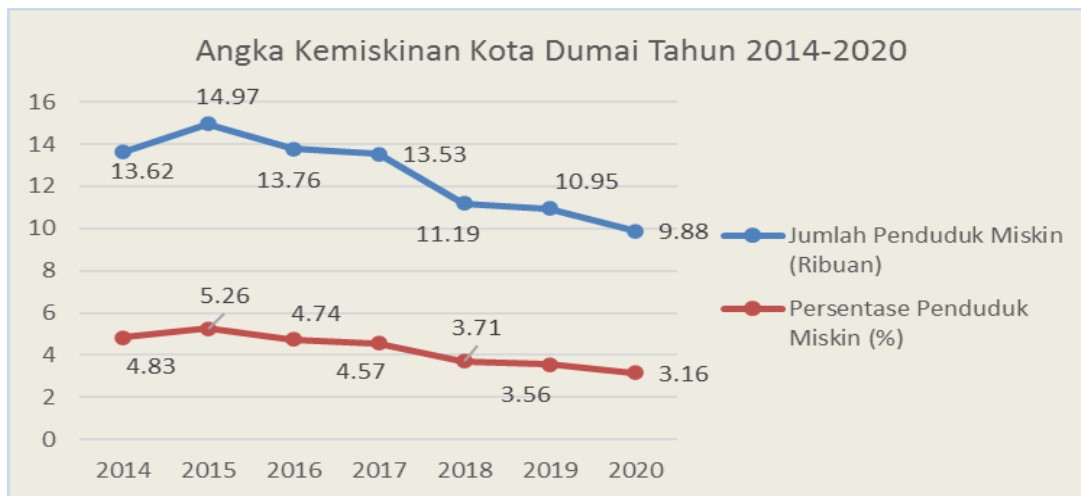
Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2014-2019 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019
Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95	9,88
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16
Provinsi Riau							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	399.211	426.001	456.493	479.944	528.468	546.090
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	531,39	515,40	514,62	500,44	490,72	483,39
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82
Indonesia							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	333.034	350.420	370.910	392.154	392.154	437.902
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.674,58	27.550,00
Persentase penduduk miskin	(%)	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19

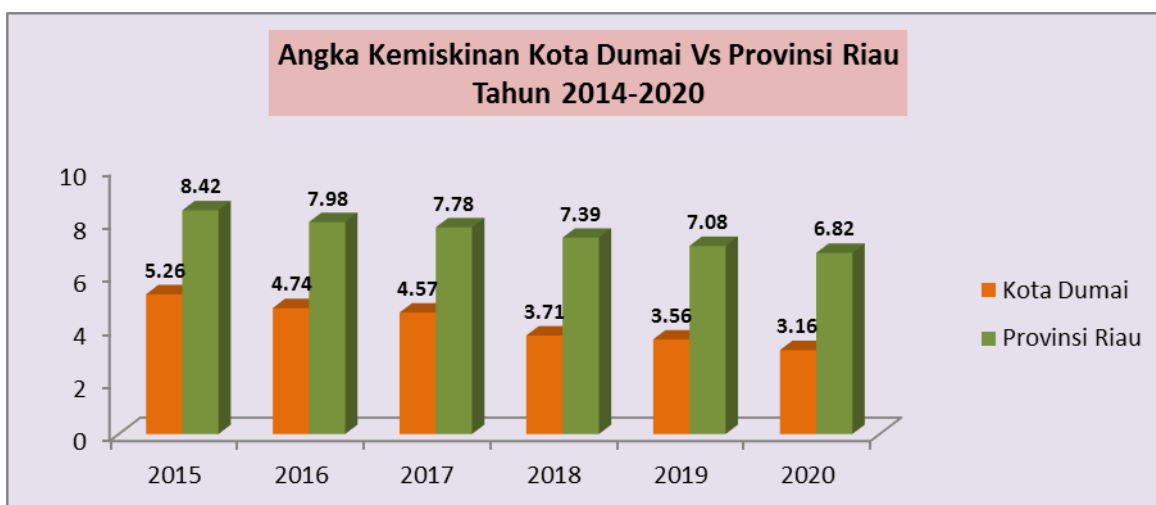
(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 5,26%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 5,26% menjadi 3,16% di tahun 2020. Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Disisi lain, tingginya angka kemiskinan di tahun 2015 ini diindikasikan disebabkan oleh tingginya persentase penduduk miskin di daerah *hinterland*, baik terhadap 12 kab/kota lainnya di Provinsi Riau maupun terhadap Provinsi tetangga (Sumatera Utara 10.53% dan Jambi 8.86%). Tingginya angka pendapatan perkapita di Kota Dumai menjadi daya tarik bagi penduduk miskin di daerah *hinterland* untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kota Dumai.



Gambar 2.7 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2014-2020 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Seperti yang terlihat pada Gambar diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2020 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,40%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2015-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Riau adalah 8,42%, kemudian mengalami penurunan menjadi 6,82% di tahun 2020. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan 5,26% pada tahun 2015 menjadi 3,16% di tahun 2020. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2014-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,01%, 341.525,00/kapita/bulan pada menjadi Rp. 484.609/kapita/bulan pada tahun 2020 Selama periode 2014-2020 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2020 Kota Dumai dan Provinsi Riau (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.11 berikut tersaji perkembangan Indeks

Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020.

Tabel 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28	0,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05	0,05

(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2021)



Gambar 2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2021)

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa trend indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman terendah selama kurun waktu 2013-2020 terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,38, kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan namun kemudian membaik kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,28, dan kemudian turun pada tahun 2020 sebesar 0,31. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode trend indeks keparahan kemiskinan, selama kurun waktu 2013-2020, indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,06 kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat namun kemudian membaik pada tahun 2020 menjadi 0,05.

4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk

pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2014-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Berikut ini Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020.



Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2014-2020 (Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

5. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

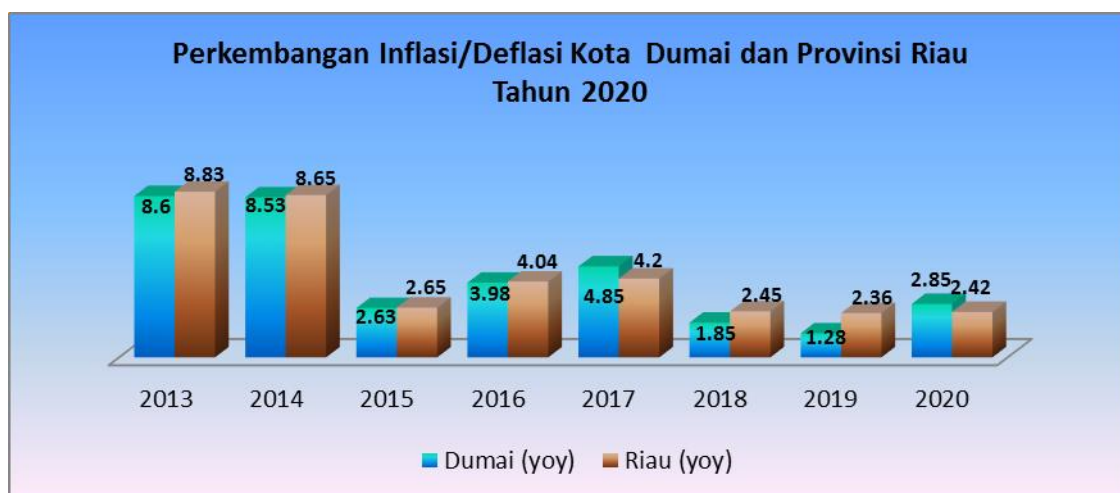
Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 2.21

menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai tahun 2016-2020 dan Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Tabel 2.21 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2016-2020 Kota Dumai

Bulan	Inflasi (Persen)				
	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	0,65	1,58	0,36	-0,04	0,54
Februari	0,32	1,12	-0,24	-0,32	0,21
Maret	0,23	-0,19	0,05	0,07	-0,05
April	-0,64	-0,21	0,14	0,35	-0,19
Mei	0,06	0,11	0,16	1,05	0,95
Juni	0,79	0,90	0,65	0,80	0,11
Juli	0,46	0,05	-0,10	0,41	-0,26
Agustus	0,05	0,14	-0,34	-0,25	-0,05
September	0,64	0,05	-0,26	-0,79	-0,02
Oktober	0,47	0,08	0,50	0,05	0,44
November	0,82	0,62	0,70	-0,12	0,37
Desember	0,07	0,53	0,22	0,07	0,80

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)



Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2020 Kota Dumai vs Provinsi Riau

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari Tabel 2.21 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2013-2020 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2013 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi selama kurun waktu 2013-2020. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2020 seperti yang tersaji pada Gambar 2.13 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai di bulan Me dan inflasi bulanan terendah terjadi di bulan Juni.

6. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \\ &= (32.994.260,7 \times 10^6) / 1127.897 \\ &= 257.975.251,18\end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

7. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2011-2018. Berikut table 2.22 Menampilkan angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018.

Tabel 2.22 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2012-2020

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	12,40	13,12

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Selama periode 2011-2020 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2019 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46 ; 74,06 ; 74,64 ; 74,40, begitu juga halnya dengan Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 13,12. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

Tabel 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2020

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40
Provinsi Riau	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71
Nasional	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,92

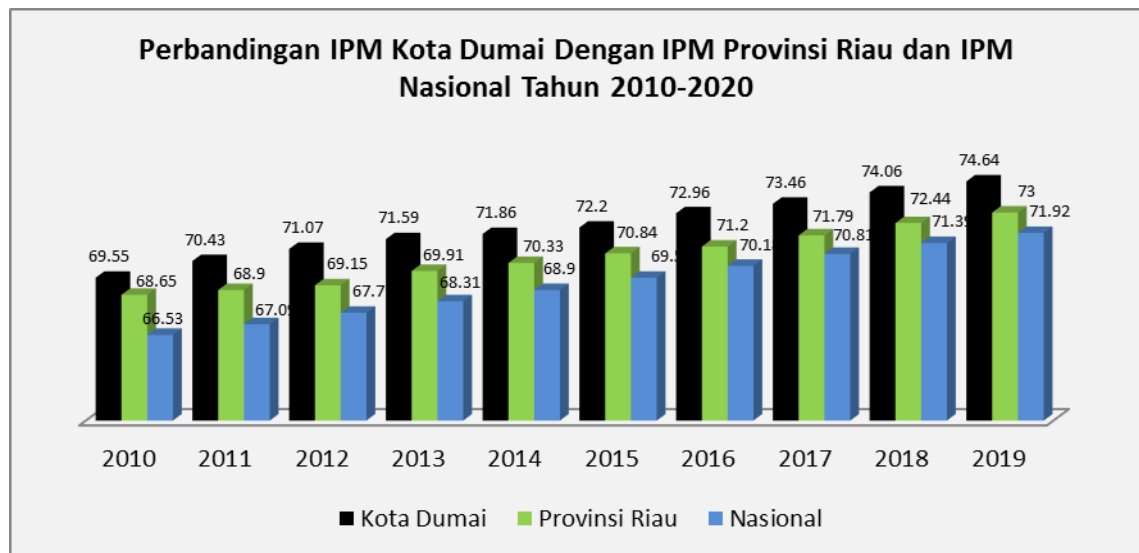
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2011-2020, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.24 dibawah. Pada tahun 2020, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti pada Tabel 2.23 di atas maupun Gambar 2.14 Pada tahun 2020 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 74,40 ; 72,71 ; 71,92. Berikut tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2011-2020.

Tabel 2.24 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2011-2020

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31
Indragiri Hulu	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83
Indragiri Hilir	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54
Pelalawan	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56
Siak	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68
Kampar	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83
Rokan Hulu	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36	69,93	69,38
Bengkalis	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46
Rokan Hilir	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15
Kepulauan Meranti	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50
Pekanbaru	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66	81,35	81,32
Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)



Gambar 2.14 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2020

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

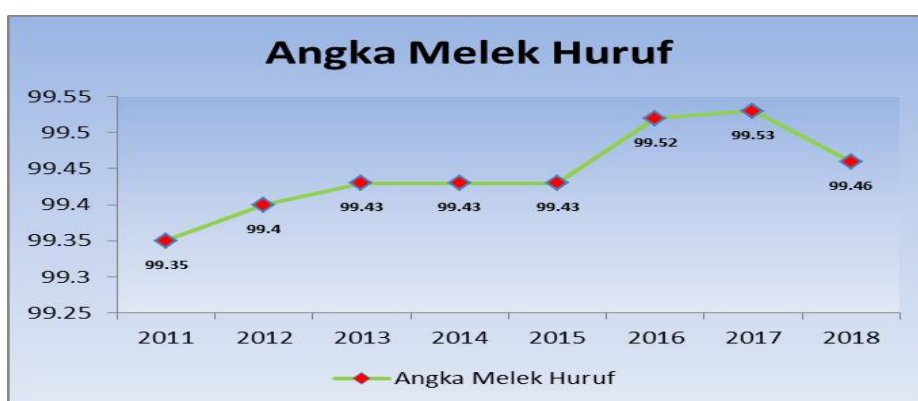
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap sektor Pendidikan dengan indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan tren yang sangat baik, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 99,35%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2015 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Berikut Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018.

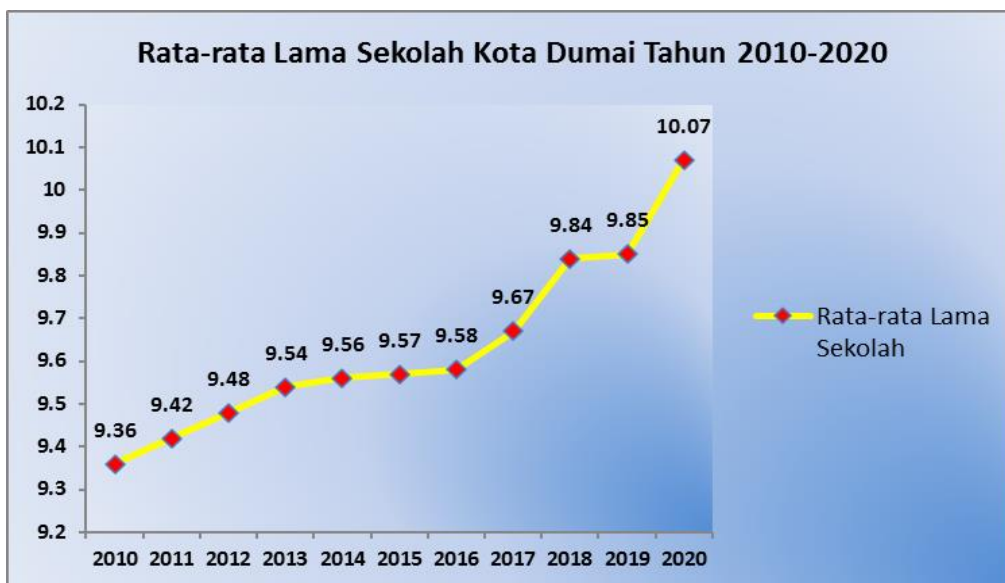


Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2018
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2019)

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki

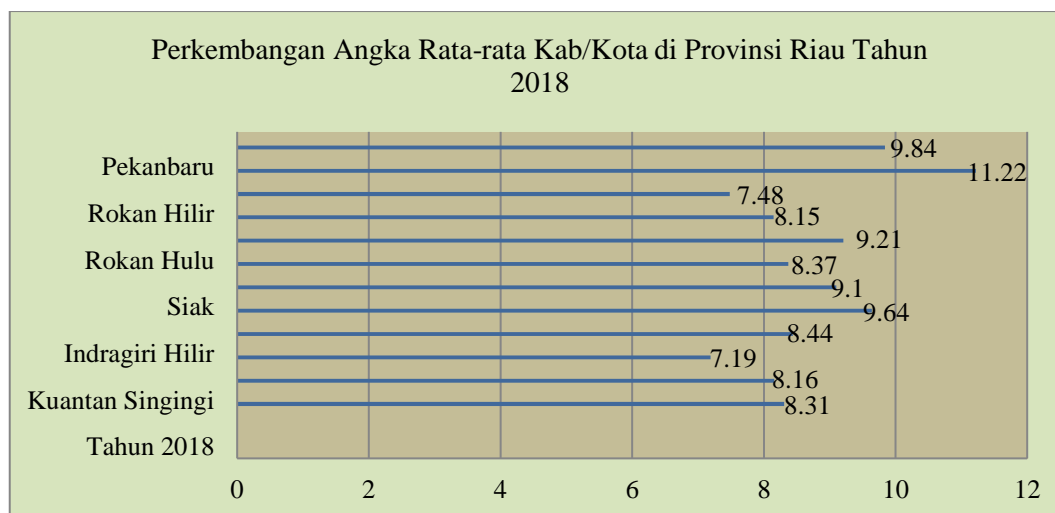
oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2020.



Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021)

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2020 terus mengalami peningkatan 10,07 pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan. Secara tingkat Provinsi Riau, untuk angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa kota dumai menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan manusia dari sisi Pendidikan. Berikut Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018.



Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

A. Kesehatan

1. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.

Selama tahun 2010–2017 realisasi capaian persentase balita gizi buruk adalah 0,01%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi

masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.25 Penerima Batuan Iuran (PBI)

Sumber Dana	2016	2017	2018	2019	2020
APBD Kota Dumai	64.514	64.949	66.200	89.298	84.057
APBN	62.158	61.414	61.166	62.249	74.766
Jumlah	126.672	126.363	127.366	151.547	158.823

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Pada tahun 2020 terdapat 158.823 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dengan target 148.887 peserta. Penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kota Dumai bagi masyarakat kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan

validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.18. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

A. Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	114	5	5	66	102	103	114	107
Persentase		5%	5%	63%	95,33%	96,26%	100%	100%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal.

Tabel 2.27 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs	56	23	24	28	28	28	28	28
Persentase		66%	69%	80%	75,67 %	75,67 %	75,67 %	83,80 %

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2020 di tingkat Sekolah mencapai 100% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 83,80% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal semakin membaik,

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Dasar yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Membaca Yasin Bersama	105	68	64 %	70	65 %	91	85 %	92	86 %	92	89 %	92	86 %
Sholat Zuhur Berjamaah		43	40 %	46	43 %	50	48 %	51	48 %	51	58 %	51	48 %
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		89	83 %	92	86 %	97	91 %	99	93 %	97	93 %	97	93 %
Berdoa setiap memulai pelajaran		95	89 %	98	92 %	101	94 %	102	95 %	102	95 %	102	95 %

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

Apabila data diatas dirata-ratakan, maka rata-rata implementasi nilai-nilai agama pada Pendidikan dasar dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29 Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Implementasi kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib	69%	71%	79,21%	80,37%	83,75%	83,75%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 83,75%.

Tabel 2.30 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Membaca Yasin Bersama	35	29	81%	31	86%	91	85%	92	86%	93	87%	93	87%
Sholat Zuhur Berjamaah		19	53%	23	64%	50	48%	51	48%	52	48%	52	48%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		25	69%	31	86%	97	91%	99	93%	99	93%	99	93%
Berdoa setiap memulai pelajaran		31	86%	33	92%	101	94%	102	95%	102	95%	102	95%

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2020 adalah 80,75%.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada Tabel 2.31 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2020.

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Sasaran urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga				
Peringkat olahraga ditingkat propinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah /POPDA)	Peringkat	0	0	0
Urusan Pilihan Pariwisata				
Kunjungan wisata	Presentase	53,15%	3.834 39.325	92.85%

(Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk peringkat olahraga ditingkat provinsi realisasi 0 ditahun 2020 disebabkan ditaidakannya event tersebut akibat pandemic covid-19, kunjungan wisata capaian kondisi tahun tahun 2020 sebesar 53.15%.

Jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 76 grup seperti yang tersaji pada Tabel 2.32. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 (enam) gedung kesenian di Provinsi Riau.

Tabel 2.32 Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	JumlahGrup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian	JumlahGrup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
Kuantan Singingi	10	1		
Indragiri Hulu	24	-		
Indragiri Hilir	3	1		
Pelalawan	1	-		
Siak	2	-		
Kampar	76	-		
Rokan Hulu	24	-		
Rokan Hilir	3	1		
Bengkalis	3	1		
Kep. Meranti	3	-		
Pekanbaru	7	2		
Dumai	1	-	42	1
Jumlah	158	6		

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020)

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mendukung Misi 1, dan Misi 2 yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan” Dan “Industri dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu”**. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu terpenting dalam pembangunan Kota Dumai ke depan.

B. Olahraga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya. Pada Tabel 2.33

berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabang olahraga dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga dan Jumlah Klub Olahraga

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	32	28	32	114
Jumlah klub olahraga	Klub	82	82	82	100

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada di Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau

Kabupaten / Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Kuantan Singingi	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Pelalawan	-	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
Siak	-	Sepatu Roda	-	-	-	-
Kampar	-	Kampar (Pencak Silat)	Labersa (Golf)	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	PAS (Bela Diri Tarung Drajat)	-	-
Pekanbaru	1. Grand Stadion-UNRI (Sepak Bola) 2. Kaharudin Nasution Rumbai (Sepak Bola) 3. SC Rumbai (Hockey) 4. SC Rumbai (Atletic)	1. Remaja (Bulu Tangkis) 2. Angkasa (Bulu Tangkis) 3. SC Rumbai (Senam) 4. Tribuana (Karate)	1. Chevron (Soft Ball) 2. UNRI (Kawasan Olahraga) 3. UNRI (Panjat Tebing) 4. UIR Panahan	1. SC Rumbai (Basket) 2. SC Rumbai (Renang) 3. SC Rumbai (Menembak) 4. SC Rumbai (Volly Ball) 5. UIR Volly Ball	1. UNILAK (Anggar) 2. UNRI (Yudo) 3. UIN (Taekwondo) 4. UIR (Gulat)	Danau Buatan (Sky Air)
Dumai	-	-	Chevron (Tennis Meja)	-	-	Sasana Tirta Pertamina (Renang)

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021)

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Pendidikan

1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2013 hingga 2020, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 101. Angka ini menunjukkan ada sekitar 101 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 108 hal ini berarti terdapat sekitar 108 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2013 hingga tahun 2020 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2013 menunjukkan nilai 51 dan pada tahun 2020 naik menjadi 55.

Tabel 2.35 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Tingkatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs								
SD/MI	101	107	106	108	107	107	107	108
SMP/MI	51	54	53	55	55	56	55	55
Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas								
SD/MI	1:37	1:38	1:38	1:34	1:34	1:34	1:37	1:37
SMP/MTs	1:44	1:35	1:41	1:41	1:33	1:33	1:33	1:33

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2010 adalah sebanyak 33.983 siswa dan terjadi kenaikan sebanyak 4.216 siswa pada tahun 2020 yakni menjadi 39.744 siswa. Jumlah ruang kelas juga terdapat penambahan, pada tahun 2010 terdapat 954 ruang, kemudian bertambah sebanyak 202 ruang pada tahun 2018 menjadi 1.156 ruang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2020 yakni 1:37 artinya 1 ruang kelas menampung 37 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal

jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SD.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2010 adalah sebanyak 13.102 siswa. Terjadi kenaikan jumlah siswa pada tahun 2020 menjadi 29.370 siswa. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan yakni 308 ruang pada tahun 2010 menjadi 487 ruang pada 2018. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2020 yakni 1:33 artinya 1 ruang kelas manampung 33 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai tetap memperhatikan untuk kedepannya terhadap penambahan ruang kelas belajar.

Disamping belum terpenuhinya rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP, jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota seperti data yang tersaji pada Tabel 2.36. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Dari tabel 2.36 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per kecamatan. Di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Tabel 2.36 Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2019/2020

Kecamatan	Jumlah Sekolah (unit)		Jumlah Siswa (orang)		Jumlah Guru (orang)		Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah		Rata-rata Jumlah Guru per Sekolah	
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
Bukit Kapur	19	12	6.608	4.247	348	236	200	115	18	12
Dumai Barat	11	6	4.492	4.224	253	155	136	114	13	8
Dumai Kota	11	6	4.471	3.414	257	131	135	92	13	7
Dumai Selatan	16	11	5.888	6.861	333	286	178	185	17	14
Dumai Timur	28	8	10.346	6.176	614	217	313	279	31	11
Medang Kampai	8	4	2.200	1.237	137	78	67	33	7	4
Sungai Sembilan	21	9	5.639	3.211	368	180	171	87	18	9

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, data diolah)

2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	107,27	107,20	107,79	111,92	100,00	105,0	97,49
APK SMP/MTs	89,67	91,58	100,18	95,60	78,89	98,42	88,91

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka 2021)

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2014 hingga tahun 2020 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif diberbagai faktior. Pada tahun 2020 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

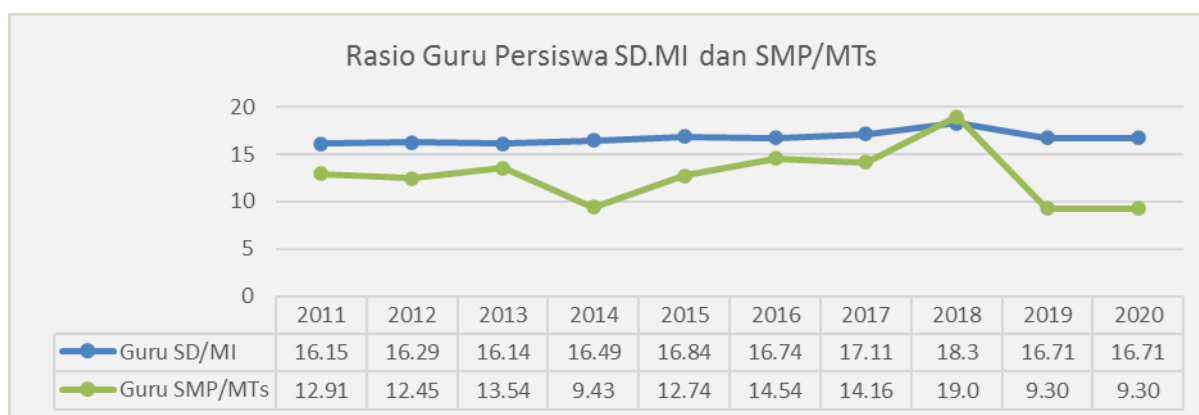
3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2020 terdapat jumlah rasio guru SD 16,71, dan guru SMP 9,30.

Sedangkan di tahun 2019 terdapat 18,3 rasio guru SD/MI, dan 19 guru SMP/MTs. Berdasarkan data-data tersebut maka untuk tingkat SD/MI rasio guru per siswa pada tahun 2011 adalah 1:16,15, di tahun 2018 rasio guru persiswa 1:88,3. Angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 adalah 1:20. Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2011-2018 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, namun angkanya kian meningkat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.19. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh terkonsentrasinya jumlah siswa pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi

sedikit. Akibatnya di daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio murid guru dalam rentang antara tahun 2011 hingga tahun 2018 tren perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah rasio guru SMP/MTs persiswa adalah 1:12,91, dan pada tahun 2018 jumlah rasio guru persiswa 1:19. Pada tahun 2019 jumlah guru sebanyak 2.064 orang dan jumlah siswa 29.368 orang dan jumlah guru tingkat SD sebanyak 4.186 orang dengan jumlah murid sebanyak 76.654 orang. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20) terpenuhi, hal ini disebabkan bahwa jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan sekolah di daerah pinggiran.



Gambar 2.19 Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2011-2020
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

4. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

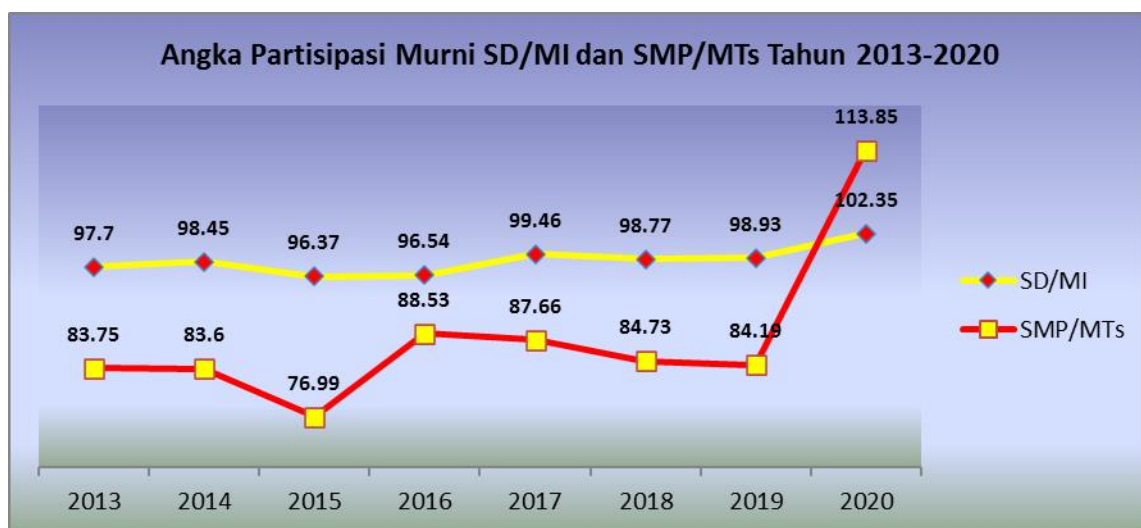
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI	98,45	96,37	96,54	99,46	98,77	93,90	102,35,
APM SMP/MTs	83,60	76,99	88,53	87,66	84,73	80,07	113,85

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2014 hingga tahun 2020 fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai APM SD/MI adalah sebesar 98,45%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2018 dengan angka partisipasi murni di tahun 2018 sebesar 98,77%. Sama halnya dengan nilai APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2014-2020. Secara umum nilai APM SD/MI tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 dan Kembali naik pada tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.38 diatas.

Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.



Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2013-2020 (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

5. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan

tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 2.39 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tdk/Belum Pernah Sekolah	NA	32,10 %	34,30 %	9,38%	9,41%	9,67%	0,63
Tidak/Belum tamat SD		11,00 %	10,30 %	30,70%			
SD/MI/Sederajat		16,80 %	16,20 %		15,53%	16,21%	
SLPT/MTs		12,20 %	12,00 %	13,34%	11,57%	11,92%	
SMA/SMK		22,40 %	21,90 %	36,74%	22,30%	23,26%	
D I/II		0,60 %	0,60%	0,85%	0,52%	0,59%	
AKADEMI/D III		1,80 %	1,70%	2,54%	1,78%	1,88%	
S1/Sarjana		3,00 %	2,90%	6,45%	3,21%	3,46%	
S2/S3/Pasca Sarjana		0,10 %	0,10%				

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2018 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2019, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2019 sebanyak 11,92% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SLTP/MIs. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari ±45% menjadi 9,67%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di

Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai. Ketersediaan jumlah perguruan tinggi beserta akreditasinya ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi, terampil dan mampu berdaya saing.

6. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Indikator ini sama dengan indikator angka melek huruf pada pokok bahasan fokus kesejahteraan masyarakat bagian pendidikan.

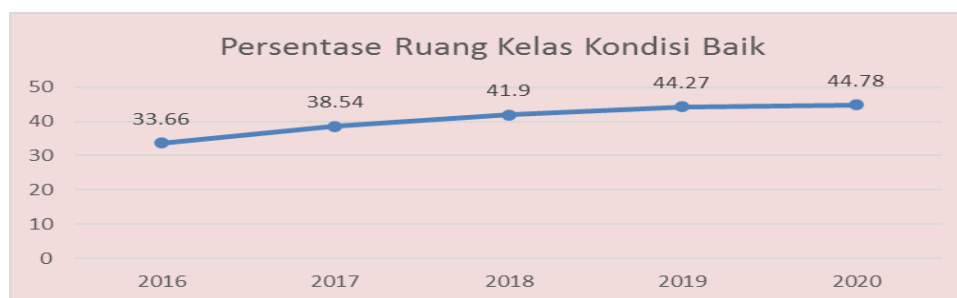
7. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2019 sebesar 44,27%. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Persentase ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2020 persentasenya naik menjadi 47,78% seperti yang tersaji pada Tabel 2.40 dan Gambar 2.21

Tabel 2.40 Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2020

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)				PERSENTASE RUANG KELAS (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
BAIK	446	443	518	613	38,54	41,99	44,27	47,78
RUSAK RINGAN	655	557	598	651	56,26	52,80	51,11	50,74
RUSAK BERAT	56	55	54	19	5,20	5,21	4,62	1,48
JUMLAH	1134	1055	1170	1283	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.21 Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021

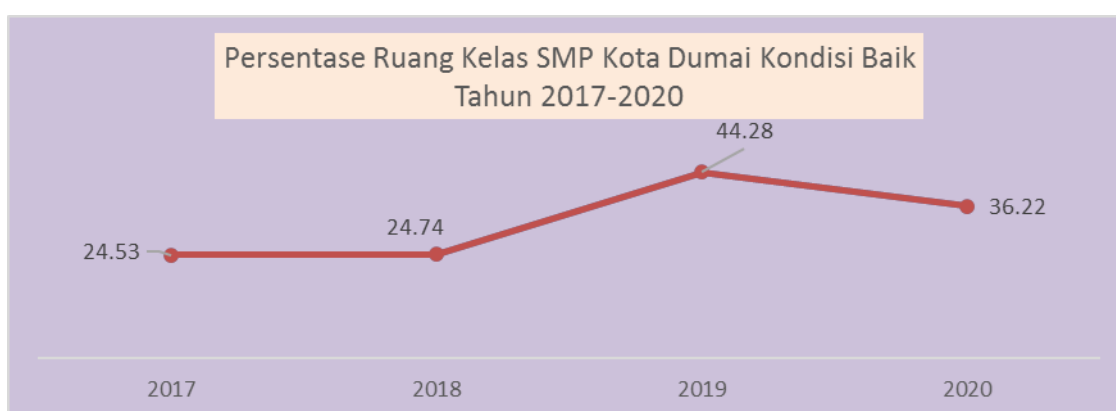
8. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun 2018 menunjukkan tren perkembangan yang menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 persentase ruang kelas untuk jenjang SMP dalam kondisi baik sebesar 24,74% dan pada tahun 2019 persentasenya mengalami peningkatan menjadi 44,28%, dan pada tahun 2020 36,22%. Ruang kelas SMP dari tahun 2020 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Tabel 2.41 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2020

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)				PERSENTASE RUANG KELAS (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
BAIK	105	94	201	163	24,53	24,74	44,28	36,22
RUSAK RINGAN	310	270	243	287	72,43	71,05	53,52	63,78
RUSAK BERAT	13	16	10	0	3,04	4,21	2,20	0
JUMLAH	428	380	454	450	100,00	100,00	100	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.22 Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4 sampai 6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah TK dan sederajat berjumlah 56 sekolah, pada tahun 2019 menjadi 128 sekolah. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka

mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di kota Dumai semakin meningkat.

Tabel 2.42 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013 - 2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	56	56	79	79	101	128	128	131

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.23 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

10. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2014, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan, artinya persentase siswa yang putus sekolah semakin besar dan dalam kurun waktu antara 2015 hingga tahun 2019 tren perkembangan angka sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penurunan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2012 adalah sebesar 0,17%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,26% dan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,00%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2012 angka putus sekolah adalah sebesar 0,04%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,40% dan pada tahun 2019 angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,00%.. Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai

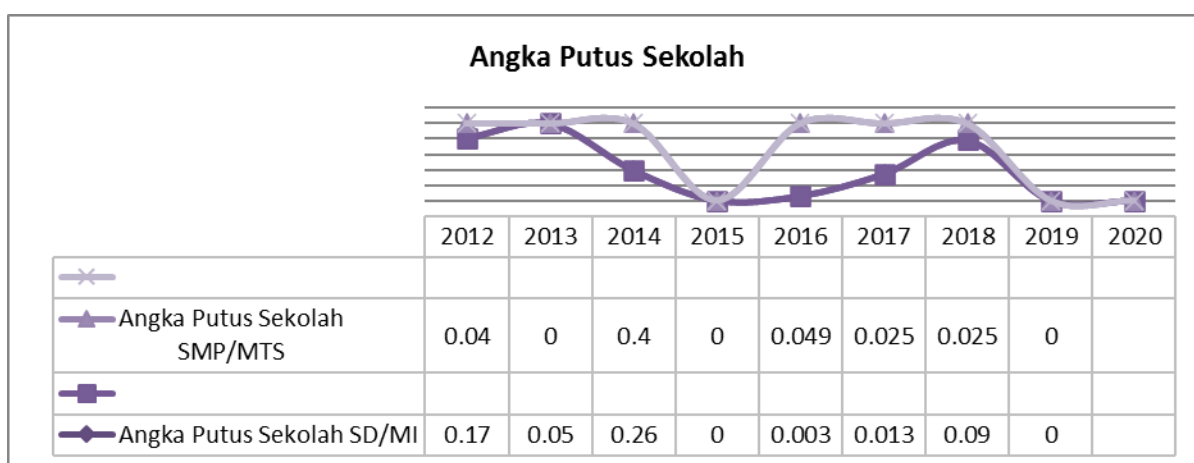
menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2015, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut.

Untuk angka putus sekolah SD/MI/ dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2012-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.43 dan Gambar 2.24 berikut.

Tabel 2.43 Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013	0,09	0,00
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025	0,025	0,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

11. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

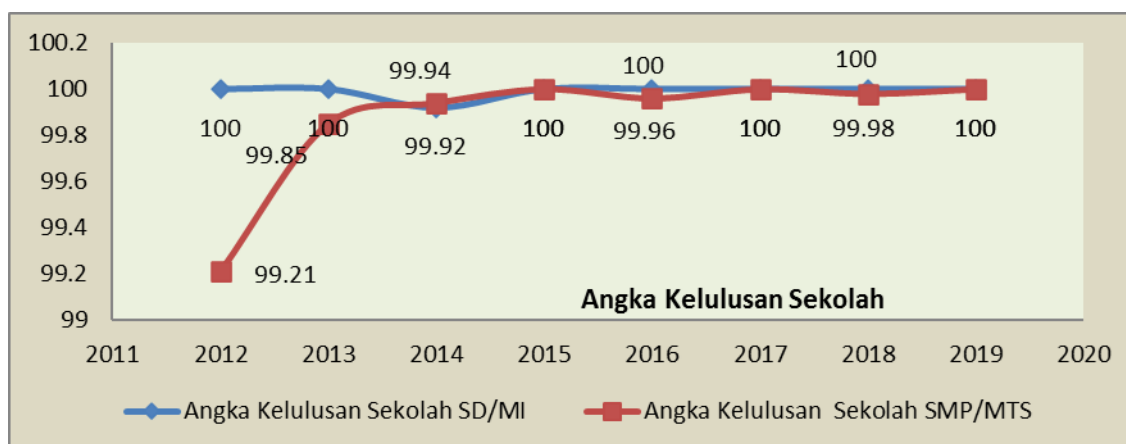
Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2012 hingga tahun 2020, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2012 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100% namun tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 99,92%, dan pada tahun 2020 naik kembali

angka kelulusan menjadi 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2012 angka kelulusan 99,21% dan pada tahun 2020 angka kelulusan adalah sebesar 100%.

Tabel 2.44 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kelulusan Sekolah SD/MI	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kelulusan Sekolah SMP/MTS	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	100,00	99,98	100,00	100,00

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kkebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.25 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2020

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

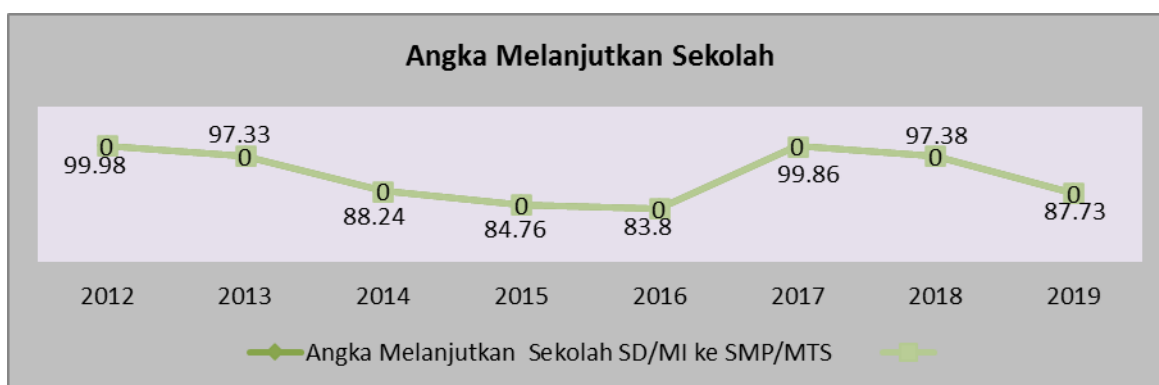
Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2012 hingga 2019 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2012 dengan nilai 99,98%. Pada tahun 2019 angka melanjutkan menurun dari tahun sebelumnya dari 97,38% menjadi 87,73%. Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan mulai meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat

berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.45 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	99,86	97,38	87,73	

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.26 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2012-2019

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai Tahun 2015-2018

Angka Partisipasi Sekolah (tahun)	2015	2016	2017	2018
7-12	99,61	99,11	99,46	100
13-15	95,51	93,82	95,23	95,88
16-18	67,85	74,02	81,03	72,42

(Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2019)

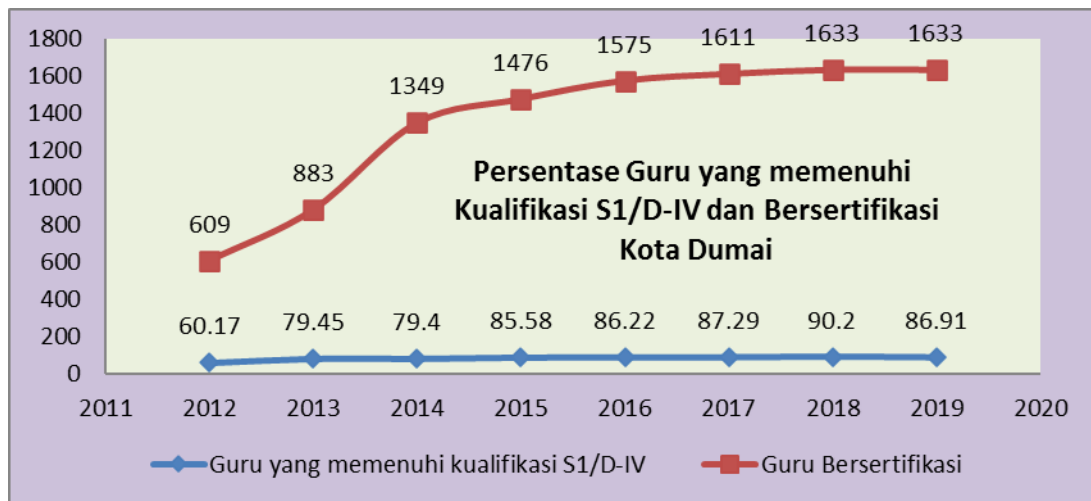
13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 60,17%, dan pada tahun 2019 menjadi 89,91.

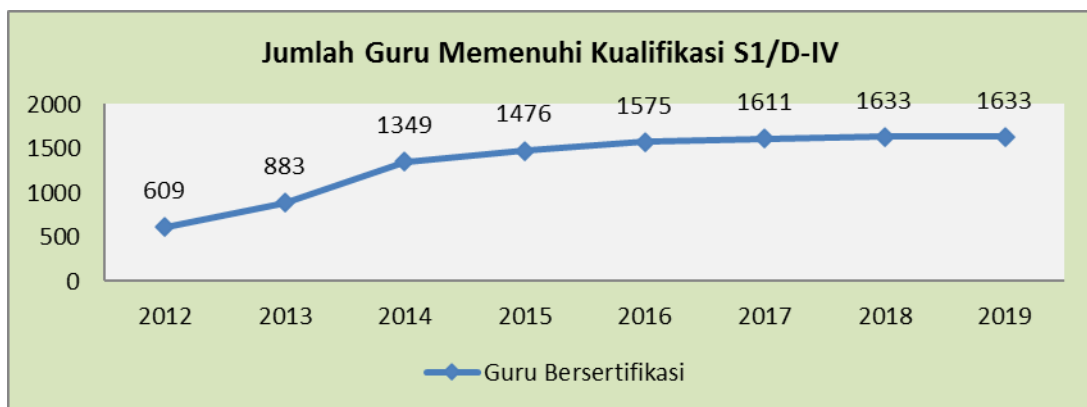
Tabel 2.47 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	87,29	90,20	86,91	
Guru Bersertifikasi	609	883	1.349	1.476	1.575	1.611	1.633	1.633	

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021)



Gambar 2.27 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)



Gambar 2.28 Guru Bersertifikasi Tahun 2012-2019
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020)

Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau murid, serta mempersiapkan murid untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

B. Kesehatan

1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

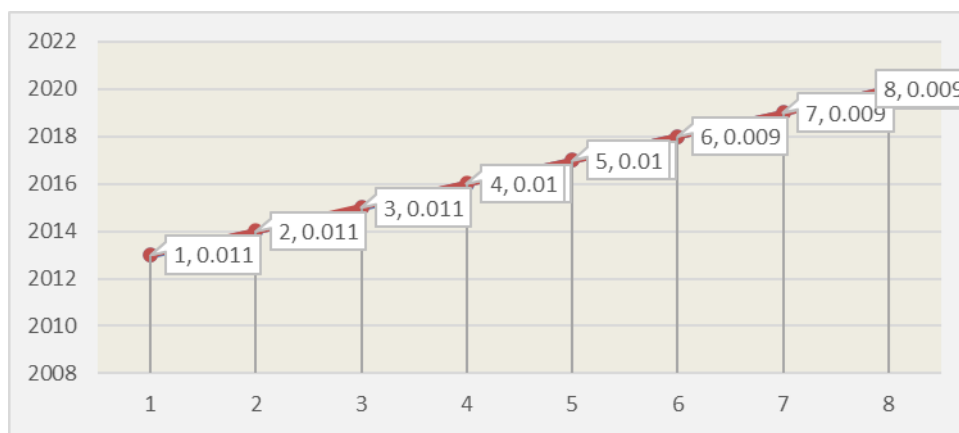
Pada tahun 2013-2020 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe C yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2013-2020 tersaji pada Tabel 2.47 gambar 2.33.

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2013 adalah sebesar 0,011, tahun 2020 sebesar 0,009. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2013 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2020, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,009 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.48 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah Penduduk	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	314.166
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)



Gambar 2.29 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 diolah)

2. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

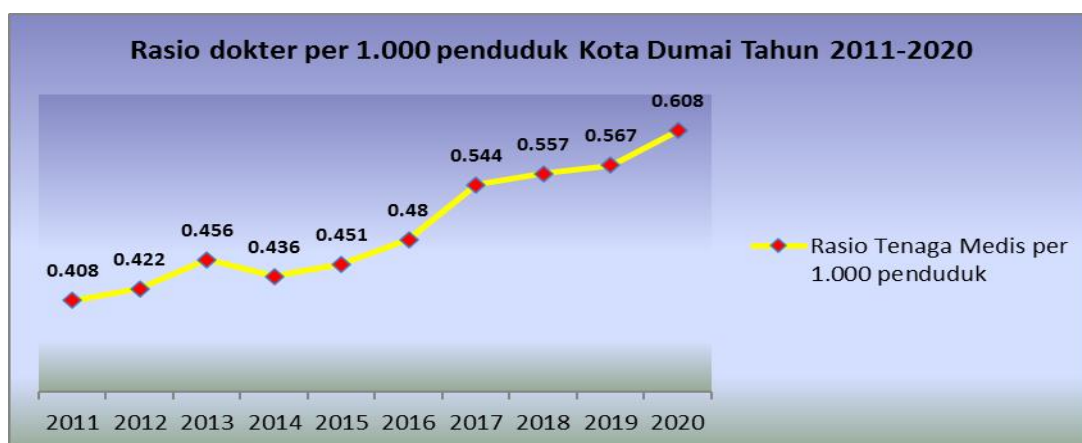
Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2020 mengalami fluktuasi, dari 106 tenaga medis pada tahun 2011 menjadi 191 tenaga medis pada tahun 2020.

Tabel 2.49 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga medis	106	113	125	122	129	140	162	169	175	191
Jumlah penduduk	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	314.166
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544	0,557	0,567	0,608

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,608 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,608 tenaga medis. Dengan kata lain 1 orang tenaga medis melayani 1910 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami kenaikan setiap tahunnya, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, namun penambahan jumlah dokter yang melayani tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk.



Gambar 2.30 Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2020

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

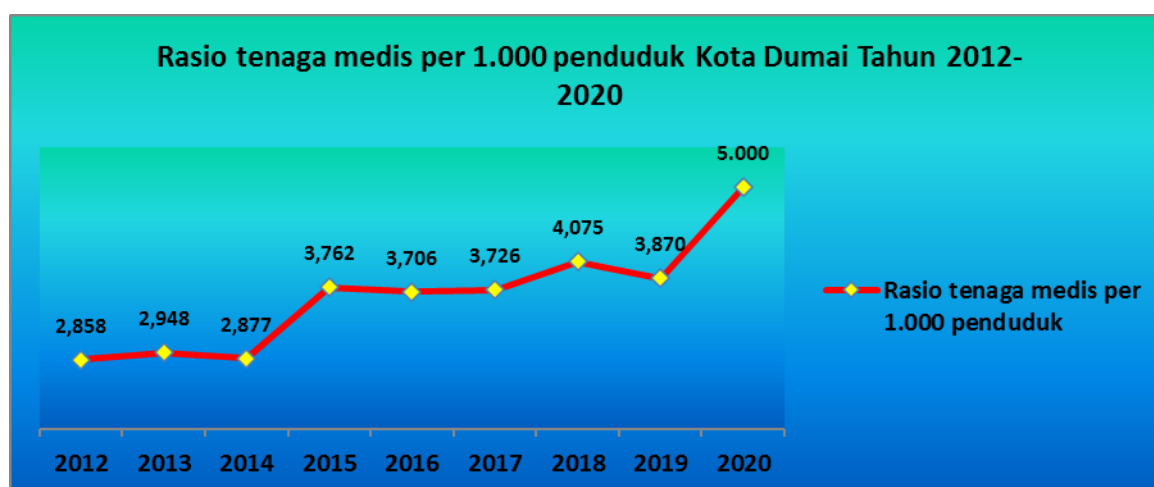
3. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan di Kota Dumai meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2013 sampai dengan 2020, menunjukkan peningkatan dari 2,948 menjadi 5,00. Berikut ini tabel 2.49 dan Gambar 2.31 yang menunjukkan perkembangan rasio tenaga medis di Kota Dumai.

Tabel 2.50 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Kesehatan	808	806	1076	1082	1109	1236	1370	1572
Jumlah penduduk	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	314.166
Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	2.948	2.877	3.762	3.706	3.726	4.075	3.870	5,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)



Gambar 2.31 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain di Provinsi Riau seperti dari Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada tahun 2020 total tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan

Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.166 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 44 orang, dokter umum sebanyak 83 orang dan dokter gigi sebanyak 17 orang. Dengan demikian pada tahun 2020 rasio dokter spesialis sebesar 14,01 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 26,42 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 5,41 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.51 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Dokter Spesialis	30	36	32	39	42
Dokter Umum	87	72	80	86	83
Dokter Gigi	23	23	21	19	17
Perawat	425	435	485	481	386
Bidan	314	331	336	365	382
Apoteker	41	38	21	19	20
Asisten Apoteker	17	19	37	43	39
Gizi	25	25	25	28	35
Sanitasi	10	10	9	10	12
Kesehatan. Masyarakat	44	52	67	60	33
Teknisi Medis	81	68	67	78	39

(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021)

Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ($BB/TB \leq 3$ standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2020 kasus balita dengan gizi buruk 3 kasus di Kota Dumai, sehingga prevalensi balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0,01%. Kasus gizi buruk ditemukan 1 kasus di wilayah kerja Jayamukti, dan 2 kasus di wilayah kerja Puskesmas Bukit Kayu Kapur . Pelacakan kasus gizi kurang dilakukan melalui surveilans gizi

dengan mengoptimalkan penanggung jawab daerah binaan puskesmas. Pada tahun 2020 dari 26.005 balita yang ditimbang, ditemukan 106 kasus gizi kurang dengan prevalensi 0,25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 7 kasus, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus Gizi buruk menjadi 3 kasus.

Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2020 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Setelah dilakukan surveilans kasus terhadap 3 kasus balita gizi buruk, diketahui penyebabnya antara lain memiliki penyakit penyerta seperti TB Paru, kondisi sanitasi yang buruk sehingga balita mengalami diare dan kecacingan, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan gizi seimbang pada balita, dan kondisi ibu sedang hamil sehingga kurang perhatian terhadap pertumbuhan balita tersebut. Ketiga kasus gizi buruk termasuk pada keluarga kurang mampu Intervensi yang dilakukan pada ketiga kasus gizi buruk tersebut antara lain dirujuk ke RSUD untuk diobati penyakit penyerta TB Paru, pemberian MP ASI 12 keping per hari, susu balita SGM selama 90 hari, pemberian formula WHO selama 90 hari, pemantauan berat badan balita satu minggu sekali, pemantauan kondisi fisik balita, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan keluarga tentang gizi seimbang, dan menganjurkan orang tua untuk membawa balita ke posyandu secara berkala.



Gambar 2.32. Angka Prevalensi Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai Tahun 2014 sampai dengan 2020

(Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2020)

Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap

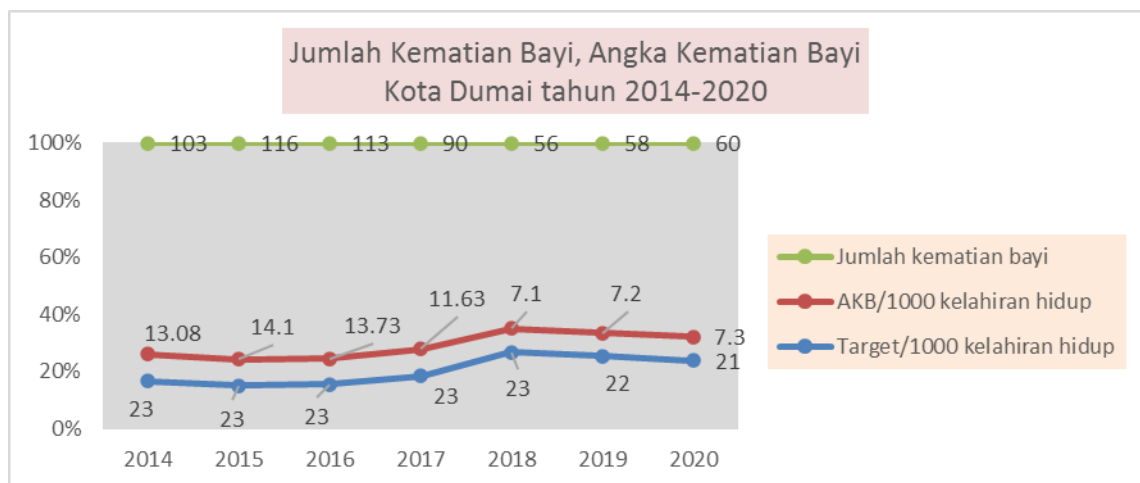
bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

4. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 capaian Angka Kematian Bayi adalah sebesar 7,3 per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 60 bayi yang meninggal.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2020 pada Gambar 2.33. Pada tahun 2020 angka kematian bayi meningkat dari tahun 2019, dari 7,2% menjadi 7,3%.

Adapun Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia 13 kasus, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 12 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kematian bayi di kota Dumai ada 60 kematian dengan angka kematian bayi 7,3/1000 kelahiran hidup.



Gambar 2.33 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu

penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

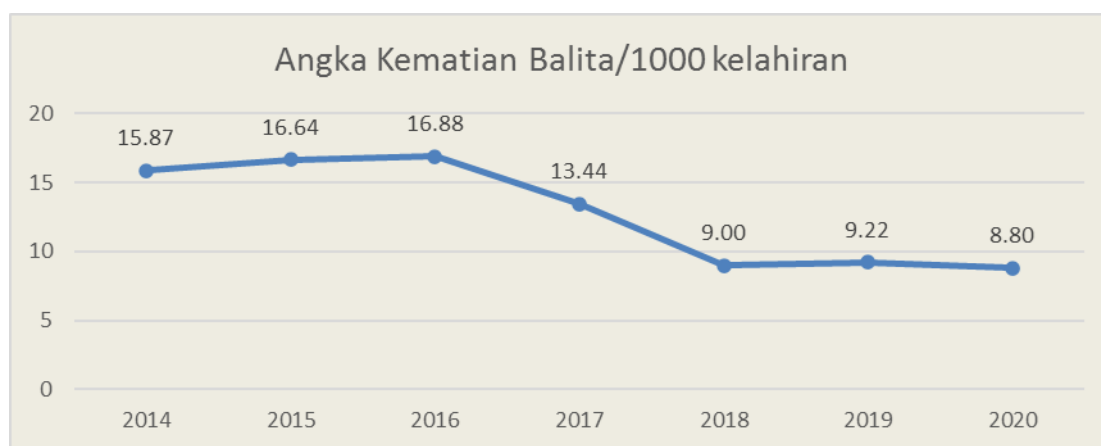
5. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 60 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kehidupan bayi di Kota Dumai sebesar 8.168 jiwa.

Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 9,2 / 1000 kelahiran hidup di tahun 2019 menjadi 8,8/1000 kelahiran hidup di tahun 2020.

Tahun 2020 balita yang meninggal di kota Dumai ada 72 kematian dengan angka kematian balita sebesar 8,8/1000 kelahiran hidup dari target 26/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada balita sebagian besar disebabkan pneumonia, demam, seperti yang tersaji pada Gambar 2.34



Gambar 2.34 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

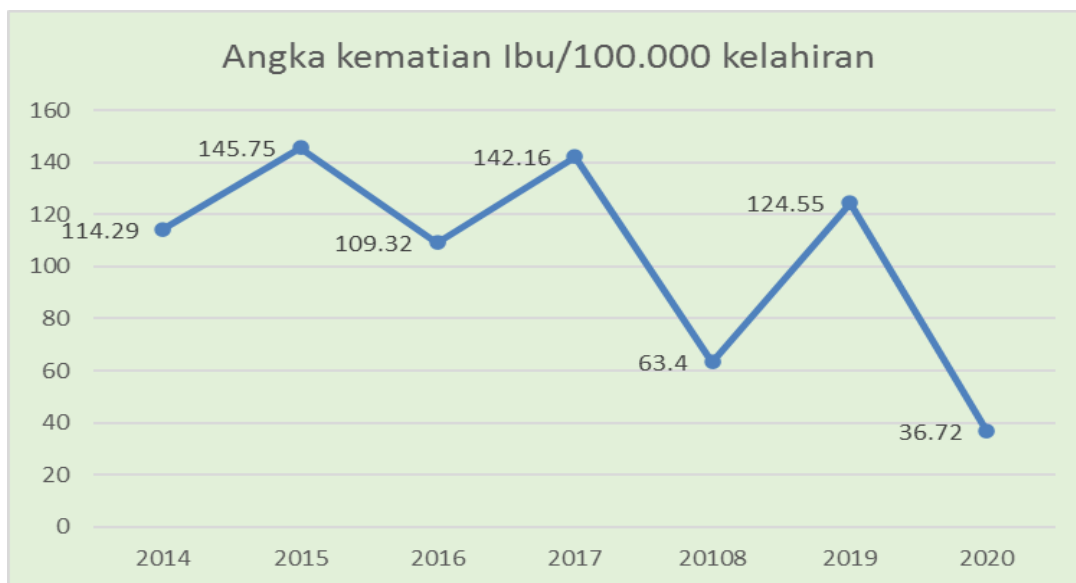
6. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: eklampsi, pendarahan, partus macet, infeksi, abortus dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, thypoid serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi/pre eklampsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2014-tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.35, adapun angka kematian ibu melahirkan tahun 2020 adalah sebanyak 3 kematian ibu dan 8.168 angka kelahiran hidup, maka didapat angka kematian ibu adalah 36,72 per 100.000 kelahiran hidup dari target 102/100.000 kelahiran hidup, hal ini menunjukkan pada tahun 2020 angka kematian ibu dibawah dari target yang ditetapkan. Dari 3 kasus kematian ibu, 1 kasus kematian pada ibu hamil, 1

kasus kematian pada ibu bersalin, dan 1 kasus kematian ibu nifas. Adapun penyebab kematian ibu adalah perdarahan 1 kasus dan hipertensi dalam kehamilan 2 kasus.



Gambar 2.35 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2014-2020
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan penemuan pada kedua indikator tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di kota Dumai.

7. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK

(pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Dari kegiatan audit maternal Perinatal tahun 2020 ditemukan sebanyak 1606 kasus komplikasi kebidanan. Penjarangan komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas dilaksanakan sedini mungkin oleh tenaga kesehatan di lapangan. Kasus komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan salah satu target indikator kinerja tahun 2020 dengan cakupan 89,4% dari target 95%. Jenis komplikasi kebidanan yang ditangani sebagian besar adalah Perdarahan sebanyak 353 kasus (21,98%), Ketuban Pecah Dini 229 kasus (14,25%), Eklamsi sebanyak 147 kasus (9,15%).

8. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

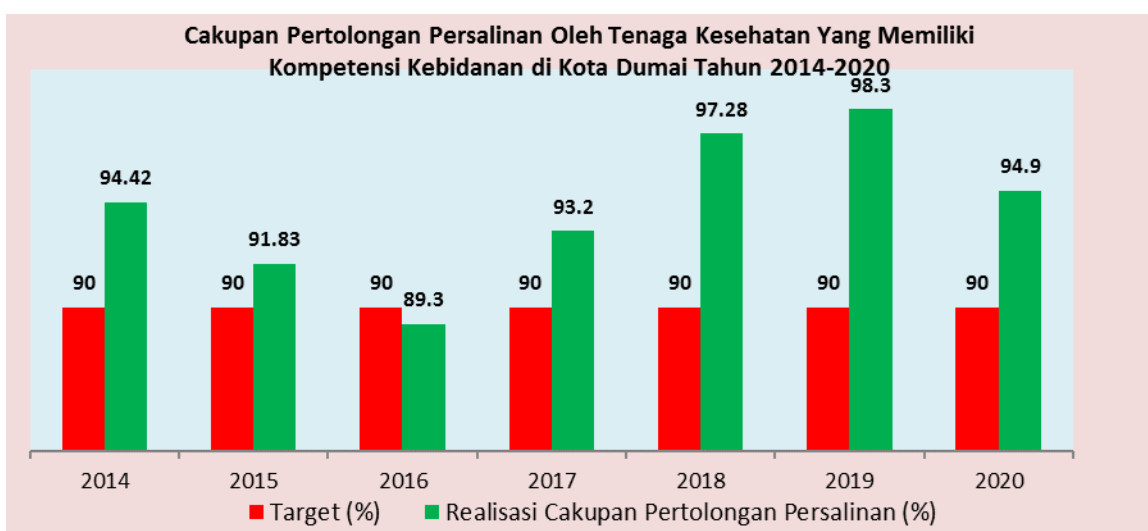
Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2010 sampai 2020 cenderung meningkat. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.

Gambar 2.36 di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2020. Pada

tahun 2010 angka cakupan tersebut sebesar 16,88%, dan pada tahun 2020 naik menjadi 94,9%.

Jika dibandingkan dengan Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai menargetkan cakupan sebesar 95%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2020 tidak mencapai target. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan (98,3%) sedangkan tahun 2020 sebesar 94,9%. Dari data program KIA menunjukkan ada 4 persalinan ditolong oleh dukun beranak, dan persalinan yang tidak terpantau di daerah terpencil.



Gambar 2.36 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2011 sampai 2020 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPTHB Hib, 4 dosis , 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella.

Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak ruibella (MR), kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Untuk cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Pada tahun 2012 sampai dengan 2018, cakupan kelurahan UCI telah mencapai 100%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, hanya 54,55% dari 33 kelurahan yang ada di kota Dumai hanya 18 kelurahan yang mencapai UCI. Tahun 2020 tidak ada kelurahan yang mencapai UCI (0%). Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini tabel cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2010 – 2020.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak rubella. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 93,5% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap kota Dumai pada tahun 2020 hanya 27,6% dari target 93,5% dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 91,1% .

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan kurang dari 24 jam sejak lahir.. Imunisasi DPT-HB Hib sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B, radang pneumonia, radang otak (meningitis). Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT HB Hib dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB Hib. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak rubella untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan.

Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di kota Dumai, tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 52 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2019-2020

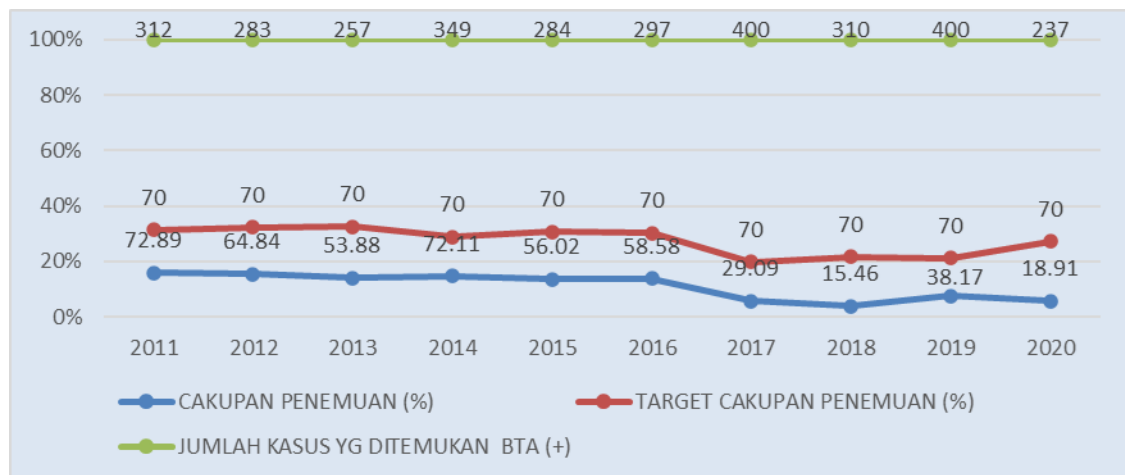
No	Jenis Imunisasi	Tahun	
		2019	2020
1	BCG	73,00	59,81
2	Campak	97,3	34,54
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	97,8	50,02
4	Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4	96,6	49,93
5	Hepatitis B1, Hepatitis B2 dan Hepatitis B3	102,2	90,66

(Sumber: Dumai dalam angka tahun 2021)

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di kota Dumai berfluktuasi selama kurun waktu

2011-2020. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Permenkes No 4 tahun 2019, yang menargetkan cakupan sebesar 100% pada tahun 2019, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Dumai belum mencapai target nasional. Berikut ini cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang disajikan dalam gambar 2.37 di bawah ini:



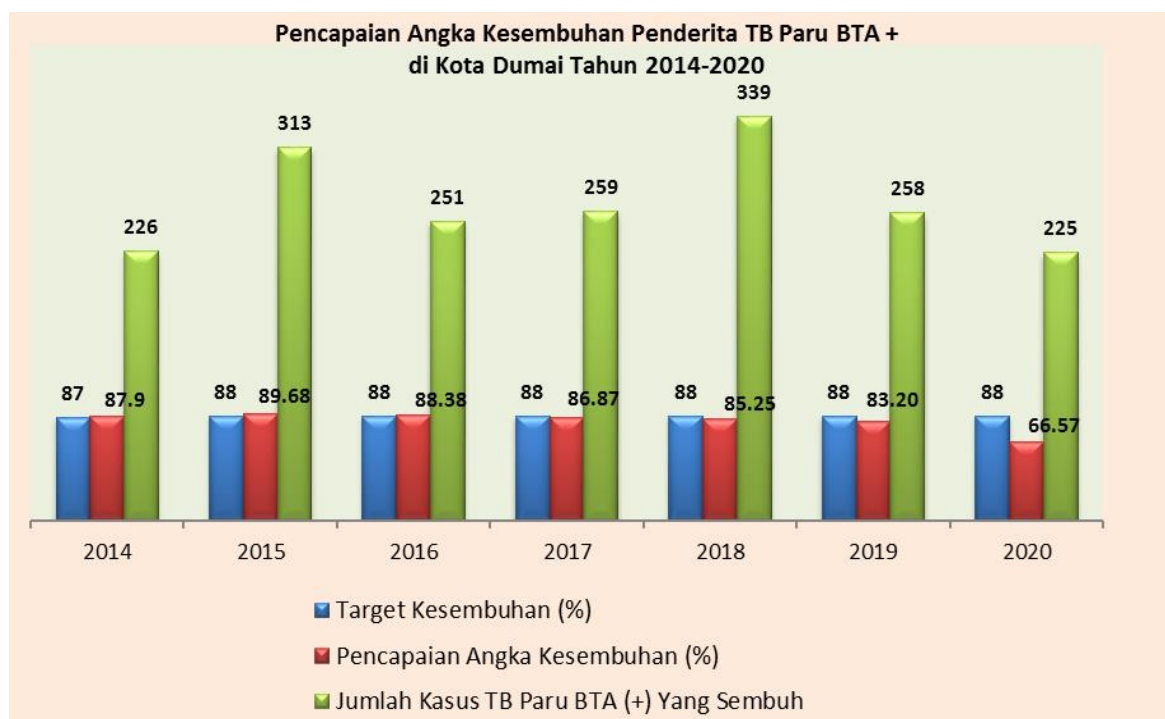
Gambar 2.37 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021)

Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Penanganan kasus TBC ini perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus.

Faktor kebosanan dan kejenuhan akan timbul. Untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obatnya.

Pada tahun 2020 cakupan penemuan TB Paru BTA positif yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan bakteriologis ditemukan 237 penderita BTA positif dari 1.253 kasus yang diperkirakan ada di kota Dumai, jadi cakupan penemuan (BTA) positif sebesar 18,91%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kinerja cakupan penemuan penderita TB Paru BTA positif dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan kejadian pandemi covid, dimana masyarakat takut ke berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala/gangguan pernafasan terdiagnosa Covid 19. Cakupan penemuan semua kasus tuberculosis (CDR) hanya 35,3% dari target 70%. Pada tahun 2020 dari total 338 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 225 orang dinyatakan sembuh (hasil

pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 66,6%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 83,2%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Apabila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2020 tidak mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.



Gambar 2.38 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2020
(Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021)

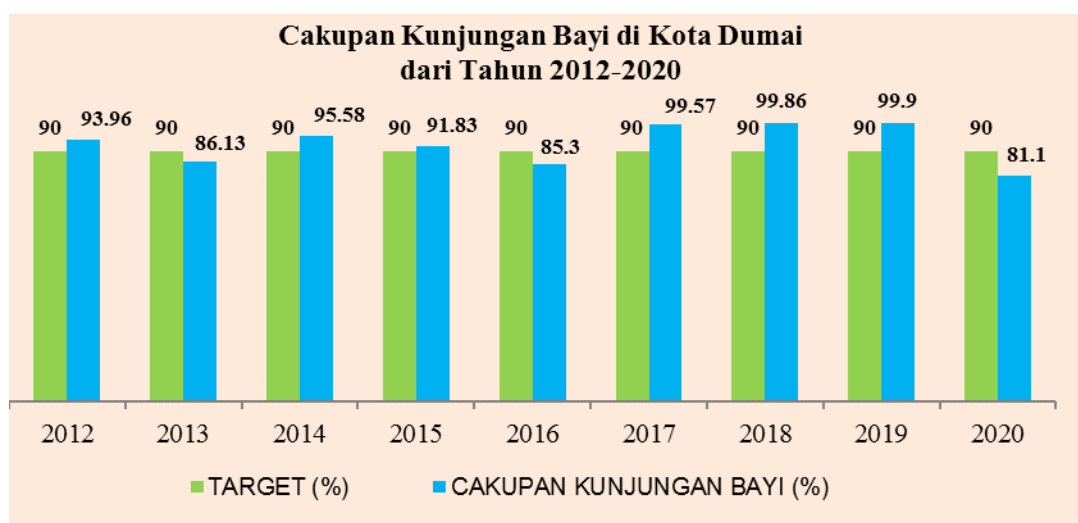
11. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (HB0, BCG, DPT/DTaP/DTaP-IPV, Polio 1-4, dan Campak Rubella), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi sebesar 93,96% dan pada tahun 2020 sebesar 81,1%. Bila dibandingkan dengan

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah layanan urusan wajib dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni sebesar 90%, maka angka tersebut tidak mencapai target.

Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).



Gambar 2.39 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

12. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan

kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.53 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2020

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	17 (kondisi baik)
	5. Bukit kayu Kapur			
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	11 (9 kondisi baik, 2 kondisi rusak berat)
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	22 (20 kondisi baik, 2 kondisi rusak)
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	10. Bukit Timah	√		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2020 telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.53. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.53. Sedangkan untuk kondisi puskesmas keliling dan ambulans yang ada di puskesmas se Kota Dumai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.54 Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah seluruh kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Rasio puskesmas	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2011	259.913	9	3,46
2012	268.022	9	3,36
2013	274.089	9	3,28
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	314.166	10	3,18

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.56 Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2020

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
1	Dumai Kota	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Pusling/Toyota Kijang	1 unit	1995/APBD Kab Bengkalis	Kondisi rusak total
		Ambulan mitsubishi	1 unit	2005	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Ambulan PSC Toyota Hiace	1 unit	2017	Baik
		Ambulan PSC APV	1 unit	2016	Baik
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Dumai	Rusak berat (dari Pusk JM, ke Dinkes ke Pusk Dumai Kota)
2	Bumi Ayu	Ambulance mitsubishi	1 unit	2005 (APBD Propinsi Riau)	Rusak total
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
3	Dumai Barat	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
4	Bukit Timah	Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	Rusak berat
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
5	Bukit Kapur	Pusling/Toyota Kijang LGX	1 unit	2001/APBD Propinsi Riau	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Ambulance/Isuzu ELV	1 unit	Hibah CSR Pertamina 2014	Kondisi rusak berat
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulance Toyota Inova (PSC)	1 unit	2017 DAK Yankesdas	Baik
6	Sungai	Pusling/Toyota Kijang	1 unit	2002/APBD Kota	Kondisi rusak

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
	Sembilan			Dumai	sedang
		Pusling/Isuzu	1 unit	2006/APBD Kota Dumai	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Duma	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulance Toyota Innova	1 unit	2017 DAK Yankesdas	Ambulance standar SPGDT Kijang Inova (PSC)
		Ambulan Hiluck Pick UP	1 unit	2018	Baik
		Pusling double garden /Mitsubishi triton	1 unit	2020 (APBN)	Baik
7	Medang Kampai	Pusling/KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Ambulannce/Mitsubishi	1 unit	2018	Baik
		Pusling double garden /Mitsubishi triton	1 unit	2020 (APBN)	Baik
8	Jaya Mukti	Ambulance Toyota Hilux	1 unit	2018	Baik
9	Purnama	Ambulance KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	SK Penghapusan : 679/BPKAD/2020, tanggal 19 Oktober 2020
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
10	Bukit Kayu Kapur	Ambulance/Suzuki APV	1 unit	2015 (Hibah Setda)	Baik
		Ambulannce/Mitsubishi	1 unit	2012/APBN-P (Hibah Pusat)	Baik
		Ambulannce/Avanza hibah bagi masyarakat Gurun Panjang	1 unit	2017 (APBD P)	Baik

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

13. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2020 sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.57 Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. ParitPisang Mas
Dumai Kota	2. RimbaSekampung
Bukit Kapur	3. GurunPanjang
	4. Kayu Kapur
	5. SimpangMurini
Sungai Sembilan	6. SukaDamai
	7. BasilamBaru
	8. SimpangPulai
	9. KampungSejati
	10. Sungai
	11. Sungai Teras
	12. BuluHala
	13. Pelintung
Medang Kampai	

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap, tetapi Kota Dumai mengalami pemekaran menjadi 33 kelurahan di Tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.58 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas pembantu	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Jumlah seluruh kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021)

14. Akses Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu : puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana , kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki $\pm 45\%$ dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi.

Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hampir miskin tahun 2020 sebesar 9.338 (5,88%) orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkungannya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh Indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

15. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0,70%), Tahun 2017 (0,96%) dan pada tahun 2018 jumlah kasus HIV di kota Dumai secara kumulatif ada 260 kasus dengan prevalensi rate 0,79% terhadap penduduk beresiko HIV di kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di kota Dumai sejak tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa, 540 jiwa dan 18.305 jiwa. Pada tahun 2020 prevalensi HIV pada penduduk beresiko sebesar 2,03%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 prevalensi HIV di kota Dumai mengalami peningkatan.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria kota Dumai Tahun 2017 s/d 2020 cenderung statis 0,01 per 1000

penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 2 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2020 mengalami peningkatan kasus sebesar 359 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 114,3/100.000. dan jumlah kematian ada 2 kasus dengan CFR Case Fatality Rate sebesar 0,6%. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 359 kasus dengan melakukan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2020 Kasus penemuan TB BTA positif di kota Dumai masih berkisar 18,91% yaitu ada 237 kasus dari 1.253 kasus yang harus ditemukan di kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di kota Dumai. Pada tahun 2020 angka kesembuhan TB Paru sebesar 66,6% dari target 88%, dari 338 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 225 kasus.

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di kota Dumai. Diare dapat terjadi karena perilaku hidup bersih dan sehat yang tidak mendukung, keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Cakupan penderita diare semua umur yang dilayani sebanyak 3.585 penderita (42,3 per seribu penduduk) dari target penemuan 270 per seribu penduduk.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular Hipertensi, Diabetes malitus. Kanker, ODGJ (orang dengan gangguan

jiwa). Pada tahun 2020 Hipertensi pada kelompok umur 15 tahun keatas tercatat 13.598 Penderita (20,0%) dan Diabetes malitus tercatat 2.916 Penderita (81,5%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2020 kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) berat pada 407 (86,41%) dari sasaran ODGJ berat 471 kasus yang harus ditemukan. Screening , pemeriksaan leher rahim pada tahun 2020 dilaksanakan pada 197 (0,4%) dari sasaran 49.542 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 35 kasus (17,8%) dan tidak ditemukan curiga kanker dan 0 kasus.

16. Indikator SPM Kesehatan

Tabel 2.59 Indikator SPM Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020

No	Indikator SPM	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	8.135
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.142
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.573
4	Pelayanan Kesehatan Balita	24.301
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	59.900
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.191
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.598
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2.916
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	407
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	2.665
12	Warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	3.841

(Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal, adapun realisasi persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 adalah sebesar 79,09%.

2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik (km)	868,1	955,6	826,2	639,1	618,9	627,3	448,74	400,98
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2 3	1198,25
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	51,65%	52,35%	37,45%	36,47%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Tahun 2021 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu. Pada tahun 2014 turun menjadi 52,97%, kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 55,57%. Kembali mengalami penurunan di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 36,47%. Kondisi ini menurun disebabkan beberapa faktor dan adanya kesalahan dalam pengolahan data survey data dasar jalan. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.40 Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.60 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2019 dan 2020. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik. Pada tahun 2020 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik terjadi penurunan dari 60,04% di tahun 2019 menjadi 57,31% pada tahun 2020. Begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65.

Tabel 2.61 Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2020 per Kecamatan

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Bukit Kapur	171,67	77,17	77,25	51,36	51,44	26,17	26,17	16,89	16,89
Dumai Barat	180,58	91,15	92,88	22,19	22,19	32,63	32,07	34,61	33,45
Dumai Kota	61,26	49,95	51,00	5,04	5,04	4,00	2,95	2,28	2,28
Dumai Selatan	132,42	99,23	99,47	11,15	11,39	10,39	10,39	11,42	11,42
Dumai Timur	142,31	95,71	95,88	26,56	26,73	9,79	9,79	10,08	10,08
Medang Kampai	291,86	141,59	143,10	87,17	87,86	40,91	40,52	21,50	21,06
Sungai Sembilan	218,14	64,08	67,73	37,85	39,19	57,93	55,78	56,93	56,77

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bukit Kapur	171,67	51,06	42,42	38,86	53,53	1,954	3,79	71,95	71,95
Dumai Barat	180,58	78,02	85,41	30,06	26,43	4,163	7,36	61,38	61,38
Dumai Kota	61,26	47,25	34,00	9,843	5,78	3,088	2,47	18,36	18,71
Dumai Selatan	132,42	90,65	61,18	18,92	10,67	1,14	7,47	52,09	53,09
Dumai Timur	142,31	93,41	42,34	31,59	22,92	3,70	5,30	71,75	71,75
Medang Kampai	291,86	33,46	90,23	21,73	29,11	16,05	9,77	162,75	162,75
Sungai Sembilan	218,14	26,44	45,58	10,23	24,35	5,66	6,63	141,58	141,58

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021)

3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

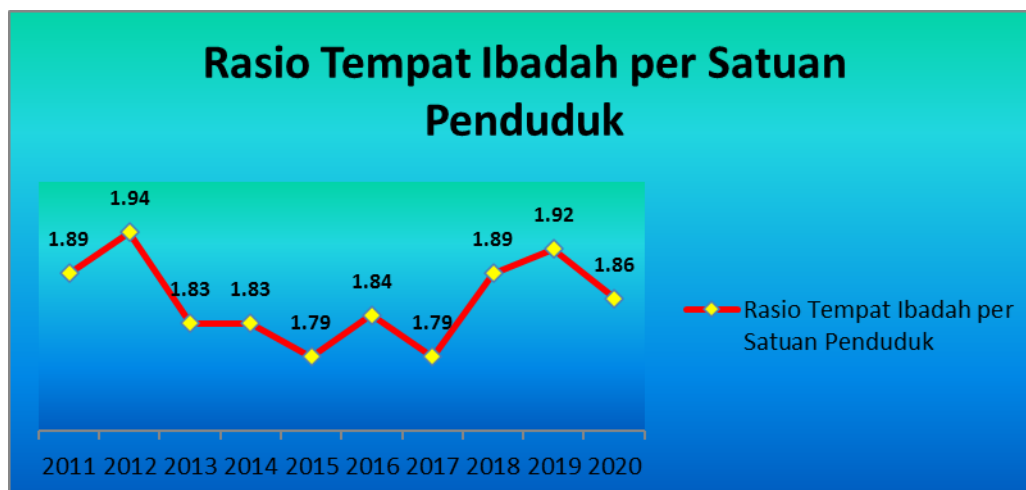
Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.62 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,94	1,83	1,83	1,79	1,84	1,79	1,89	1,92	1,86
Masjid	211	196	196	216	216	217	225	221	235
Mushola	219	217	217	216	216	210	242	231	236
Gereja Kristen	71	73	73	74	80	81	81	81	81
Gereja Katolik	6	6	6	8	6	6	6	6	6
Pura	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Klenteng	12	12	12	12	10	10	10	47	26

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.41 Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.41 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011-2020
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Hingga tahun 2020 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,86. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

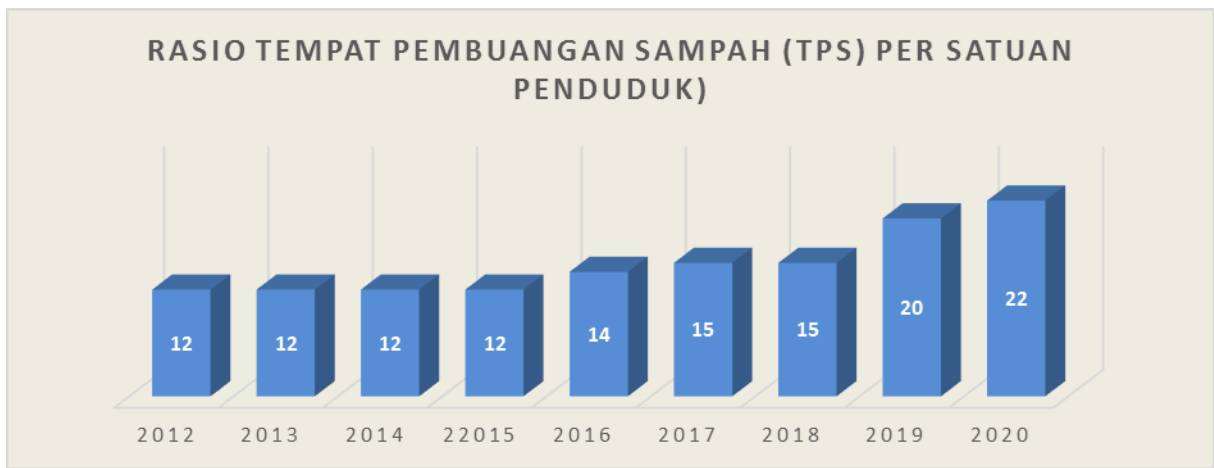
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2020 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel 2.63 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS	20 TPS	22 TPS

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)



Gambar 2.42 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

5. Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

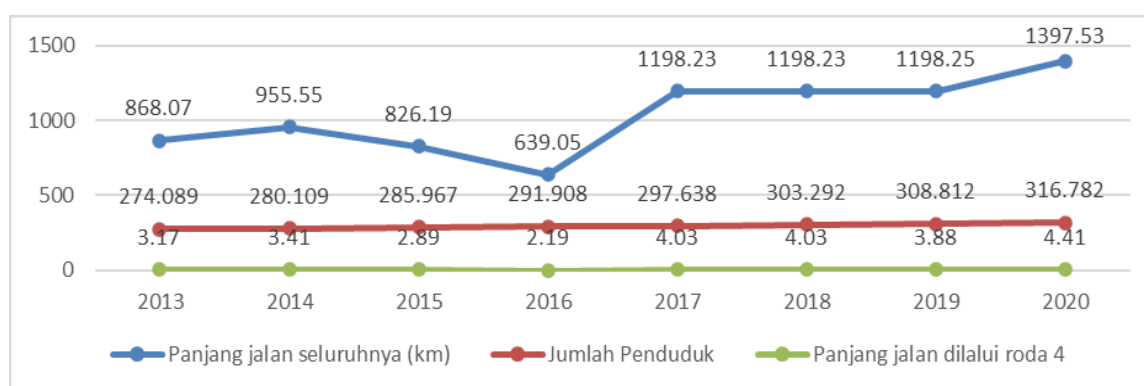
Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.64 Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan seluruhnya (km)	868,07	955,550	826,19	639,05	1.198,23	1.198,23	1.198.25	1.397.53
Jumlah Penduduk	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782
Panjang jalan dilalui roda 4	3,17	3,41	2,89	2,19	4,03	4,03	3,88	4,41

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dari 3,17 pada tahun 2013 menjadi 4,41 di tahun 2020. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan Gambar maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai pada Gambar 2.42 seperti dibawah ini.



Gambar 2.43 Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

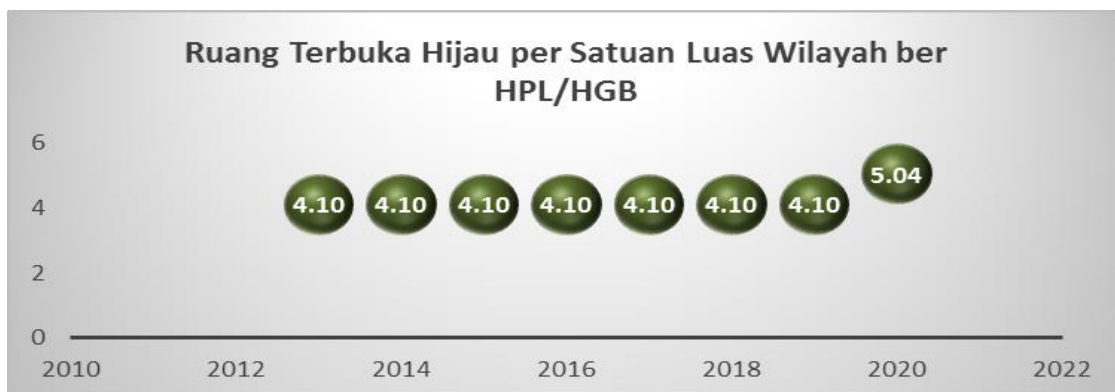
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai.

Tabel 2.65 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	5,044%

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)



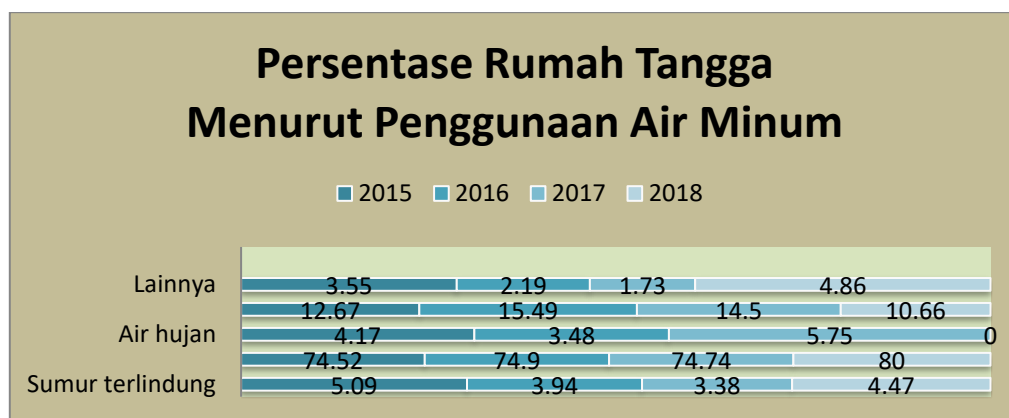
Gambar 2.44 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar diatas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,103 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, dan ada peningkatan pada tahun 2020 sebesar 5,044%.

D. Perumahan dan Pemukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

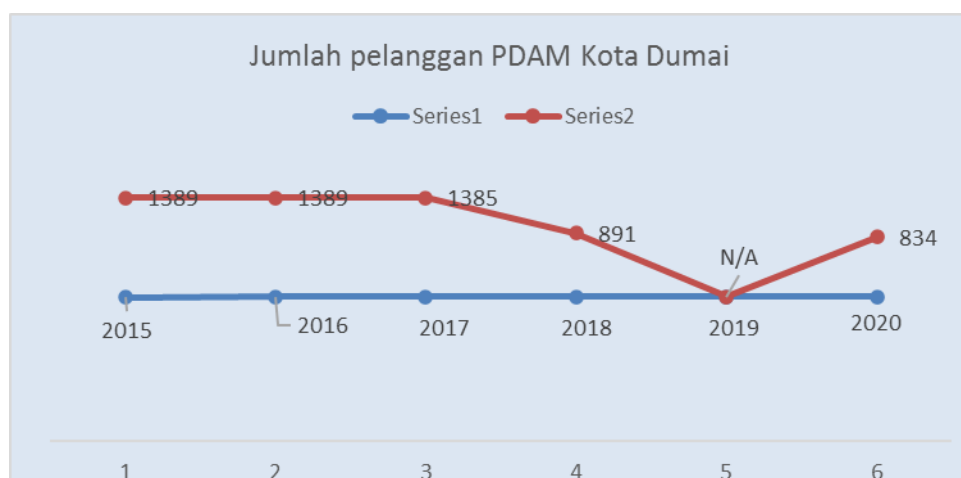
Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Adapun perkembangan penggunaan sumber air tersebut dari tahun 2015-2018 tersaji pada Gambar 2.45.



Gambar 2.45 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2015-2018
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2019)

Dari Gambar 2.45 diatas terlihat bahwa persentase penggunaan air merk/isi ulang sebagai sumber utama air minum cenderung mengalami peningkatan dari 74,74% pada tahun 2017 menjadi 80% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Gambar 2.46. PDAM di tahun 2020 berjumlah 834 pelanggan sambungan rumah, pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kota Dumai belum menjangkau seluruh penduduk kota.



Gambar 2.46 Jumlah Pelanggan Kota Dumai
(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

Tabel 2.66 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	54.873	59.766	64.162	68.432	94.761	101.245	79.890	84 082
Jumlah rumah tangga	68.522	70.027	71.492	72.977	83.863	89 558	84.338	89.573
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	80,08	85,35	89,75	93,77	88,50	88,46	105.56	106.53

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.62 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2020 sebanyak 106,53% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

3. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Data yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2020 berdasarkan luas kawasan kumuh kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan draft rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,6 Ha kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.67 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Laksamana Rimbas	Dumai Kota	Laksamana	12,59
		Rimba Sekampung	
Dumai Kota	Dumai Kota	Dumai Kota	-
Bukit Bintang Jadi	Dumai Kota dan Dumai Selatan	Bukit Datuk	3,54
		Bintang	
		Sukajadi	
STDI Rimbas	Dumai Barat dan Dumai Kota	Simpang Tetap Darul Ihsan	-
		Rimba Sekampung	

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Pangkalan	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	-
Buluh Kasap	Dumai Timur	Buluh Kasap	3,95
Mukti Palas	Dumai Ttimur	Jaya Mukti	6,67
		Tanjung Palas	
Teluk Binjai	Dumai Timur	Teluk Binjai	2,89
Bumi Ayu	Dumai Selatan	Bumi Ayu	4,11
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	-
Total			33,57

(sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021)

Dari tabel diatas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung total luas kawasan kumuh lingkungan permukiman kumuh kota Dumai tahun 2020 yaitu 33,57 Ha.

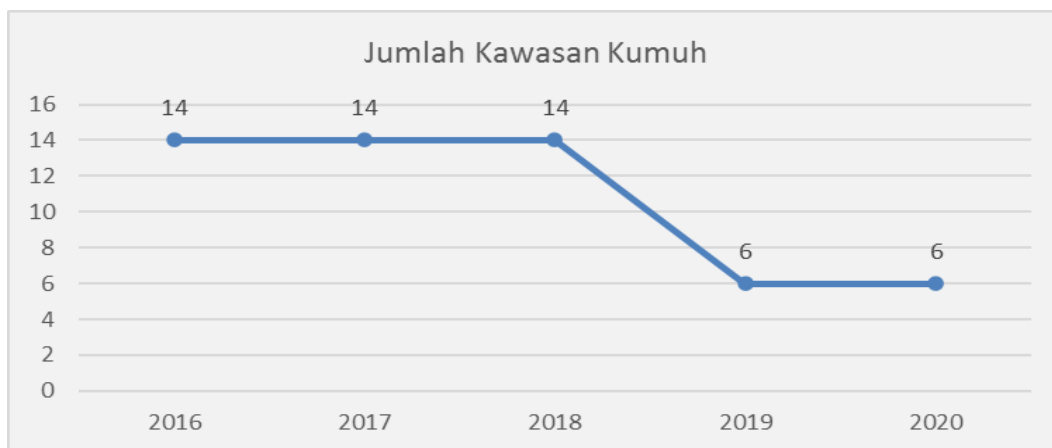
4. Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, jumlah kawasan kumuh pada tahun 2020 berjumlah 6 kawasan dan rumah tidak layak huni berjumlah 9.724 unit pada tahun 2020, yang tersaji pada Tabel 2.67 berikut.

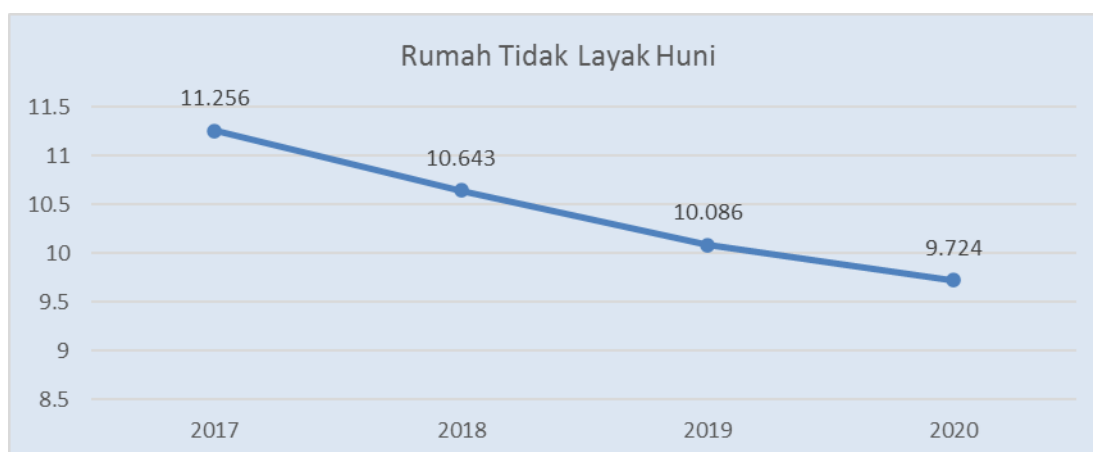
Tabel 2.68 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber
Jumlah Kawasan Kumuh	14	14	14	6	6	Kotaku Provinsi Riau
Rumah Tidak Layak Huni	N/A	11.256	10.643	10.086	9.724	Olah Data Bidang Perumahan Rakyat dan E-RTLH

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)



Gambar 2.47 Jumlah Kawasan Kumuh
(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)



Gambar 2.48 Rumah Layak Huni
(Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)

5. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data tahun 2020 Jumlah kepala keluarga kota Dumai tahun yaitu 16.108 kk dimana dapat diasumsikan satu kk sama dengan satu rumah, pada tahun 2019 kepemilikan rendahnya kepemilikan rumah layak huni yaitu 16.436 kk terlampir pada tabel 2.68 sebagai berikut:

Tabel 2.69 Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2018-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Sumber
Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	17.726	17.559	16.918	16.436	16.108	BKKBN dan Bidang Perumahan Rakyat

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan Permukiman dan BKKBN Tahun 2021)



Gambar 2.49 Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin

(Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2021)

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.70 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polisi Pamong Praja	91	86	90	98	96	94	89	98
Jumlah penduduk per 10.000*	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,06	30,26
Rasio jumlah pamong praja	3,32	3,07	3,15	3,36	3,23	3,1	2,96	3,24

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin naik terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

2. Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Dumai.

Tabel 2.71 Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.590	1.590
Jumlah penduduk per 10.000*	27,41	28,01	28,60	29,19	28,02	28,70	28,70	28,70
Rasio linmas	58,01	56,87	55,92	54,78	56,74	55,40	55,40	55,40

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang cakupan petu di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten/kota. adapun reliasai cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) adalah sebesar 50%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan social kemasyarakatan. Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota merupakan perbandingan antara Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran dengan Luas wilayah kabupaten/kota. adapun realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota adalah sebesar 3,50%.

5. Persentase Penegakan PERDA.

Persentase Penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah pelanggaran PERDA pada tahun 2019 adalah sebesar 100%. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota

Dumai dengan target Pengawasan sebesar 200 pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

6. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah kelurahan.

Tabel 2.72 Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pos Siskamling	173	173	173	173	173	173	173	538
Jumlah kelurahan	33	33	33	33	33	33	33	33
Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	6,13

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan jumlah siskamling disetiap kelurahan di Kota Dumai selama kurun waktu 2013-2020.

7. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	90%	95%	96%	75%	81%	92%	90%	83,3%

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

Pada tahun 2020 terdapat 83,3% persentase cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dalam penertiban PKL.

8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran k3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat

dan teridentifikasi oleh SATPOL PP. adapun reliasasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah sebesar 60%.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2013 ada sebanyak 236 kasus dan pada tahun 2020 kasus pelanggaran K3 di kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 704 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	236	235	238	238	155	156	166	704

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021)

9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai,petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.584 dan tahun 2019 menjadi 1.590. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.75 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599	1.590	1.590	1.590

(Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020)

10. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2020 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.76 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	25	23	29	7	17	9	20

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021)

11. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang hanya sampai tahun 2013 dan tahun 2017 berjumlah 1 (satu) kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.77 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	-	1 Keg	1 Keg.	1 Keg.	-	-	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021)

12. Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman telah terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 33 unit rumah yang terbakar yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kejadian kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebanyak 66 unit dan 26 unit. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyak kejadian kebakaran rumah penduduk	34 unit	38 unit	66 unit	26 unit	10 unit	25 unit	33 unit

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

F. Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarjinalkan di Kota Dumai. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2014-2020 tersaji pada Tabel 2.78.

Tabel 2.79 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2014-2020

Uraian	TAHUN							SAT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial								
Penduduk rawan Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	35	8	8	4	4	12	Tidak ada	Jiwa

Uraian	TAHUN							SAT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	106	27	27	12	12	93	Tidak ada	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	15.882	17.998		78.682	KK
4). Bayi Terlantar	18	32	32	334	307		Tidak ada	Jiwa
5). Anak Terlantar	87	151	151	2292	2132		Tidak ada	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	760	760	595	571	55	2	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	122	122	423	424		34	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda							128	Jiwa
9). Tuna Susila	96	356	356				Tidak ada	Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	38	38				Tidak ada	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159					Tidak ada	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	30	30	196	196			Jiwa
Jumlah Panti Asuhan								
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	11	11	11		12	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja		1					Tidak ada	Buah
3). Panti Sosial Tresna Wrida			1	1	1		Tidak ada	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1		1	Buah
Jumlah PMKS	183,963		182,009	19.738	21.644		78.846	Orang
1). PMKS Yang Tertangani	61,124		60,453	127	87	264		Orang
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	61,715		61,103	19.738	21.644			Orang
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan	61,124		60,453	12.389	14.430			KK
4). Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	99.04 %		98.99 %	62.77 %	66.67 %			
5) Persentase PMKS yang tertangani	33.23 %		33.21 %	643.43 %	401.96 %	90.92%		
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33		33	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7		7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	66	66	66	66	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	30	34	32	52	52	52	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	12	12	11	11	11	2	LKS

Uraian	TAHUN							SAT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	5	6	14	30	31	31	27	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	-	-	Buah
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	4	4	4	5	Buah
10). Penyuluh Sosial	8	8	11	11	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	Orang
12). Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-	-	Buah

(Sumber: Dinas Sosial Tahun 2021)

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Target dari indikator sasaran ini yaitu 52% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 0% berdasarkan sumber dari Dinas Sosial hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Persentase PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 264 orang dan tahun 2020 Target dari indikator sasaran ini yaitu 28% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 27,04% dengan capaian 96,59%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak cacat, anak jalanan dan anak nakal.

Adapun kegiatan ini pada tahun 2020 telah melakukan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau sebanyak 19 orang. Kegiatan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan, Adapun kegiatan pada tahun ini Jumlah PMKS yang ditangani yaitu kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 17 orang, Anak Korban Tindak Kekerasan sebanyak 7 orang, Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 89 orang, anak terlantar sebanyak 25 orang,

korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 4 orang, Korban tindak kekerasan sebanyak 33 orang yang penanganan dan pendampingannya langsung dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial mulai dari tingkat Kelurahan, Polres dan Kejaksaan.

b. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 82% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menjadi 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

c. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 100% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 100% dengan capaian 100%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Adapun kegiatan ini pada tahun 2020 yaitu Dinas Sosial Kota Dumai melakukan Penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana melalui Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 83 KK.

d. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra pada tahun 2020 Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 10% dan realisasi indikator ini sampai yaitu 0% dengan capaian 0%.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening penerima jaminan sosial melalui program ASPD (*Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas*) sebanyak 48 orang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) merupakan perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatat. adapun target dan realisasi besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kinerja bersama (PB) pada tahun 2020 adalah sebesar 65%.

2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar. dan realisasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah sebesar 45%, dengan target pada tahun 2020 adalah 50%.

3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Adapun realisasi dari besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020 adalah sebesar 0%.

4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,72	64,14	65,26	66,94		65,53	64,17		
PHK	-	101		19	18	32	46	28	19
Kasus PHK	-	101	11	19	18	32	26	17	19

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Orang Terkena PHK	-	101	124		65 orang	75 orang	46	28	49
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Minimum	-	2.057.011	2.087.791	2.576.207	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupah andi nyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian		Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupah andi nyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupah andi nyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	
Rata-Rata Upah Minimum	-	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.372,50	2.886.655.44	3.118.453.87	3.383.834,29
L. Usaha Angkutan, Pengangkutan dan Komunikasi	-	6	9	11	16	Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota		Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota	UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota
L. Usaha Bangunan	-	102	35	39	41			sda	sda
L. Usaha Industri Pengolahan	-	12	52	2	14			sda	sda
L. Usaha Jasa Kemasayarakatan	-	8	3	-	3			sda	sda
Keuangan, Ansuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	-	24	8	11	16			sda	sda
L. Usaha Listrik, Gas dan Air	-	-	17	140	137			sda	sda
L. Usaha Perdagangan Besar,	-	31	11	15	27			sda	sda

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eceran, RumahMak andari Hotel									
L. Usaha Pertanian, Perhutanan, PerburuhandanPerikanan	-	1	15	5	7			sda	sda
L. Usaha Pertambangan, Perhutanan, PerburuhandanPerikanan	-	2	12	6	11			sda	sda

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2021)

5. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2013- 2019

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	1098	1308	315	1200	1210	2112	1020

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020)

6. Jumlah Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	2,502	3,174	3,461	3,511	8,288	4.869	5.513	6.961
Perempuan	2,359	1,378	1,757	1,656	3,846	3.346	4.210	5.044
Jumlah	4,861	4,552	5,218	5,167	12,134	8.215	9.723	12.005

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,81 persen dari 9.723 di tahun 2020 menjadi 12.005 di tahun 2019. Berikut tabel sebagai berikut :

Tabel 2.83 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Dumai, Tahun 2018 dan 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	-	65,53	64,17	69,28	67,15
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	-	11,23	6,04	6,47	8,19

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

7. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2013- 2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keselamatan dan Perlindungan	195	151	165	-	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2019 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2020 tidak pernah disampaikan ke kabupaten/kota.

8. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun kota Dumai pada tahun 2020 yaitu sebanyak 38 pekerja. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai
Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	19	39	12	14	55	36	38

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2021)

Data perusahaan wajib lapor sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86 Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		LK	PR	LK	PR
2011	121	1986	201	-	-
2012	125	5837	527	20	-
2013	186	8210	1113	114	1
2014	155	8912	1030	23	-
2015	232	10384	1075	11	-
2016	272	13923	1564	66	1

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

(Keterangan : Data Tahun 2017 dan 2020 Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi)

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR merupakan perbandingan antara jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Adapun realisasi proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 4 orang adalah sebesar 13,33%.

2. Rasio KDRT

Rasio KDRT merupakan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Adapun realisasi rasio KDRT sebesar 0,007%. dimana jumlah KDRT sebesar 7 kasus.

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2.986 dan pada tahun 2020 naik menjadi 5.432.

Tabel 2.87 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	5.202	5.201	5.273	5.432

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021)

4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2012 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 2.359 pada naik menjadi 54.915 pada tahun 2020. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan kota Dumai tahun 2012-2020.

Tabel 2.88 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi angkatan kerja perempuan	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	10.442	10.442	45.315	54.915

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021)

5. Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target kinerja kegiatan sebanyak 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan antara lain meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2020 tercatat sebanyak 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

terdiri dari kekerasan terhadap anak sebanyak 89 kasus dan kekerasan terhadap perempuan (≥ 18 tahun) sebanyak 32 kasus. Dari 89 kasus kekerasan terhadap anak diperoleh data sebanyak 19 kasus mengalami kekerasan seksual, hak asuh anak sebanyak 21 kasus, penelantaran anak sebanyak 11 kasus, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 10 kasus, kekerasan fisik sebanyak 12 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 10 kasus.

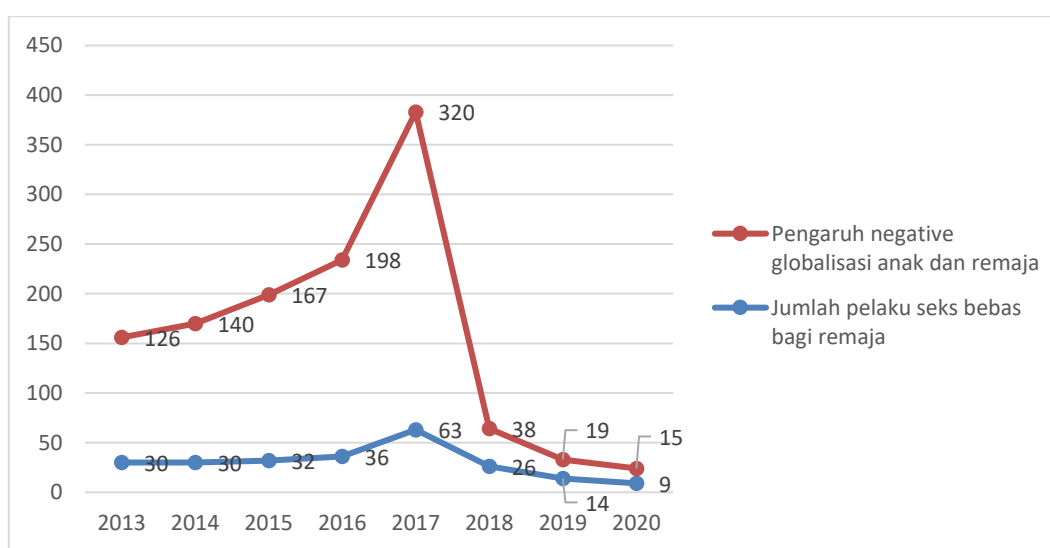
6. Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2013 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 30 pelaku hingga kurun waktu 2020 menurun menjadi 9 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 126 pada tahun 2013 dan menurun menjadi 15 pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 2.89 dan Gambar 2.50 dibawah ini:

Tabel 2.89 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	30	30	32	36	63	26	14	9
Pengaruh negative globalisasi anak dan remaja	126	140	167	198	320	38	19	15

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2021)



Gambar 2.50 Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2021)

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2012 sampai tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2012-2019

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	36,84	26,50	41,36	35,54	38,08	15,18	66,13	34,85

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

*Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2019 kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 2.90. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tabel 2.91 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2019-2020

No	Komoditi Pangan	2019				2020			
		Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	5.712,00	28.596,88	(22.884,88)	Defisit	5.013,9	300.638,00	-	Defisit
2	Jagung	121,00	537,31	(416,31)	Defisit	531,19	749,00	2.119,50	Defisit
3	Kedelai	-	2.039,09	2.039,09	Surplus	0,1	2.119,50	-	Defisit
4	Kacang Tanah	2,40	457,85	(455,45)	Defisit	31,23	481,02	-	Defisit
5	kacang Hijau	-	149,00	(149,00)	Defisit	1	156,33	156,33	Defisit
6	Ubi Jalar	-	671,87	(671,87)	Defisit	-	691,47	691,47	Defisit
7	Ubi Kayu	3.841,27	997,87	2.843,40	Surplus	3.896,68	1.022,17	-	Defisit

8	Sagu	-	137.2	(137.2)	Deficit	-	141,30	141,30	Defisit
9	Buah-Buahan	708,00	7,035.0	(6.327,00)	Deficit	194.911,1	7.123,00	-	Defisit
10	Sayuran	203,00	11,413.6	(11.210,6)	Deficit	3001	19.181,00	-	Defisit
11	Daging Sapi	444,00	516.7	(72.7)	Deficit	-	532,00	-	Defisit

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (300.638 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun. Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganeekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya.

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Luas lahan pertanian di Kota Dumai semakin sedikit, sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan mayoritas lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian di Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai :

Tabel 2.92 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir 2021
						Target	Realisasi	Capaian	
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	81,70	82,10	82,10	83,00	82,85	99,8	83,74
Rata-rata Capaian Kinerja									

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2021)

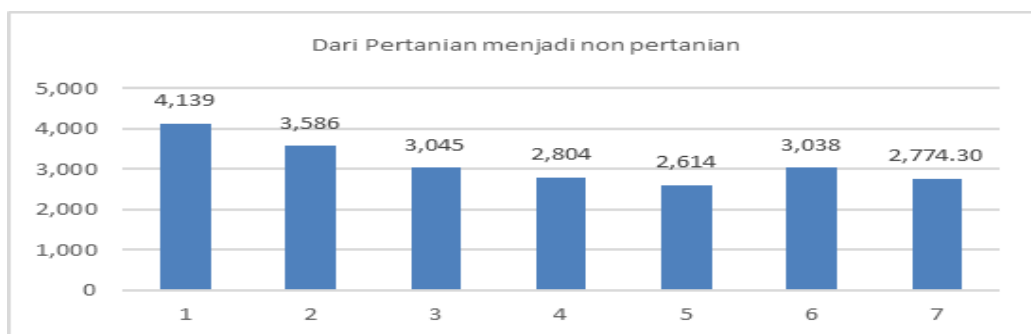
2. Jumlah Alih Fungsi Lahan

Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2011 berjumlah 4.139 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian menjadi non pertanian	4.139	3.586	3.045	2.804	2.614	3.038	2.774,30

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2021)



Gambar 2.51 Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017

(Sumber : Dinas pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

D. Pertanian

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain :

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu :
 1. PT. SUNTARA GAJA PATI di Sungai Sembilan
 2. PT RUAS UTAMA JAYA di Sungai Sembilan
 3. PT. DIAMOND RAYA TIMBER di Sungai Sembilan
 4. PT. ARARA ABADI DI Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai

sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu :

1. PT. SUNTARA GAJA PATI Di Kecamatan Sungai Sembilan
2. PT RUAS UTAMA JAYA Di Kecamatan Sungai Sembilan
3. PT. DIAMOND JAYA TIMBERS Di Kecamatan Sungai Sembilan
4. PT. PERTAMINA PERSERO Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
5. PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
6. PT. ARARA ABADI di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah dan progress penyelesaian. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
1.	Tanah Bekas Hak Pakai PT. CPI	<p>a. Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persil = 4.361 - Luas penguasaan tanah seluas : 3.283.084,06 M <p>b. Saatini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi konfrehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan memperbandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>c. Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p> <p>d. Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara , maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposalpermintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>e. Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang diatasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal</p>	<p>Rincian 4.361 persil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tinggal 3.867 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Swasta) 6 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Fasilitas Pemerintah 25 unit - Usaha Pribadi 184 unit - Perusahaan swasta 3 unit - Fasilitas Umum/Sosial 14 unit - Rumah Ibadah 33 unit - Lainnya 221 <p>Kondisi Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Permanen 2.356 unit - Bangunan Semi Permanen 1.728 unit

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN																																																						
		<p>Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>f. PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>g. Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p> <p>h. Permohonan hibah atas 44 bidang tanah sebagaimana huruf e dikabulkan tidak dengan hibah, tetapi dengan Pinjam Pakai selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dari 44 bidang yang diajukan hanya 39 bidang yang disetujui, sementara 5 bidang lagi merupakan tanah kosong belum dapat disetujui dan masih dalam proses.</p> <p>i. Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah yang berasal dari KKKS PT. CPI antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan pada hari Rabu 21 Nopember 2018 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara KEMENKEU kepada Walikota Dumai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor :PRJ 11/KN/2018 dan Nomor 24/P-PJMK/BKPAD/2018 Tanggal 21 November 2018.</p>	<p>- Bangunan Terbengkalai 193 unit</p> <p>- Lahan Kosong 3 persil</p> <p>- Lainnya 217</p> <p>Dengan dikabulkannya pinjam pakai atas tanah yang di atasnya telah berdiri aset Pemko Dumai maka sebagian permasalahan tanah hak pakai PT. CPI dpt terselesaikan. Dan untuk perpanjangan pinjam pakai 5 tahun kedepan akan diajukan permohonan hibah atas obyek tanah tsb.</p> <p>Sedangkan untuk tanah fasilitas sosial dan perkantoran vertikal diajukan PSP nya oleh yang bersangkutan dan sdh berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>DJKN berjanji akan menyelesaikan penyusunan PERPRES tersebut dalam waktu 6 bulan.</p>																																																						
2.	Tanah yang berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai	<p>Hasilnya :</p> <p>Hasil pendataan tahun 2013 :</p> <table border="1" data-bbox="641 1278 1203 1430"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi</th> <th>Luas Total (M²)</th> <th>Luas (M²) yang masuk TWA</th> <th colspan="2">Jumlah Pemilik</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Kelompok</th> <th>hg/instansi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel.Grn Panjang</td> <td>6.173.576</td> <td>4.695.215</td> <td>4</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. Bukit Timah</td> <td>3.885.903</td> <td>3.675.767</td> <td>2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Bumi Ayu</td> <td>3.613.765</td> <td>2.206.002</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kel. Bukit Batem</td> <td>80.468</td> <td>41.090</td> <td>-</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kel. Tanjung Palas</td> <td>13.248.608</td> <td>11.910.033</td> <td>5</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kel. Mundam</td> <td>3.828.432</td> <td>955.102</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Penggunaan Lahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun, Hutan, Belukar Rumah, Sawit diatas umur 3 tahun Sawit diatas umur 3 tahun, Kebun, Hutan, Belukar Sawit diatas umur 3 tahun, kebun, Hutan, Belukar <p>1. Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebut belum terbentuk</p> <p>2. BBKSDA Prov.Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementerian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kota Dumai dalam rangka membahas pembentukan tim tersebut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan</p> <p>Hasil Pendataan :</p> <p>Luas areal yang di data : 69.112 M</p> <p>Jumlah pemilik lahan : 83 KK</p> <p>Peruntukan lahan : Pemukiman masyarakat, kebun dan lain-lain.</p> <p>Hasil pendataan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Kementerian LHK sebagai laporan</p>	No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik						Kelompok	hg/instansi	1	Kel.Grn Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13	2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21	3	Kel. Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2	4	Kel. Bukit Batem	80.468	41.090	-	11	5	Kel. Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49	6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2	Total						<p>Kewenangan penyelesaian permasalahan ini berada di kementerian LHK tepatnya di Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Riau dan Balai Penegakan Hukum LHK. Pemko Dumai hanya melakukan upaya permohonan penyelesaian permasalahan ini dengan melampirkan data-data terkait kondisi TWA tersebut.</p>
No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik																																																					
				Kelompok	hg/instansi																																																				
1	Kel.Grn Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13																																																				
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21																																																				
3	Kel. Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2																																																				
4	Kel. Bukit Batem	80.468	41.090	-	11																																																				
5	Kel. Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49																																																				
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2																																																				
Total																																																									

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
		untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah, terkhusus di depan bandara Pinang Kampai.	
3.	Tanah bangunan SDN 002 Bagan Besar Bkt Kapur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdengar penjelasan keberatan dari ahli waris tsb, dengan alasan merasa tersinggung karena selama ini pihak sekolah tidak menyelesaikan urusan peningkatan surat tanahnya padahal alm. Sudah pernah memperingatinya. 2. Keberatan juga karena ketua yayasan menyerahkan sebagian tanah tersebut pada Dinas P & K Bengkalis padahal dalam surat penyerahan oleh orangtua mereka tanah tersebut hanya untuk panti asuhan. 3. Ahli waris menuntut ganti rugi. 4. Telah diberi pandangan dari berbagai pihak yang hadir kepada ahli waris bahwa sebaiknya tidak menuntut ganti rugi karena orangtua mereka menyerahkan tanah tsbt dalam keadaan masih hidup, maka terputuslah hak ahli waris utk tanah tsbt. Kalaupun keberatan sebaiknya diarahkan kepada Ketua yayasan yang menyerahkan tanah tsbt kepada Dinas P & K Bengkalis, bukan kpd Pemko Dumai. 5. Tidak ditemukan dokumen asli baik penyerahan daro alm. H.A. Bakar kpd yayasan maupun penyerahan dari yayasan kpd Dinas P & K Bengkalis serta surat induk berupa sertifikat, yg ada hny fotocopi saja. 6. Pihak ahli waris mencerugai terjadi transaksi jual beli tanah tsb saat itu. 7. Rapat merekomendasikan agar bag.pertanahan dan DISDIK melakukan penelusuran keberadaan dok.asli dan penelusuran kronologis perolehan atas tanah tsb ke Dinas P & K Bengkalis dan Dinas Sosial Bengkalis krn pd fotocopi sertifikat tsb a.n. Departemen Sosial Kab. Bengkalis diatas tanah tsb jg terdapat bangunanperumahan Dinas Sosial. 8. Rapat pertemuan akan dilakukan setelah menerima hasil dari penelusuran ke Bengkalis. 9. Rapat 2 mei 2019 menyampaikan penawaran masalah sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Meminta kpd ahli waris utk mengikhhlaskan atas apa yg telah dihibahkan oleh alm. H.A. Abu Bakar agar menjadi amal ibadah bagi alm. Didlm kubur. - Ahli waris keberatan dan tetap meminta gantirugi kpd Pemko Dumai. - Disarankan agar ahli waris mengajukan gugatan hokum ke pengadilan sbg solusi dan mjd dasar bagi Pemko Dumai utk mengganti rugi. - Pihak ahli waris menyatakan setuju. 	Selesai dimediaasi, dengan rekomendasi ke pengadilan
4.	Permasalahan tanah kelompok masyarakat Kel. Mekar Sari antara kelompok bapak M. Rais dgn kelompok ibu Sarmiyah	<p>Dari kesimpulan rapat pertama disepakati utk melakukan kunjungan lapangan guna melaksanakan inventarisasi dan klarifikasi lapangan thd objek permasalahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat terakhir pada tanggal 20 Agustus 2019 kembali dihadirkan para pihak yang bersengketa dlam rangka mencari solusi penyelesaian dari permasalahan. 2. Tidak terdapat kesepakatan damai antara kedua belah pihak meskipun telah ditawarkan beberapa solusi, namun masing2 pihak bertahan dgn kemauannya. 3. Kesimpulan terakhir, disarankan kpd kedua belah pihak agar menyelesaikan kasus ini melalui ketentuan hokum melalui pengadilan. 4. Kedua belah pihak menyetujui. 	Proses fasilitasi penyelesaian masalah ini telah selesai.

NO	OBJEK PERMASALAHAN	HASIL/PROGRES	KETERANGAN
5.	Permasalahan tanah Barang Milik Negara (DAMUA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan April 2019, meminta BPN dan Pemko Dumai utk melakukan Konsultasi ke Dirjen Kekayaan Negara selaku pihak yang mencatat asset guna mencari solusi atas permasalahan tsb. 2. Pertemuan Movember 2019, pelaksanaan penambahan luas lahan tol merekomendasikan agar thd tanah-tanah BMN/ masyarakat yang terkena ganti rugi jalan tol spy tetap dilakukan pengukuran luas tanah dan dinilai harganya oleh tim apraisal, kemudian diumumkan dgn menampilkan tanah si A atau si B/BMN, dan melalui mekanisme pengadilan siapa yg berhak atas tanah tsb. 3. Untuk yg tdk terkena jalan tol Dumai-Pekanbaru, diusulkan utk dibahas dlm rapat terbatas dgn Presiden. 	<p>Rekomendasi poin 1 sdh dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DJKN berpendapat SK Gubernurlah bias merevisinya, dan disarankan agar melakukan pertemuan dgn Gubernur. <p>Rekomendasi poin 3 sampai saat ini blm dilaksanakan.</p>
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini. 2. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN atau dianggarkan dalam APBN murni 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikhawatirkan terjadi gejala Masyarakat atas tidak jelasnya status ganti rugi ini 2. Sampai saat ini belum Jelas kelanjutannya.
7.	Permasalahan tanah yang berada dalam kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 30 November 2019, Gubernur Riau membuat rekomendasi hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kota Dumai kpd Menteri KO.Perekonomian RI di Jakarta. Dalam rekomendasi tsb hny lebih kurang 398,75 Ha yg dinyatakan memenuhi syarat utk dilanjutkan proses pelepasannya kemudian terdapat seluas 350,98 Ha yg tdk masuk dlm usulan Walikota Dumai tetapi merupakan kawasan permukiman, fasilitas social, fasilitas umum, maka oleh tim merekomendasikan utk dikeluarkan jg dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. 2. Terhadap surat Walikota kpd Kakanwil BPN Provinsi Riau dan Menteri LHK sampai saat ini blm mendapatkan jawaban. 	<p>Rekomendasi yg disampaikan oleh Gubernur Riau, Menteri LHK sedang diproses.</p>

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020)

Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2019 berikut adalah Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan

NO	OBJEK PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

(Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2019 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah kota Dumai saat ini.

E. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai.

Tabel 2.96 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penanganan sampah (%)	48	50	50	50	50	50	53	56	71

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020, yakni dari 48% di tahun 2012 meningkat menjadi 71% di tahun 2020.

2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.97 data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.97 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	15 (TPS)	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Selama periode 2012-2020 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2012 meningkat menjadi 22 TPS di tahun 2020.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

3. Peningkatan Suhu Udara dan Kualitas Udara di Kota Dumai

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 22,7 °C – 34,1°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.98 (tanpa data tahun 2012). Rata-rata suhu udara tahun 2011-2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 menjadi 25,02°C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2011-2020 masih berada dalam kondisi normal. Pada tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Agustus yaitu sebesar 36°C.

Tabel 2.98 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu rata-rata (°C)	28,32	28,32	28,32	28,32	28,20	28,09	26,4	25,02	29,70

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa

parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.99 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dBA) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 [g/Nm³]). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

Tabel 2.99 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2020

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter yang Diuji	
	SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
Area Transportasi (Taman Bukit Gelanggang)	20	9
Area Pemukiman (Jl. Tanjung Palas)	14	10
Area Perkantoran (Kantor Walikota Dumai)	15	5
Area Industri (PT. MSSP)	19	7

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.100. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.100 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	pH		Kekeruhan (NTU)		Warna (PtCo)		Besi (mg/L)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Air Sumur Kel. Tanjung Palas		6,55		13		234		2,3636
Air Sumur Kel. Teluk Makmur								
Air Sumur Kel. Bukit Kapur								
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	7,03		0,57		5		0,038	
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,31		22,6		96		0,732	
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan								
Air Sumur Kec. Dumai Kota								

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter							
	Besi (mg/L)		Kadmium (mg/L)		Nitrat (mg/L)		KMnO ₄ (mg/L)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2018	2019
Air Sumur Kel. Tanjung Palas		2,3636		<0,003		0,4		0,690
Air Sumur Kel. Teluk Makmur								
Air Sumur Kel. Bukit Kapur								
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,038		<0,003		11,8		0,935	
Air Sumur Kel. Dumai Barat	0,732		<0,003		0,4		1,844	
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan								
Air Sumur Kec. Dumai Kota								

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101 Batas Ambang Baku Mutu Air Sumur

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5 – 9
Kekeruhan	NTU	25
Warna	PtCo	50
Besi	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10
KMNO ₄	mg/L	10

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2019-2020 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

5. Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017

PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

6. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter			
	pH		TSS (mg/L)	
	2019	2020	2019	2020
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,75	-	80	-
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,87	-	102	-
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,89	6,62	80	12
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,86	6,96	80	12
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	-	-	-	-
Air Dermaga PT. CPI	7,85	-	80	-
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,88	7,44	80	18

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter

Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di 5 (lima) titik pengujian sampel.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.103 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.103 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	3	Mangan	mg/L	-
COD	mg/L	25	Klorida	mg/L	-
P	mg/L	0,2	Flourida	mg/L	-
pH		6 – 9	Sulfat	mg/L	-
DO	mg/L	>4	Belerang	mg/L	-
NO ₃	mg/L	10	NH ₃	mg/L	1
Nitrit	mg/L	-	Besi	mg/L	0,03

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.104 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2018-2020

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter yang Diuji																				
	BOD (mg/L)			COD (mg/L)			Fosfat (mg/L)			pH			DO (mg/L)			NO ₃ (mg/L)			Nitrit (mg/L)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sungai Teras	5,936	-	-	67,49	-	-	0,054	-	-	3,49	-	-	3,88	-	-	3,9	-	-	0,030	-	-
Sungai Mampu	5,589	6,25	-	64,69	69,08	-	0,096	0,358	-	3,38	3,72	-	4,34	4,77	-	3,3	2,4	-	0,023	0,022	-
Sungai Nerbit Kecil	6,927	7,19	-	73,11	82,31	-	0,055	0,347	-	3,12	3,72	-	4,54	4,73	-	3,2	2,5	-	0,034	0,032	-
Sungai Nerbit Besar	6,333	-	-	66,08	-	-	0,022	-	-	3,29	-	-	4,10	-	-	3,2	-	-	0,027	-	-
Sungai Rimbun Jaya	6,779	-	-	71,70	-	-	0,018	-	-	3,43	-	-	3,93	-	-	3,4	-	-	0,039	-	-
Sungai Parit Kitang	5,341	6,10	20,2	63,27	72,40	191,7	<0,010	0,179	0,2669	3,39	3,81	3,60	4,43	4,65	2,97	3,3	2,6	2,1	0,031	0,037	<0,017
Sungai Masjid	-	7,24	28,41	-	84,91	249,6	-	0,088	0,5103	-	6,73	4,26	-	3,53	2,48	-	1,1	2,1	-	0,013	0,0335
Sungai Dumai	4,796	6,54	17,48	60,46	77,71	133,8	0,033	0,082	0,1689	5,64	6,73	5,29	3,49	3,88	2,16	2,8	1,4	2,3	0,024	0,015	<0,017
Sungai Selinsing	5,936	5,25	-	63,27	57,92	-	<0,010	0,080	-	3,45	3,97	-	3,48	3,82	-	4,8	3,0	-	0,042	0,041	-
Sungai Kepala Beruang	4,548	6,20	-	60,46	74,30	-	0,025	0,041	-	3,52	3,83	-	4,81	4,17	-	4,8	3,3	-	0,047	0,040	-
Sungai Pelintung	5,391	-	-	63,27	-	-	<0,010	-	-	3,36	-	-	3,86	-	-	2,3	-	-	0,022	-	-
Sungai Guntung	5,292	5,70	26,51	60,45	66,57	248,3	<0,010	0,086	0,1195	3,29	3,65	3,70	4,12	4,19	2,60	3,8	2,9	3,7	0,039	0,053	0,0404
Sungai Kemeli (Muara)	5,887	-	-	66,08	-	-	<0,010	-	-	3,02	-	-	4,08	-	-	2,8	-	-	0,017	-	-
Sungai Puak	6,333	5,85	-	70,29	66,72	-	0,013	0,065	-	3,33	3,70	-	5,10	3,80	-	2,9	3,4	-	0,050	0,046	-
Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter yang Diuji																				
	NH ₃ (mg/L)			Besi (mg/L)			Mangan (mg/L)			Klorida (mg/L)			Flourida (mg/L)			Sulfat (mg/L)			Belerang (mg/L)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sungai Teras	0,885	<0,009	-	0,8776	1,892	-	0,0559	0,332	-	6,055	21,34	-	0,915	0,614	-	41,65	114,4	-	0,011	<0,010	-
Sungai Mampu	1,884	0,75	-	0,0606	0,622	-	0,0441	0,022	-	4,070	7,174	-	<0,181	2,765	-	35,45	32,66	-	0,012	0,011	-
Sungai Nerbit Kecil	1,024	0,64	-	12742	1,269	-	0,0952	0,029	-	164,5	204,2	-	<0,181	2,060	-	96,95	39,34	-	0,012	0,011	-
Sungai Nerbit Besar	0,0687	-	-	0,7379	-	-	0,0294	-	-	15,24	-	-	<0,181	-	-	39,02	-	-	0,012	-	-
Sungai Rimbun Jaya	0,964	-	-	0,9930	-	-	0,1524	-	-	512,2	-	-	<0,181	-	-	63,50	-	-	-	-	-
Sungai Parit Kitang	0,351	<0,009	0,12	0,6525	1,020	1,3928	0,0608	0,059	0,3397	74,79	808,9	5,06	<0,181	0,331	0,6049	24,81	171,0	0,0393	0,016	0,014	-
Sungai Masjid	-	1,53	0,27	-	0,419	0,0201	-	0,039	0,1054	-	9,628	3,45	-	1,276	0,9816	-	343,1	202,4	-	<0,010	-
Sungai Dumai	3,809	<0,009	0,30	0,7330	0,578	1,0188	0,0486	0,068	0,0339	38,07	1,203	3,48	<0,181	0,623	0,5506	3,602	288,0	0,0182	<0,010	<0,010	-
Sungai Selinsing	0,539	0,63	-	0,4242	1,348	-	0,0314	0,143	-	499,3	2,420	-	<0,181	2,466	-	37,57	356,4	-	0,039	0,014	-
Sungai Kepala Beruang	1,542	0,46	-	0,6420	0,725	-	0,324	0,020	-	264,64	1,320	-	<0,181	1,751	-	36,17	244,8	-	0,032	0,027	-
Sungai Pelintung	1,587	-	-	0,9036	-	-	0,1800	-	-	902,2	-	-	<0,181	-	-	29,06	-	-	<0,010	-	-
Sungai Guntung	1,565	0,52	0,29	1,0337	1,981	1,5162	0,0633	0,035	0,0684	5,807	166,8	<0,408	<0,181	1,147	0,2753	53,48	49,40	11,39	0,015	<0,010	-
Sungai Kemeli (Muara)	0,0531	-	-	0,8565	-	-	0,2080	-	-	8,820	-	-	<0,181	-	-	168,9	--	-	<0,010	-	-
Sungai Puak	0,576	1,08	-	1,0044	2,077	-	0,1417	0,038	-	46,26	169,7	-	<0,181	1,023	-	41,78	51,06	-	<0,010	0,014	-

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan untuk Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2012 hingga tahun 2020 (tanpa data tahun 2016) persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2012 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 61,52%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 92,44%.

Tabel 2.105 Kepemilikan KTP Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun							
	2012	2013	2014	2015*	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KTP	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	94,82%	96%	92,44%

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021)

2. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota

Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.106 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.106 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021)

3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai sejak tahun 2005.

Tabel 2.107 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021)

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu 2012-2020 terdapat 41 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 99%. Jumlah posyandu selama pada tahun 2020 adalah sebanyak 196. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2012-2020 adalah 100%. Sedangkan persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2020 adalah sebesar 100%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Satuan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241	196	196
Persentase Posyandu Aktif	%	98	98	99	100	100	100	100	100	100
Persentase LPM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90	90	100	-

Indikator	Satuan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	97	97	100	100

(Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, dari tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah peserta KB aktif terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 jumlah pesertanya turun menjadi 29.287 peserta dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali jumlah peserta KB aktif yaitu sebesar 35.912 peserta.

Tabel 2.109 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan peserta KB aktif	35.597	45.344	55.628	29.287	33.059	30.571	32.836	35.912

(Sumber: Dallap DPPKB Tahun s/d November Tahun 2021)

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.110.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;

- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.110 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Keluarga	55.051	55.051	55.051	63.527	78.809	82.478	82.478	54.982	54.982
Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	4.118	2.871	2.871	2.871	6.369	6.369
Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	11.138	4.503	4.503	4.503	30.071	30.071

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK Tahun 2021)

I. Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

1. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.111 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.111 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2014-2020

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TERMINAL	BERANGKAT	120.225	106.390	105.890	102.670	9.834	114.702	191.455
	DATANG	120.401	108.116	108.008	105.532	9.549	137.437	178.445
PELABUHAN	BERANGKAT	233.365	123.971	130.789	129.135	249.341	129.545	
	DATANG	211.070	103.876	100.342	102.586	214.347	110.471	
BANDARA	BERANGKAT	10.625		12.465	11.856	60.090	55.484	14.055
	DATANG	10.876		11.782	10.354	58.470	55.768	14.997
	TRANSIT	1.385						

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari Tabel 2.111 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2014 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut

(palabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun data (2014–2020) jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan (kapal) lebih besar apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	4.075	3395	9.334	2.794

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.112 Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya. Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat melaksanakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR), berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tanggal 04 Juni 2020 Nomor AJ/0052/1/DJPD/2020 Perihal Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengumuman Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai Nomor 551.23/DISHUB-PKB/60/2020 Tanggal 11 Juni 2020 tentang penutupan sementara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai, maka capaian indikator ini tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Tabel 2.113 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari tabel 2.113 diatas diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.114 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.114 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	10.020	8.473	9.344

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020)

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 29.000,-. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga saat ini (tahun 2020), berikut apabila ditunjukkan dengan Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rupiah) Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

7. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak menyebutkan sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan pada formula pemasangan rambu-rambu. Data yang didapatkan hanyalah data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n, dimana pada tahun 2020 terpasang rambu lalu lintas dengan persentase 78.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi

maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2020

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) - ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan) - SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal dan Informasi Daerah Binaan	- SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) - SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SiPERI) - SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) - OSS (Online Single Submission)	DPMPSTP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan) - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II	Administrasi dan Manajemen Umum		
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyerurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
II Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	lih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.118 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2011-2020 tiap tahunnya berfluktuatif sesuai Tabel 2.119 dibawah ini.

Tabel 2.119 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	71	55	83	83	54	81	82,71	84	85

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun 2021)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2020.

2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan.

Tabel 2.120 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Usaha Mikro dan Kecil	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672	14.874	16.134	17.076

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai Tahun)

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai sampai dengan Tahun 2020 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan 1 kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1 : 2.319. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.121 berikut:

Tabel 2.121 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pendamping UKM	7	7	8	7	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2021)

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2019 perkecamatan tersaji pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2017 - 2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dumai Barat	2.377	2.402	2.657	2.837	2.962
2	Dumai Timur	2.713	2.738	3.051	3.231	3.388
3	Bukit Kapur	1.683	1.708	2.002	2.182	2.228
4	Medang Kampai	1.118	1.143	1.476	1.656	1.800
5	Dumai Selatan	964	989	1.317	1.497	1.664
6	Dumai Kota	2.153	2.178	2.521	2.701	2.847
7	Sungai Sembilan	1.489	1.514	1.850	2.030	2.187
JUMLAH		12.47	12.497	12.672	16.234	17.076

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2017 - 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2017 terdapat 12.497 UMKM, dan pada tahun 2020 jumlah UMKM di kota dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 17.076 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2012-2020, jumlah investor PMDN dan PMA

menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perusahaan PMDN	47	53	57	60	63	64	24	42	55
Jumlah Perusahaan PMA	52	56	62	66	69	76	84	76	32

(Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2021)

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi PMA dan PMDN terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai PMA sebesar 323,45 juta USD dan nilai PMDN sebesar 1,15 triliun Rupiah. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.124. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2020 sebesar 12.961,30 triliun.

Tabel 2.124 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2013-2020

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PMDN (Milyar Rp)	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	2.007,20	371,29	2.237,45	7.117,11	
PMA (juta \$)	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12	122,02	246,66	405,85	
Nilai Ivestasi PMA dan PMDN									12.961,30

(Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2021)

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.704 orang. Realisasi investasi (PMDN/PMA) selama periode tahun 2020 secara keseluruhan meningkat 118,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.125. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2020 218,09% dan 57,95%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.125 Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Nilai Realisasi PMDN	~	1.936,75%	138,33%	-10,87%	37,92%	35,79%	-13,44%	-81,50%	502,62%	218,09%
Persentase Nilai Realisasi PMA	-59,86%	235,20%	1.648,12%	77,15%	-85,33%	217,02%	-26,31%	-31,61%	126,29%	57,95%

(Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Tahun 2021)

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.126 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	55	55	47	47	55

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2020 berjumlah 36 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.127 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi olahraga	25	25	29	29	29	29	29	29	36

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2012 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2020 berjumlah meningkat menjadi 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.128 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	3	2	1	2	2	2	3

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

Jumlah kegiatan pada tahun 2020 berjumlah 3 kegiatan salah satu tersebut adalah kegiatan pemebinaan paskibraka.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2012 adalah 8 kegiatan dan pada tahun 2020 berjumlah 1 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Tabel 2.129 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan olahraga	8	4	4	4	5	3	6	3	1

(Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2021)

5. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2020 berjumlah 2 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

N. Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dalam Angka” dan buku “PDRB Kota” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 tersedia keduanya.

Tabel 2.130 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2011-2020

Indikator	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

O. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2012 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 4 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2016 hanya tinggal 2 kegiatan saja. Tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai tahun 2019 menjadi 5 kegiatan, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 berjumlah 2 kegiatan disebabkan terjadinya wabah pandemic covid-19.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	1	2	2	2	5	5	5	2

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021)

P. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2019 relatif mengalami penambahan. Pada tahun 2012 jumlah perpustakaan adalah 12 unit, dan pada tahun 2020 jumlah perpustakaan naik menjadi 15. Berikut Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2020



Gambar 2.52 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2012-2020
(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2012 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,45 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,47, namun terus terjadi penurunan karena penambahan jumlah penduduk. Berikut Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.132 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan	12	16	15	15	15	15	15	15	15
Jumlah Penduduk per 10.000	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,33	31,68
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,45	0,58	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50	0,47

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, diolah)

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2012 hingga 2019 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.130. Namun pada tahun 2020 rasio jumlah pengunjung mengalami penurunan disebabkan wabah pandemic covid-19.

Tabel 2.133 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	9.555	12.846	15.704	23.985	24.902	28.242	29.370	37.643	9.032
Jumlah Penduduk per 10.000	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76	30,33	30,33	31,68
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	948,99	968,37	1.242,1	2.851

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



Gambar 2.53 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2014 memiliki tren perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2011 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 14.224 eksemplar, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 48.447 eksemplar seperti yang tersaji Pada Gambar 2.50. Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan buku, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan. Pada tahun 2019 jumlah buku menjadi 53.557 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 51.707 eksemplar.

Q. Kearsipan

Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2013	102
2014	1.006
2015	748
2016	1.590
2017	1.791
2018	1.824
2019	1.710
2020	-

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.3.3. FOKUS URUSAN LAYANAN PILIHAN

A. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.135. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di kota Dumai yaitu sebesar 122.627 orang.

Tabel 2.135 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan Wisata (org)	67.060	90.723	71.274	122.627	52.020	45.340	46.590	29.881	43.159

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021)

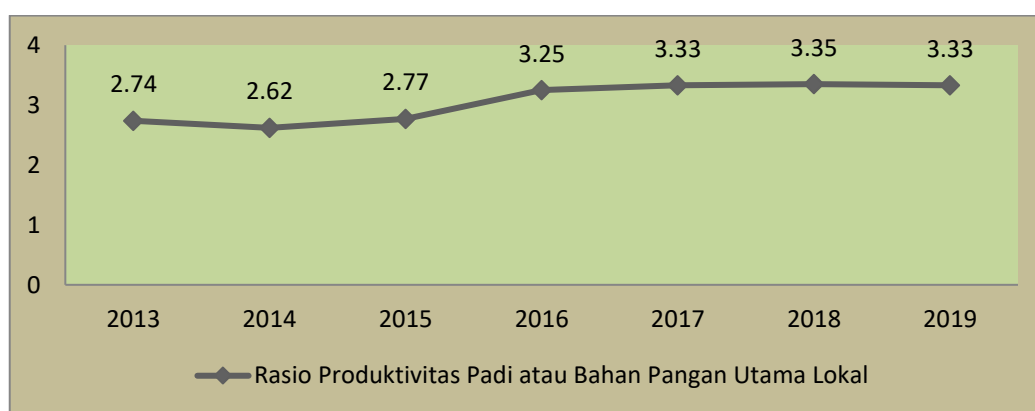
B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang

berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.54. Pada tahun 2018 produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai sebesar Rp.3,35 ton/ha, dan Untuk tahun 2019 produktivitas padi sebesar 3,33 ton/ha.



Gambar 2.54 Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2013-2019

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020)

Adapun jumlah kelompok tani perkecamatan pada saat ini adalah sebagai berikut Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Tabel 2.136 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok

No	Kecamatan	Jumlah kelompok tani (poktan)	Jumlah kelas kelompok				
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
1	Bukit Kapur	133	107	15	1	0	10
2	Dumai Barat	137	30	5	0	0	2
3	Dumai Kota	12	12	0	0	0	0
4	Dumai Selatan	38	33	4	0	0	1
5	Dumai Timur	35	26	1	0	0	8
6	Medang Kampai	40	30	8	0	0	2
7	Sungai Sembilan	143	96	35	0	0	12
Total		438	334	68	1	0	35

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti

pelatihan-pelatihan pertanian. Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017 tersaji pada table 2.137. Dari Tabel 2.137 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2017 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 52,8% dari seluruh kelompok tani yang ada.

Jumlah kelompok tani yang telah diberi bantuan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.137. Pada Tahun 2020 jumlah kelompok tani yang diberi bantuan sebanyak 173 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Tabel 2.137 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	130	33	33	88	140	173

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

2. Luas Areal Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di setiap kecamatan di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.138. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.138 Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Tanaman				
	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Pinang	Kakao
Bukit Kapur	12.991	1.251	84	15	2
Dumai Barat	116	-	214,5	14	2
Dumai Kota	-	-	-	-	-
Dumai Selatan	351,5	7	46	12	3,5
Dumai Timur	97,5	-	26	6	-
Medang Kampai	3.936,5	724	1456	12	4
Sungai Sembilan	21.169	472	976	78	16
Jumlah	38.661,5	2.454	1.491,5	137	27,5

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021)

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, pinang, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman

ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3. Populasi Ternak Unggulan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, jumlah ternak unggulan sampai tahun 2015 adalah sebanyak 5.235 satuan ternak. Jumlah ternak unggulan ini terus bertambah sampai tahun 2018 dengan jumlah berturut-turut 5.463 satuan ternak di tahun 2020 dan 6.778 satuan ternak.

Sedangkan untuk jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis, kondisi di tahun 2015 terdapat 35 kasus. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan target jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus. Pada tahun 2020 realisasi penurunan kasus hewan menular zoonosis menjadi 5 kasus

4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2011-2020 (%)

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,69	5,32	5,72

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Sektor pengalihan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 berdasarkan data dari BPS tahun 2019 sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai sebesar 0,35 dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,36 persen.

D. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.140 berikut ini.

Tabel 2.140 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020

NO	JENIS IKAN	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenggiri	222.000	17.100	30.300	40.300	69.811	7.728	40.413	36.372
2	Parang-parang	248.000	5.300	12.300	14.200	41.887	6.955	18.676	16.808
3	Senangin	171.000	15.900	24.000	17.700	-	8.500	12.537	11.283
4	Kakap hitam/putih	170.000	12.200	9.700	8.000	-	7.728	8.690	7.821
5	Gulama	218.000	20.600	12.400	-	-	-	2.223	2.001
7	Lomek	235.000	17.000	27.200	57.000	125.660	11.591	71.760	64.584
8	Biang	216.000	15.700	-	-	-	13.910	69.878	62.890
9	Pari	146.000	13.000	14.000	-	-	6.182	23.155	20.840
10	Bawal	163.000	13.000	13.210	4.400	52.498	7.728	3.364	3.028
11	Mayung	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Ikan lainnya	1.642.000	159.800	63.700	67.300	49.705	-	128.140	115.3236
13	Udang lainnya	5.781.000	376.600	43.000	151.100	223.489	494.444	272.042	244.838
JUMLAH		9.212.000	676.200	249.810	360.000	563.050	564.766	650.878	585.791

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2021)

Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Pada tahun 2013 produksi perikanan laut mencapai 9.212.000 Kg. Produksinya terus mengalami penurunan setiap tahunnya dan sampai tahun 2020 menjadi 585.791 Kg. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.55.



Gambar 2.55 Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai Tahun 2013-2020

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2021)

2. Produksi Perikanan Budidaya

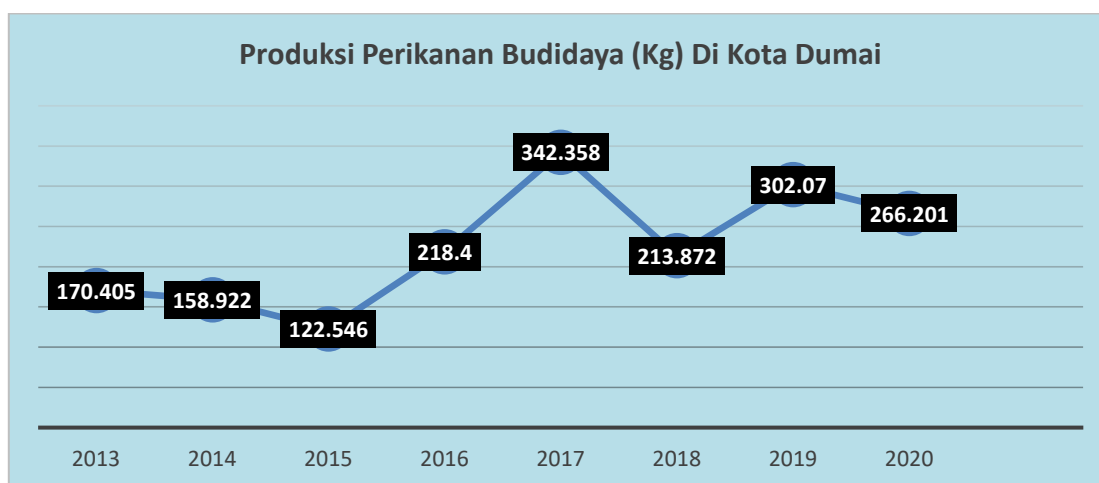
Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai. Berikut disajikan Tabel 2.141 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.141 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2013-2020

NO	JENIS IKAN	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ikan Mas	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ikan Nila	850	400	1.000	270	2.534	2.750	345	8.660
3	Gurami	1.350	-	-	1.360	942	1.478	318	273
4	Lele	138.297	128.522	111.160	197.110	314.456	177.330	275.500	143.714
5	Patin	18.848	8.000	-	10.300	7.430	9.470	7.760	2.942
6	Bawal	3.700	800	-	500	-	-	0	0
7	Bandeng	4.950	16.827	4.816	1.240	860	1.585	0	0
8	Kakap	-	-	-	-	-	-	0	0
9	Udang (windu/vaname)	2.410	4.373	5.570	7.620	16.136	21.259	18.147	110.612
JUMLAH		170.405	158.922	122.546	218.400	342.358	213.872	302.270	266.201

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2021)

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2013 sampai tahun 2020 mengalami naik-turun, seperti yang tersaji pada Gambar 2.56. Pada Tahun 2013 produksi perikanan budidaya mencapai 170.405 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2020 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 266.201 Kg.



Gambar 2.56 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai
(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Tahun 2021)

E. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Berikut tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020.

Tabel 2.142 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	16,42	15,87	14,48

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor ini mencapai USD 12.504.032.102,11 pada tahun 2018. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.143 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2011-2020

Uraian (USD 000)	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor	14,195,672,775	17,746,297,425	10.889.408.942	12.928.272.127,19	12 504 032 102,11	8 942 334 474,82	10.396.561.570,33
Impor	1,064,462,336	778,071,820	597.294.415	498.456.718,00	557 578 482,00	403 504 320,00	396.792.103,00
Ekspor Bersih Perdagangan	13.131.210.439	16.968.225.605	10.292.114.527	12.429.815.409,19	11.946.453.620,11	8 942 334 474,82	10 396 561 570,33

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

F. Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusinya pada PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam table 2.144 berikut ini.

Tabel 2.144 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Industri Pengolahan (%)	51,38	52,90	53,17	53,88	54,75	56,48	57,73	59,97

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut.

Tabel 2.145 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	3,78	6,19	2,92	5,71	5,34	7,25	7,17	3,01

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.146 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
I. INDUSTRI KERAJINAN				
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air mineral	Kel. Purnama
			Tempat Tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat Telur	Kel. Stdi
			Kain Songket	Kel. Laksamana
			Tepak Sirih	Kel. RIMBA SEKAMPUNG
			Tempat Buah	Kel. Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat Telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak Sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat Buah	

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
			Tempat Tisu	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat Tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat Bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat air mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas kaki	Kel. Mundam
			Hiasan Dinding	Kel. Purnama
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			hiasan Jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	Kel. Mundam
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastik tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintang
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaian Olah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintang
			Jas	Kel. Purnama
			Baju Kaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	
12	Kerajinan Batik	8	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	
13.	Kerajinan Rotan	2	Kursi, Meja, Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			DII	
II.	INDUSTRI PERCETAKAN DAN ADVERTISING			
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetakan	Kel. Teluk Binjai
				Kl. Rimbaskampung
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintang
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
	JUMLAH PENGRAJIN	192		

(Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pembedayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.3.4. FOKUS URUSAN PENUNJANG

B. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk menyusun RPJMD periode 2021-2026 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

C. Administrasi Pemerintahan

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Walikota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Walikota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2011-2017 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya

permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

D. Urusan Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2020

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				
	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020
Nilai	51,76	54,02	58,46	61,15	61,33
Predikat	CC	CC	CC	B	B

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil penilaian LPPD Kota Dumai tingkat Provinsi tahun 2019 adalah peringkat 5.

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap

tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2020 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 77,91%. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun dan 2020 adalah sebanyak 4 dokumen, dan pada tahun 2020 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 10 dokumen.

E. Urusan Keuangan

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2013 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD (Milyar Rp.)	153,22	162,54	182,35	265,47	279,65	291,59	378.74
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	59,24	64,44	71,85	94,99	127,96	141,14	165.26
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	(10,02)	8,78	11,50	22,95	25,77	9,33	14.59
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	25,67	15,22	29,44	35,86	30,68	31,10	35.67
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	(28,04)	(40,71)	93,46	41,93	(16.88)	1,35	12.81
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	29,34	29,23	33,67	50,42	74,44	82,25	88.12
Persentase Peningkatan PBB (%)	10,59	(0,39)	18,61	45,44	32,27	9,49	6.66
Belanja Daerah Kota Dumai (Milyar Rp.)	1.291,02	1.044,12	1.259,20	1.203,26	1.142,38	1.230,19	1.465.67
Belanja Pendidikan (Milyar Rp.)	338,19	382,06	381,54	370,73	228,48	380,27	361.82
Persentase Belanja Pendidikan (%)	26,20	36,59	30,30	32,46	25,86	30,91	23.80
Belanja Kesehatan (Milyar Rp.)	192,67	216,83	260,62	270,31	243,77	126,12	347.67
Persentase Belanja Kesehatan (%)	14,92	20,77	20,70	21,78	21,34	10,25	22.87

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dan BPKAD Kota Dumai Tahun 2020)

Dari Tabel 2.148 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2019 meningkat sebanyak 134,12% dari PAD tahun 2013. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2019 adalah sebesar 141,14 Milyar seperti yang tersaji pada Tabel 2.148. Pendapatan yang berasal dari pajak daerah selama periode 2014-2020 fluktuatif, pada tahun 2020 persentase pajak daerah sebesar 6,66% dari tahun sebelumnya sebesar 9,49%. Retribusi daerah tahun 2020 meningkat sebesar 35,67% dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 115 juta Rupiah, namun pada

tahun 2016 kinerjanya kian membaik karena terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar 18,61% dari tahun sebelumnya dan terus meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,66%.

Disisi lain, dari Tabel 2.148 diatas juga terlihat bahwa selama periode 2014-2020 lebih dari 25% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase belanja pendidikan sebesar 23,80%, dan persentase belanja kesehatan pada tahun 2020 sebesar 22,87%.

F. Urusan Kepegawaian

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar; (2) Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi; (3) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja; dan (4) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Untuk mengakses data/informasi kepegawaian secara cepat, lengkap dan benar maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai telah memiliki database Pegawai Negeri Sipil se-Kota Dumai yang akurat dan *up to date* dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Pasca disyahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi direvisi menjadi persentase pelanggaran disiplin; dan (2) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja direvisi menjadi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2012-2020 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2012-2020 tersaji pada Tabel 2.149 dan Tabel 2.150.

Tabel 2.149 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	6	18	12	6	6	12	2	1	4

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2021)

Tabel 2.150 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural									
- PIM II	5	-	-	2	-	-	2	15	-
- PIM III	40	11	2	5	2	-	15	11	-
- PIM IV	160	80	30	40	-	-	-	20	-

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2021)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2020 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun di tahun 2017 jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebanyak 4 orang.

Selama periode 2012-2020 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.150. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2020 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2012-2020 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.151 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pejabat Eselon II	25	24	29	24	24	21	31	29	25

(Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Berdasarkan data tahun 2017, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Dumai adalah sebesar Rp 1.189.815. Besaran pengeluaran untuk makanan dan non makanan terlihat seimbang. Pengeluaran untuk makanan mencapai Rp. 602.559, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 587.256. Berikut Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.152 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai

No	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan	
		Rupiah	%
1	Makanan	608 839	47,52
2	Bukan Makanan	672.279	52,48
	Jumlah	1.281.118	100,00

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018)

2.1.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.153 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

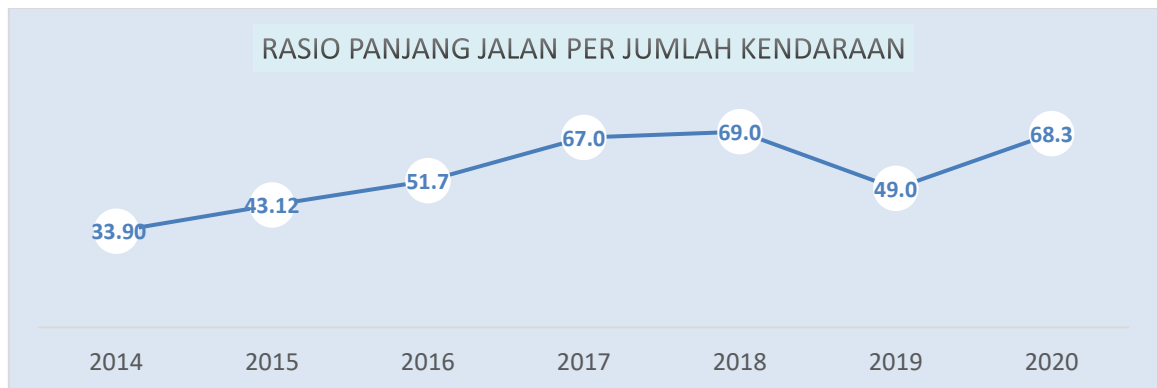
Tabel 2.153 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan (km)	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2	1.198,2
Jumlah kendaraan	61.135	64.111	61.900	80.242	82.649	58.861	81.835
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 67	1 : 69	1:49	1 : 68,30

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:33,9 di tahun 2014 menjadi 1:69 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang

harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk. Adapun jumlah kendaraan per panjang jalan selama tahun 2014-2020 tersaji pada Gambar 2.57.



Gambar 2.57 Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai Tahun 2014-2020

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 dan Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang.

Tabel 2.154 Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2016-2020

Prasarana Angkutan	ORANG/	JENIS	2016	2017	2018	2019	2020
	BARANG	PENUMPANG					
PELABUHAN	ORANG	BERANGKAT	235.200	102.670	9.834	249.341	
		DATANG	196.451	105.532	9.549	214.347	
	BARANG	MUAT	18.316.097	129.135	189.043	5.995.149	
		BONGKAR	3.687.960	102.586	176.261	2.470.972	
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	30.635	11.856	NA	60.090	14.055
		DATANG	30.858	10.354	NA	58.470	14.997
		TRANSIT	12	NA	NA	-	-
	BARANG	BONGKAR	64.663	NA	NA	5.787	-
		MUAT	71.713	NA	NA	6.948	-
	BAGASI	BONGKAR	161.956	NA	NA	347.572	65.886
		MUAT	171.458	NA	NA	328.676	64.213
	POS PAKET	BONGKAR	0	NA	NA	NA	-
MUAT		0	NA	NA	NA	-	
TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	NA	NA	NA	NA	191.455
		DATANG	NA	NA	NA	NA	178.445

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah barang yang dimuat/dibongkar melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mendominasi kegiatan pengangkutan di pelabuhan Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor-impor dilakukan melalui pelabuhan.

B. Penataan Ruang

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Luasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016. 7.716,98 Ha atau 15,2 % dari luas seluruh wilayah budidaya (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016). Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 195.386,2 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

1. Jumlah Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2011, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 21 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan 12 unit hotel. Berikut tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.155 Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2015-2020

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bintang satu	1	2	1	1	1	1
Bintang dua	2	-	3	3	3	3
Bintang tiga	2	2	2	2	2	2
Bintang empat	-	-	1	1	2	2
Akomodasi lainnya	22	24	28	28	28	28
Jumlah	27	28	35	35	35	35

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2.1.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 454. Kondisi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2014 menjadi 861. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas kota Dumai salah satunya diakibatkan karena kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas kota Dumai cenderung meningkat, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata diatas 50%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.156 berikut.

Tabel 2.156 Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kriminalitas	454	642	861	97*	474	665	650	594	411
% Diselesaikan	67,40	70,72	69,34	NA	NA	74,58	76,46	78,79	74,94

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021)

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 45 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 3 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Izin Lokasi	3 hari
2	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 hari
3	Izin Operasional Klinik	3 hari
4	Izin Optical	3 hari
5	Izin Apotik	3 hari
6	Izin Toko Obat	3 hari
7	Izin Operasional Laboratorium Klinik umum dan khusus	3 hari
8	Izin Praktek Terapi Wicara	3 hari
9	Izin Praktek Fisioterapis	3 hari
10	Izin Praktek Bidan	3 hari
11	Izin Dokter Dokter Spesialis	3 hari
12	Izin Dokter Umum	3 hari
13	Izin Dokter Gigi	3 hari
14	Izin Praktek Perawat Gigi	3 hari
15	Izin Praktek Refraksionis Optician	3 hari
16	Izin Pengobatan Tradisional	3 hari
17	Izin Depot Air Minum	3 hari
18	Izin Operasional Rumah Sakit	3 hari
19	Izin Praktek Perawat Mandiri	3 hari
20	Izin Praktek Tukang Gigi	3 hari
21	Izin Praktek Apoteker	3 hari
22	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 hari
23	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 hari
24	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	3 hari
25	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
26	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 hari
27	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 hari
28	Izin Usaha Industri (IUI)	3 hari
29	Izin Usaha Perkebunan	3 hari
30	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	3 hari
31	Izin Lingkungan	3 hari
32	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	3 hari
33	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3 hari
34	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3 hari
35	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	3 hari
36	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	3 hari
37	Izin Usaha Peternakan	3 hari
38	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan	3 hari
39	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	3 hari
40	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 hari
41	Izin Racun Api	3 hari
42	Izin Penyelenggaraan Reklame	3 hari
43	Izin Warung Internet	3 hari
44	Surat Izin Usaha Perikanan	3 hari
45	Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil	3 hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2012 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada table 2.158 berikut ini :

Tabel 2.158 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai

No	Jenis Izin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	934	698	-	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	1191	1010	1087	1029	1275	591	-	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	744	839	1038	878	1055	795	711	1	1
4	TDP PO	212	248	413	313	-	-	-	-	-
5	TDP CV	416	375	347	338	-	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	50	60	98	60	-	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	63	206	145	230	-	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	51	37	64	23	-	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	72	21	15	29	-	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt s/d 15 M)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	10	25
15	Izin Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	9	6
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Definitif	313	267	58	32	-	-	235	-	43
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-	-	306	208
18	Izin Praktek Dokter	87	-	-	-	-	-	74	-	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	-	74	-	-	-	-	-	0
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	-	-	-	-	-	30	17
22	Izin Penyelenggaraan Optical	2	2	6	5	-	1	1	6	1

23	Izin Apotek	8	-	9	5	-	13	6	13	9
24	Izin Toko Obat	13	13	9	10	1	11	9	10	3
25	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	5	6	6	9	-	-	8	-	-
27	Izin Klinik	-	-	-	-	-	-	-	7	12
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	1
29	Izin Rumah Bersalin	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	-	-	-	-	-	2	0
32	Izin Praktek Bidan	22	5	20	25	-	57	36	18	60
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (SIP-SW)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Izin Racun Api	115	289	496	515	477	262	154	-	-
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	-	-	-	-	-	104	73
39	Izin Minuman Beralkohol	-	11	1	17	-	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman Beralkohol Gol B dan C	-	-	-	-	-	-	-	5	1
41	Izin Reklame	4	18	74	56	-	26	60	42	0
42	Izin Penyelenggaraan Reklame	-	-	-	-	-	-	-	-	16
43	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	35	-	121	-	143	12	-	-
44	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	25	19
45	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	110	63
46	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	12	-	-	-	-	-
47	Izin Panti Pijat	-	-	-	3	-	-	-	-	-
48	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	410	226	80	364	296	166	211	140	168
49	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50	Izin Pendidikan Non Formal	9	-	-	4	-	-	-	-	-
51	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	-	-	-	-	-	4	4
52	Izin Pengambilan Air	-	3	-	-	-	-	-	-	-
53	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55	Sertifikat Laik Operasi	-	3	-	-	-	-	-	-	-
56	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	-	2	8	22	30	27	20	-	-
57	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-	-	-	-	7	10
58	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	1	-	-	-	-
59	Surat Penangkapan Ikan	20	5	-	-	-	-	-	-	-
60	Surat Izin Usaha Perikanan	6	5	-	-	-	-	-	-	0
61	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	-	-	-	-	-	9	-
62	SIUP Cabang	53	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	-	21	-	-	-	-
64	Izin Karoke	-	-	-	-	35	-	-	-	-
65	Izin Salon	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	Izin Permainan	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	37	17	28	-	-

68	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	1144	890	764	-	-
69	Izin Pendirian Sekolah Swasta	-	-	-	-	4	1	2	-	-
70	Izin Klinik Rawat Jalan	-	-	-	-	-	4	-	-	-
71	Izin Dokter Gigi	-	-	-	-	-	13	18	-	-
72	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	22	22
73	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	5	2
74	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	-	-	-	-	-	1	4
75	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	4	91
76	Izin Perawat	-	-	-	-	-	2	-	-	-
77	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	-	-	-	-	1	-	-	-
78	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	1	-	2	1
79	Izin Depot Air Isi Ulang	-	-	-	-	-	3	4	1	3
80	izin Praktek Tukang Gigi	-	-	-	-	-	10	-	15	0
81	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	5	-	-	-
82	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	12	25	21	26
83	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	-	-	-	-	6	9	2	0
84	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	0
85	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	-	-	-	-	-	4	0	0	0
86	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	211	283	-	-
87	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	85	51	43
88	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	24	-	-
89	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	-	-	-	-	-	7	49
90	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	-	-	-	-	-	47	59
91	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	-	-	-	-	-	0	0
92	Izin Praktik Refraksionis Kefarmasian									3
93	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)									21
94	Izin Warung Internet									3
95	Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Orang									0
96	Izin Penyelenggara Angkutan Penumpang Umum									0
97	Izin Penyelenggara Angkutan Barang									0
98	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan									0
99	Izin Pembuangan Limbah Cair									0
100	Izin Operasional Rumah Sakit									2
101	Izin Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga									1
102	Izin Mendirikan Rumah Sakit									0
103	Izin Usaha Peternakan									0
104	Izin Usaha Perkebunan									0
105	Izin Perluasan Usaha Industri									0

106	Izin Lembaga Pelatihan Kerja									0
107	Izin Usaha Kawasan Industri									0
108	Izin Perluasan Kawasan Industri									0
109	Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan (TDPI)									0
110	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)									0
111	Izin Usaha kecil Dan Mikro Obat Tradisional									0
112	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus									0
113	Izin Usaha Industri									0
114	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-PA)									0
115	Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)									1
JUMLAH		4801	4386	4048	4100	4378	3273	2779	1038	1071

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020)

Target dari indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu 76 dan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sampai tahun 2019 yaitu 83,82 atau sebesar 107,46% Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, Kegiatan Sosialisasi pelayanan terpadu, Kegiatan Peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Kegiatan Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan, Kegiatan Survey penerbitan perizinan.

Tabel 2.159 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (dalam %)
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 6.022.113.766.368,-	Rp. 12.961.297.980.000,-	215,23
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	83,82	100,11

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021)

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

Tabel 2.160 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Dumai tahun 2020

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
A	PAJAK DAERAH	157.754.501.000,00	165.305.499.127,00	104,79%
-	Pajak Hotel	2.600.000.000,00	3.760.131.872,00	144,62%
-	Pajak Restoran	6.100.000.000,00	7.247.204.044,00	118,81%
-	Pajak Hiburan	800.000.000,00	840.675.189,00	105,08%
-	Pajak Reklame	1.850.000.000,00	2.335.416.443,00	126,24%
-	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.999.986.000,00	8.595.310.760,00	107,44%
-	Pajak Penerangan Jalan PLN	30.259.315.000,00	31.075.579.768,00	102,70%
-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.225.000.000,00	2.550.555.480,00	114,63%
-	Pajak Parkir	500.000.000,00	556.831.948,00	111,37%
-	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.187.986.946,00	118,80%
-	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	69.851.660,00	60,64%
-	PBB	90.000.000.000,00	91.404.616.934,00	101,56%
-	BPHTB	14.305.000.000,00	15.635.643.803,00	109,30%
B	RETRIBUSI DAERAH	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94
-	Retribusi Pelayanan Pasar	429.500.000,00	436.133.000,00	101,54%
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTP	175.000.000,00	187.377.000,00	107,07%
-	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	130.000.000,00	131.250.000,00	100,96%
-	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%
	~ Sewa Mess (Kamar Standar AC)	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.100.000,00	666.100.000,00	133,19%
-	Retribusi Jasa Umum	2.412.195.960,00	377.016.650,00	15,63%
	- Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.656.771.360,00	130.220.000,00	7,86%
	- Retribusi Uji Emisi gas Buang (Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Mobil Pribadi)	200.000.000,00	-	0,00%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	1.740.100,00	6,44%

	(Mobil Penumpang- Umum)			
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Barang dan Bus)	523.144.600,00	237.582.200,00	45,41%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Kereta Gandengan/Tempelan)	3.080.000,00	1.474.350,00	47,87%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Kendaraan Khusus)	2.200.000,00	-	0,00%
	- Kantin PKB		6.000.000,00	
-	Retribusi Jasa Usaha	24.439.600.000,00	18.412.672.050,00	75,34%
-	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	23.789.600.000,00	18.327.305.000,00	77,04%
	- Terminal Barang	23.735.600.000,00	18.245.643.000,00	76,87%
	- Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang	54.000.000,00	81.662.000,00	151,23%
-	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	450.000.000,00	26.658.000,00	5,92%
	- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	350.000.000,00	8.000.000,00	2,29%
	- Ramayana	50.000.000,00	16.126.000,00	32,25%
	- Bukit Gelanggang (Dumai Ekspo, Konser, dll)	50.000.000,00	2.532.000,00	5,06%
-	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35%
	- Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran)	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35%
-	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	40.000,00	2,00%
	- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	2.000.000,00	40.000,00	2,00%
-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62%
	- Bibit Ikan, Benih Ikan	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62%
-	Ret. Perizinan Tertentu	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	102,73%
	- Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11.500.000.000,00	11.819.726.000,00	102,78%
	- Ret. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	5.000.000,00	50,25%
-	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.	24.480.000,00	18.420.000,00	75,25%
-	Retribusi Menara Telekomunikasi	177.500.000,00	501.800.000,00	282,70%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021)

2.1.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

A. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing

daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 702 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 564. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2012-2020

Indikator	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan S1/S2/S3	702	817	678	725	705	496	564	692	681
Jumlah Penduduk	271.523	280.027	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%	0,18%	0,22%	0,21%

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021, Diolah)

2. Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,49, yang artinya

setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 0,49 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda penduduk tua. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 rasio ketergantungan sebesar 0,49. Dengan kata lain penduduk usia kerja di Kota Dumai masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Rasio ketergantungan di Kota Dumai sebesar 0,49 pada tahun 2019, rasio ketergantungan kota Dumai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung menurun.

3. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut tabel 2.162 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai.

Tabel 2.162 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai
Tahun 2014-2020

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang bekerja	114.066	117.280	123.550	127.897	129.421	134.581
Jumlah angkatan kerja	125.545	132.113	135.684	136.112	137.636	146.586
Rasio penduduk yang bekerja	0,909	0,888	0,911	0,940	0,940	0,918

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas, pada rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai berfluktuatif diatas 0,904. pada tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,918 tahun 2020 (tanpa data tahun 2016). Berikut tabel 2.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai.

Tabel 2.163 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	1,91	4,64	3,33	5,21	5,61	3,91	>
1.1.1.2	Laju inflasi	2,63	3,98	4,78	1,84	1,28	0,74	>
1.1.1.3	PDRB per kapita	71,74 juta	73,55 juta	101,82 juta	108.787,11	117.198,81	24.595.613,77	>
1.1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16	>
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	99,43	99,43	99,43	99,46	99,46		=
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,56	9,57	9,58	9,84	9,85		>
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	107,27	107,20	107,79	100	105,0	108,86	>
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	89,67	91,58	100,18	78,89	80,07	88,66	>
1.2.1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	73,45	78,36	87,97	86,19	103,69	103,30	>
1.2.1.6	APM SD	98,45	96,37	96,54	99,46	108,33	99,00	>
1.2.1.7	APM SMP	83,60	76,99	88,53	87,66	89,16	84,19	<
1.2.1.8	APM SMA	70,41	57,67	69,15	70,35	103,69	71,14	>
1.3.	Kesehatan							
1.3.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	13,08	14,10	13,73	7,2	7,2	7,3	>
1.3.2	Angka Kematian Balita	15,87	16,64	16,88	9,22	9,22	8,8	>
1.3.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	114,29	145,75	109,32	124,55	124,55	0,003	<
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai	70,05	70,25	70,31	70,55	70,82		=
1.3.5	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai	0	0,01	0,01	0,017	0,01	0,01	=
1.3.6	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida				1,13 %			
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	107	106	108	107	107	108	>
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	54	53	55	56	55	55	=
2.1.1.1.3	Rasio Guru/Murid SD	16,49	16,84	17,47	17,77	18,33	16,71	>
2.1.1.1.4	Rasio Guru/Murid SMP	9,43	12,74	14,54	14,16	19	9,30	<
2.1.1.1.5	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	94,22	95,40	95,30	41,99	44,27	47,78	>
2.1.1.1.6	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	89,35	90,05	89,80	24,74	44,78	36,22	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.1.1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,26	0,00	0,003	0,013	0,00		>
2.1.1.1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,40	0,00	0,049	0,025	0,00		=
2.1.1.1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.1.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,94	100,00	99,96	99,98	100,00	100,00	=
2.1.1.1.11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,24	84,76	83,80	97,38	87,73		>
2.1.1.1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	79,81	108,20	110,58				<
2.1.1.1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	79,40	85,58	86,22	90,20	86,91		>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009	=
2.1.2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	0,436	0,451	0,480	0,474	0,567	0,608	>
2.1.2.3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2.877	3.763	3.707	3.999	3.870	5,00	>
2.1.2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,2	90,57	86,23	95,4	95,4	94,9	<
2.1.2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,58	91,83	93,2	95,4	95,4	94,9	<
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	96,67	100	100	27,6	<
2.1.2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	72,11	56,02	23,97	32,25	32,25	66,6	>
2.1.2.8	Cakupan kunjungan bayi	95,58	91,83	85,3	99,9	99,9	81,1	<
2.1.2.9	Rasio puskesmas	3,50	3,43	3,36	3,30	3,24	3,18	=
2.1.2.10	Rasio puskesmas pembantu	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	=
2.1.3	Pekerjaan Umum							
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	52,97%	55,57%	53,33%	37,45	37,45	36,47	>
2.1.3.2	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,83	1,86	1,84	1,88	1,92	1,86	>
2.1.3.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	14 TPS	20 TPS	20 TPS	22 TPS	>
2.1.3.4	Panjang jalan dilalui roda 4	3,41	2,89	2,19	4,03	4,03	4,41	>
2.1.4	Perumahan							
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	1384	1386	1387	1387	1387		<
2.1.4.2	Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	1386	1387	1389	891	891	672	=
2.1.4.3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	85,35	89,75	93,77	88,46	88,46	106,53	>
2.1.5	Penataan Ruang							
2.1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103	5.044	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.6	Perhubungan							
2.1.6.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal							
	BERANGKAT	120.225	106.390	105.890	114.702	114.702	191.455	>
	DATANG	120.401	108.116	108.008	137.437	137.437	178.445	>
2.1.6.2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan							
	BERANGKAT	123.971	130.789	129.135	129.545	129.545	74.023	>
	DATANG	103.876	100.342	102.586	110.471	110.471	64.642	>
	Rasio izin trayek				1 : 20.142			
	Persentase Layanan angkutan Darat				0.0068%			
2.1.6.3.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara							
	BERANGKAT	NA	12.465	11.856	55.484	55.484	14.055	<
	DATANG	NA	11.782	10.354	55.768	55.768	14.997	<
	TRANSIT	NA	NA	NA	NA			>
2.1.6.4.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.762	5.103	4.078	9,344	9,334	2.794	<
2.1.6.5.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.523	10.206	9.920	9.344	9.344	9.700	>
2.1.6.6.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	=
2.1.6.7.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	=
2.1.7	Lingkungan Hidup							
2.1.7.1.	Persentase penanganan sampah	69	69	70	56	56	71	>
2.1.7.2.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)	>
2.1.8	Kependudukan dan catatan Sipil							
2.1.8.1.	Kepemilikan KTP	47,95%	94,27%	94,27%	96,00%	96%	92,44%	>
2.1.8.2.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.8.3.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.9.1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	3.046	3.974	5.273	5.273	5.432	>
2.1.9.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	1.378	3.857	10.442	45.315	45.315	54.915	>
2.1.10	Keluarga Berencana							
2.1.10.1.	Cakupan peserta KB aktif	45.344	55.628	29.287	30 571	30 571	35.912	>
2.1.10.2.	Jumlah Keluarga	55.051	55.051	63.527	54.982	54.982	54.982	>
2.1.10.3.	Keluarga Pra Sejahtera	4.118	4.118	4.118	6.369	6.369	6.369	>
2.1.10.4.	Keluarga Sejahtera I	11.138	11.138	11.138	30.071	30.071	30.071	>
2.1.11	Ketenagakerjaan							
2.1.11.1.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Dumai	122.951	129.027	135.405	135.684	137.636	134.581	>
2.1.11.2.	Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	1098	1308	315	1020	1020		<
2.1.11.3.	Jumlah Pengangguran Terbuka	4,552	5,218	5,167	8,215	9,723	12.005	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.11.4.	Keselamatan dan Perlindungan	195	151	165	-			<
2.1.11.5.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	19	39	12	36	36	38	>
2.1.12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.12.1.	Persentase Koperasi Aktif	83	54	81	84	84	85	>
2.1.12.2.	Usaha Mikro dan Kecil	11.797	11.797	12.497	16.134	16.134	17.076	>
2.1.13	Penanaman Modal							
2.1.13.1.	Jumlah Perusahaan PMDN	57	60	63	42	42	55	>
2.1.13.2.	Jumlah Perusahaan PMA	66	69	76	76	76	32	>
2.1.13.3.	Nilai Investasi PMDN (Rp)	1.151,99	7.883,71	2.318,98	5.937,39	5.937,39	7.117,11	>
2.1.13.4.	Nilai Investasi PMA (\$)	323,45	977,36	236,92	132,12	246,66	405,85	>
2.1.13.5.	Persentase Nilai Realisasi PMDN	0,11%	0,74%	102,21%	100,57	502,6	218,09	<
2.1.13.6.	Persentase Nilai Realisasi PMA	9,60%	0,45%	1,27%		126,29	57,95	>
2.1.14	Kebudayaan							
2.1.14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	2	5	5	2	<
2.1.15	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.15.1.	Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	47	47	55	>
2.1.15.2.	Jumlah organisasi olahraga	25	29	29	29	29	36	>
2.1.15.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	3	2	2	2	3	=
2.1.15.4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	4	3	3	1	=
2.1.16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.16.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	25	23	29	8	8	20	>
2.1.16.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	-	1 Keg.	1 Keg.	-	-	=
2.1.16.3.	Rasio jumlah pamong praja	3,25	3,07	3,21	2,96	2,96	3,24	>
2.1.16.4.	Rasio linmas	56,78	56,87	57,08	55,40	55,40		>
2.1.16.5.	Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	6,13	<
2.1.16.6.	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	90%	95%	96%	90%	90%	83,3%	>
2.1.16.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	236	235	238	166	166	704	>
2.1.16.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1590	1593	1599	1.590	1590		>
2.1.17	Ketahanan Pangan							
2.1.17.1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	26,50 %	41,36 %	35,54 %	15,18 %	34,85%		<
2.1.18	Statistik							
2.1.18.1.	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.18.2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.19	Perpustakaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.19.1.	Jumlah perpustakaan	12	16	15	15	15	15	=
	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,46	0,46	0,46	0,50	0,50	0,47	=
	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	560,64	838,64	853,10	1.242,11	1.242,11	2.851	>
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	57206	57206	57206	53.557	53.557	13.403	<
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Rasio produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Ha)*	2,62	2,77	3,25	3,33	3,33		>
2.2.1.2	ribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	6,08	6,10	6,04	5,96	5,96	5,72	<
2.2.2	Kelautan dan Perikanan							
2.2.2.1	Produksi Perikanan Laut (Kg)	676.100	236.300	525.000	571.720	650.878	585.791	<
2.2.2.2	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	156.238	190.221	218.400	256.643	256.643	266.201	>
2.2.3	Pariwisata							
2.2.4.1.	Kunjungan Wisata (org)	71.274	52.020	45.340	46.590	94.110	43.159	<
2.2.4	Perdagangan							
2.2.6.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	19,42	18,45	17,89	16,42	16,42	14,48	<
2.2.6.2.	Ekspor (\$)	17.746.297,425	10.889.408.942	16.485.319,670	7.907.814.272	12.504.032.102,11	10.396.561.570,33	<
2.2.6.3.	Impor (\$)	778.071,820	597.294.415	1.175.177,629	498.456.718,00	557.578.482,00	396.792.103,00	<
2.2.6.4.	Bersih Perdagangan (\$)	16.968.225,605	10.292.114,527	15.310.142,041	12.429.815,409,19	11.946.453,620,11		>
2.2.5	Perindustrian							
2.2.7.1.	ontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	52,90	53,17	53,88	80,79	56,48	59,97	>
2.2.7.2.	e Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	6,19	2,69	6,28	17,33	7,25	3,01	<
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per Jmlh Kendaraan	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 49	1 : 49	1 : 68,30	<
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk	0,006	0,005	0,004	0,004	0,004	0,003	>
3.2	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1	Jumlah Penginapan/Hotel	23	28	27	35	35	35	=
3.3.2	Angka kriminalitas	861	97*	474	660	594	411	<
3.3.3	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,24%	0,25%	0,24%	0,18%	0,18%	0,21%	<
3.3.4	Rasio penduduk yang bekerja	0,909	0,888	0,911	0,940	0,940	0,918	<

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-4

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai tahun 2020 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Evaluasi capaian kinerja tahun 2020 merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2020. Tujuan evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2020 adalah untuk menilai/mengidentifikasi pencapaian kinerja serta pencapaian indikator sasaran perubahan RPJMD tahun 2016-2021 terhadap capaian perencanaan pada akhir dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Berikut penjelasan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran pada tahun 2020 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2020 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2020 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
 - a. Dalam pelaksanaan Capaian Target Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan Program dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD pada pencapaian Target Evaluasi RKPD, sehingga perlu dipandang untuk merevisi guna penyesuaian kembali Indikator dan Target sasaran sesuai dengan pelaksanaan tahun perencanaan kedepan dan target akhir yang dicapai pada RPJMD Tahun 2016-2021;

- b. Untuk capaian tahun perencanaan 2020, Sasaran fokus yang sifatnya prioritas pembangunan (Program) yang belum tercapai namun memerlukan kerja keras yang perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan pelaksanaan pada tahun perencanaan kedepannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

Untuk mengetahui implikasi dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Sasaran dibawah ini

Tabel 2.164 Pencapaian Kinerja Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
Visi Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021					
Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	66,01	90,39	9,61
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	113,93	96,46	3,54
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	100,00	99,70	0,30
Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing				
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	100,00	97,85	2,15
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	76,20	95,68	4,32
	Sasaran 3. 1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	82,73	91,23	8,77
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	74,39	91,26	8,74
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	0,00	99,79	0,21

No.	Tujuan/Sasaran		% Pencapaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
Misi 3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan				
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	105,96	33,26	66,74
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	128,51	86,21	13,79
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	95,17	97,69	2,31
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	89,62	96,25	3,75
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan				
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	100,00	91,10	8,90
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,00	90,03	9,97
Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan				
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	112,43	97,49	2,51
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	99,20	97,82	2,18
Misi 6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah				
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	88,60	90,24	9,76
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	215,23	98,13	1,87
Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu				
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	100,00	99,94	0,06
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	100,00	92,32	7,68

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai)

- a. Jika capaian target sesuai dengan capaian maka proses dalam Perencanaan Smart serta memudahkan kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait visi dan misi yang akan dicapai di akhir masa jabatan kepala daerah. Dari tabel diatas , capaian sasaran kinerja 90%-100% sebanyak 14 sasaran dari 20 sasaran
- b. Jika Tidak maka target kinerja program akan berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang akan dicapai sehingga pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan (Inkonsistensi).

Dari tabel diatas sasaran yang belum mencapai target sasaran dan masih dibawah 80% sebanyak 2 sasaran, yaitu sasaran Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan capaian 0%, dan sasaran Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan capaian sebesar 215,23%.

Dapat dilihat efisiensi penggunaan sumberdaya yang besar yaitu pada :

- 1) Sasaran 1.2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan dengan penghematan 3,54% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 113,93%.
 - 2) Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan penghematan sebesar 66,74% dengan capaian kinerja 105,96%.
 - 2) Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin dengan penghematan sebesar 13,79% dengan capaian kinerja 128,51%.
 - 4) Sasaran 7.1 Meningkatnya pendapatan petani dengan penghematan 2,51% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 112,43%.
 - 5) Sasaran 8.2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan penghematan 1,87%.
1. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Bagi sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan melalui penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi ditiap OPD kemudian beberapa indikator program perlu menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kedepannya;
 - b. Meningkatkan komitmen OPD untuk melaksanakan sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran untuk menjaga konsistensi tersebut.

Untuk tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020, dan realisasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 akan disajikan pada **lampiran 1 dokumen RKPD Tahun 2022**.

2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Membandingkan Capaian kinerja antara kinerja Pemerintah Kota Dumai dengan Provinsi Riau dan Nasional.

Tabel 2.165 Sandingan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional)

No.	Indikator	Target Kota	Capaian Kota	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan ekonomi	4,42	-1,05%	-1,12%	-2,07
2	PDRB perkapita	107.894	24.595.613	490.000.00	15 434 151
3	Tingkat Pengangguran terbuka	8,40%	8,19%	6,32	6,10
4	Indeks Gini	0,40	0,36	0,33	0,38
5	Tingkat kemiskinan	<4,5%	3,16%	8,82	5,60
6	IPM	73,96	74,06	72,71	71,92

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2021)

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa indikator Pertumbuhan ekonomi pada kota Dumai melebihi capaian provinsi Riau dan dibawah capaian Nasional. PDRB Perkapita kota dumai dibawah capaian provinsi Riau dan diatas Nasional. Indikator indkes gini kota dumai dan provinsi Riau serta nasional masih termasuk katergori sedang (dimana range kategori sedang antara 0,35 -0,5). Indikator tingkat kemiskinan kota dumai masih lebih baik dari provinsi Riau dan Nasional. untuk indikator IPM kota dumai lebih tinggi dari provinsi Riau dan Nasional. indikator Tingkat pengangguran terbuka kota dumai masih lebih rendah dari provinsi Riau dan Nasional.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan perioritas pembangunan;
- c. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- d. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
- e. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;
- f. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
- g. Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
- h. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
- i. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
- j. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;

a. Aspek Geografi dan Demografi

- 1) Kota Dumai Masih Dihadapkan dengan kondisi wilayah rawan bencana terutama asap yang menjadi agenda rutin walaupun sanksi tegas telah ditetapkan namun kondisi ini masih saja terjadi.
- 2) Genangan Air baik yang bersifat curah hujan maupun kondisi pasang laut yang masih terdapat di beberapa titik di kota Dumai.
- 3) Ketimpangan kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di tiga kecamatan Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.
- 4) Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Infrastruktur Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan wilayah perkotaan karena memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi fungsi dan pelayanan kota kepada masyarakat baik dari segi fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kota Dumai sehubungan dengan kualitas dan jumlah pelayanan infrastruktur yang tersedia dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air minum yang merata dan berkeadilan;
- 2) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pemukiman penduduk (sanitasi, persampahan dan drainase);
- 4) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- 5) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;
- 6) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- 7) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul dari Transportasi Daerah;
- 8) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);
- 9) Sistem transportasi wilayah yang kurang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- 10) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal;
- 11) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sektor transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- 12) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;

- 13) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- 14) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang terutama wilayah di pinggiran;
- 15) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak;
- 16) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem paritispatif untuk prinsip 3R;
- 17) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- 18) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- 19) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air limbah, dan persampahan.
- 20) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif dikarenakan penggunaan lahan oleh masyarakat Kota Dumai untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya.

c. Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan isu yang berkembang secara internasional pada dasawarsa terakhir ini. Demikian pula di Indonesia dengan proses demokratisasi yang berjalan pesat, tuntutan untuk mewujudkan *good governance* menjadi komoditas penilaian masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan .

Untuk menuju pemerintahan Kota Dumai yang memenuhi sistim nilai yang berkembang tersebut sudah dilakukan berbagai upaya yang relevan, misalnya pembentukan LPSE, penyusunan berbagai dokumen akuntabilitas (LPPD, ILPPD, LAKIP, dsb), serta peningkatan SDM dan penyelenggaraan berbagai forum demokratisasi. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan lagi

dalam artian belum mencukupi untuk mencapai tataran pemerintahan yang diharapkan masyarakat terutama yang secara paripurna berlandaskan ciri pemerintahan yang baik. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat.
2. Ego sektoral yang masih muncul pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menghambat sinergitas dan efektivitas pembangunan daerah.
3. Belum terwujudnya manajemen dalam penerapan aplikasi yang berbasis kinerja.
4. Struktur organisasi pada Pemerintah Daerah yang belum proporsional, sistem manajemen pekerjaan, tanggungjawab dan beban kerja.
5. Belum terwujudnya E-Government yang transparansi dalam segala lini terkait informasi dan data ke publik serta Pelaksanaan pelayanan publik yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat hal ini ditandai dengan proporsi IKM dari 71,04% tahun 2015 dan 72 % pada tahun 2016.

d. Aspek daya Saing Daerah

1. Bidang Tenaga Kerja

Salah satu pengaruh perkembangan sebuah kota adalah peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Menurut perkiraan BPS, Indonesia akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030. Bonus Demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia non produktif. Kondisi ini akan menjadi masalah dan berujung pada meningkatkan pengangguran terbuka jika tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah ataupun swasta.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, kota Dumai pada tahun 2018 memiliki angkatan kerja usia produktif yaitu 127.897 jiwa dan tingkat pengangguran 8.215 jiwa dengan tingkat pengangguran 6,04%. Hal ini

mengindikasikan bahwa kota Dumai sedang menuju proses bonus demografi dan jika tidak diantisipasi dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat, maka jumlah pengangguran kota Dumai kemungkinan akan sulit untuk dikurangi.

Hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah kondisi pasar kerja yang dibutuhkan sudah mengarah pada jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu. Hal ini mengakibatkan pasar kerja yang terserap hanyalah dari angkatan kerja yang sudah memenuhi kriteria dari segi jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu yaitu angkatan kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan dari pasar kerja yang tersedia tersebut.

Bertambahnya lapangan pekerjaan baru yang ada di Kota Dumai, nyatanya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap terserapnya angkatan kerja lokal dari peluang ketersediaan lapangan kerja baru tersebut. Kemampuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan dari peluang lapangan kerja tersebut nyatanya belum mampu dipenuhi dari angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai. Hal ini menyebabkan peluang pengisian lapangan kerja baru tersebut dipenuhi oleh angkatan kerja yang berasal dari luar Kota Dumai yang memenuhi kualifikasi kerja serta memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang memenuhi kriteria pasar kerja tersebut, sehingga peluang pemenuhan pasar kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh angkatan kerja yang tersedia di Kota Dumai.

Namun, perlu dicatat bahwa untuk mendukung perkembangan Kota Dumai yang cukup pesat sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan diperlukan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di sekitarnya. Penduduk kota ini diharapkan dapat menjadi tenaga kerja berkualitas. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan ketrampilan dan penguasaan teknologi. Melalui penguasaan teknologi serta ketrampilan yang memadai diharapkan penduduk kota ini dapat mengambil peluang dan manfaat dari Kota Dumai yang akan semakin berkembang pesat terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain itu dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kota Dumai diarahkan sebagai pelabuhan barang bagi daratan daerah belakangnya (*hinterland*) yang terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera yang menghubungkan berbagai Pusat Ekonomi

Nasional bahkan dapat terhubung hingga ke Pulau Jawa. Kota Dumai memiliki fungsi dan peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut *hinterland* lainnya, termasuk Pekanbaru. Tantangan yang datang dari pesatnya perkembangan lapangan kerja dikota Dumai adalah datangnya pekerja migran yang secara langsung menjadi saingan tenaga kerja asal dumai untuk berkompetisi dalam merebut lapangan pekerjaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja di Kota Dumai adalah Kemampuan dan Keterampilan Angkatan Kerja belum kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Pasar Kerja. Sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Dumai harus mampu mempersiapkan angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai agar memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada maupun yang akan tersedia.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja melalui pelatihan padat karya.
2. Belum meratanya komposisi tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan.
3. Kurangnya rekrutmen tenaga kerja melalui bursa-bursa pekerjaan.
4. Perlunya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal ini terkait dengan penyesuaian UMK tenaga kerja.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

2. Bidang Ekonomi dan Iklim Berinvestasi

Pembangunan dibidang ekonomi kota Dumai secara umum dapat dilihat dari pencapaian kontribusi setiap sektor usaha pada PDRB, pergerakan inflasi, tingkat kemiskinan dan investasi modal dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Dumai di Bidang Ekonomi :

1. Masih Rendahnya kontribusi Sektor pertanian (5 sub sektor) dalam perekonomian sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang tersebut.

2. Inflasi kota Dumai masih bersifat “*fully driven by issues*” sehingga harga masih mudah berfluktuasi akibatnya sangat mudah terjadi inflasi meskipun masih dalam tingkat yang wajar.
3. Perlunya optimalisasi strategi pengurangan tingkat kemiskinan di kota Dumai.
4. Adanya kecenderungan berkurangnya investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga berpengaruh terhadap peluang kerja yang ada di Kota Dumai.
5. Memudahkan proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.
6. Perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan dalam rangka mempermudah akses permodalan UMKM dan penyerapan tenaga kerja local.

3. Bidang Sosial Budaya

Sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Khususnya saat ini, ketika setiap wilayah dihadapkan pada persaingan global, SDM memiliki peran kunci dalam pengembangan sebuah wilayah. Dalam era persaingan global diperlukan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu potensi untuk pengembangan wilayah kota ini. Angka melek huruf pada tahun 2018 berkisar pada angka 99,46%, bahkan selama empat tahun terakhir angka melek huruf mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh penduduk Kota Dumai sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jika seluruh penduduk sudah melek huruf akan lebih mudah untuk menerima pengetahuan, inovasi maupun teknologi baru yang berkembang cepat di era globalisasi ini. Pengetahuan merupakan kunci keberhasilan atau kemajuan manusia. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baru akan memudahkan dan mempercepat perkembangan bagi sebuah wilayah, oleh karena penguasaan pengetahuan dan ketrampilan baru akan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk mengolah potensi dan sumber daya lokal yang tersedia. Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dibutuhkan pendidikan, ketrampilan dan kreativitas penduduk yang cukup memadai untuk mampu menangkap peluang dan kesempatan yang tersedia.

Dari aspek Pendidikan, Dilihat dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Dumai seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan pembangunan daerah Kota Dumai di bidang pendidikan dapat di katakan cukup baik, namun terdapat beberapa isu yang menjadi penting yakni

1. Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah dilihat per kecamatan, disitu terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah kecamatan yang berada di wilayah pusat kota, jauh lebih baik dari rasio kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah fasilitas dan akses pelayanan pendidikan yang ada di Kota Dumai belum tersebar secara merata dan banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Masih kurangnya jumlah fasilitas dan pelayanan pendidikan di wilayah kecamatan terluar Kota Dumai terlihat dari perbedaan nilai angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yang mana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai yang jauh lebih baik dengan perbedaan yang cukup signifikan daripada kecamatan yang berada di luar wilayah pusat Kota Dumai.

1. Belum tersedianya Gedung kesenian, yang mana selama ini untuk Gedung Lam Dumai dan bukit gelanggang menjadi tempat berkesenian.
2. Sanggar seni dan budaya yang dibina pada tahun 2017 realisasinya adalah sebanyak 40 sanggar yang dibina. Pada tahun 2018, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih pada jumlah yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 40 sanggar. Capaian ini masih konstan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Fokus kesehatan, berikut beberapa indikator menjadi dasar pelayanan dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 58 kasus. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota

Dumai sebesar 7,2 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 11,63 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2019 mengalami jauh mengalami penurunan.

2. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 74 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 9,00 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita.
3. Pada tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 10 kasus. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, di mana angka kematian ibu sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 dari total 310 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 83,2%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 85,39%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +.
5. Pada tahun 2019 ditemukan 7 kasus balita dengan gizi buruk, dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,01%.
6. Jumlah dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukkan nilai yang lebih baik untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dibanding kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Fokus pariwisata, sebagai salah satu pintu masuk dari luar negeri, kota dumai sangat rentan untuk dipengaruhi oleh dari segala asepek kehidupan. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam nilai, sikap, dan mental pemuda khususnya dan masyarakat Kota Dumai umumnya yang sangat erat dengan budaya daerah, sehingga jati diri masyarakat yang berbudaya daerah secara cepat akan hilang. Keadaan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapan pun.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan kepemudaan, pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerah secara global dan menjadi .

Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 12.755 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2019 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan menjadi 12.908 wisatawan dengan rincian kunjungan domestik sebanyak 81.202 orang, kunjungan mancanegara sebanyak 12.908 orang. Penurunan perkembangan sektor pariwisata dalam jangka panjang dapat menghilangkan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk Kota Dumai. Hal ini disebabkan sektor pariwisata mempunyai efek pengganda terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi lain melalui pembelanjaan yang akan dilakukan oleh wisatawan. Selain itu berkembangnya sektor pariwisata juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan Sosial budaya yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat
2. Perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan
3. Belum meratanya rasio ketersediaan sekolah diluar dilihat per kecamatan.
4. Belum tersedianya Gedung kesenian dan kurangnya pembinaan terhadap grup kesenian.
5. Perlunya pengawasan terhadap kosmetik, obat dan makan/minuman yang beredar di masyarakat.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

e. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Isu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini antara lain meliputi bagaimana melibatkan (*Involving*) mereka dalam berbagai forum perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan pembangunan.

Komitmen Pemerintah Kota Dumai terhadap isu *good governance* dalam agenda pencapaian SDG's sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi hal yang mutlak untuk diwujudkan yakni empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dapat tercapai. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.58 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs).



Gambar 2.58 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs)

Untuk itu pemerintah kota Dumai berdasarkan Rancangan RAD SDGs telah menetapkan empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum yang dibagi kedalam 17 tujuan sebagai berikut :

1. Pilar Pembangunan Sosial

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Sosial terdiri dari 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun; 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia serta 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.164 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun , tabel 2.165 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, tabel 2.166 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan

Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, tabel 2.167
 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta
 meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia, tabel 2.166
 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.

Tabel 2.166 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,5	<4,5	<4,5
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, penganggungi, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	1.3.1. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	51.87%	66.00%		
	1.3.1 (a) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25%	8%	10%	12%
	1.3.1(c) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	82%	85%	90%
	1.3.1(d) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15%	50%	52%	53%
	1.3.1 (e) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	-	40%	45%	50%
	1.3.1 (f) Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	20%	40%	45%	50%
	Rasio lulusan S1				
	1.3.1 (g) Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	1.3.1(h) Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	-	30%	40%	50%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 Persentase penduduk berakses air minum	20,67 %	34,80%	35,00%	53,76%
	1.4.1(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	87.10	95	95	
	1.4.1(b). Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94.20%	95.00%	95.00%	
	1.4.1 (d) Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5 Ha	5.5Ha	6 Ha	6,5 Ha
	1.4.1 (e) Panjang Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	2,00%	3,48%	3,50%	3,55%
	1.4.1 (f) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	7%	7%
	1.4.1 (g) Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,00%	2,83%	2,85%	2,90%
	1.4.1 (h) Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	356	416	437	457
	1.4.1 (i)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	99,75%	99,92%	100%
	1.4.1 (j)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	85,26%	95,76%	99,26	100
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	1.5.1 (a) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90%	100%	100%
1.5.1 (c)Persentase PMKS yang tertangani		25%	27%	28%	30%

(Sumber : Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020)

Tabel 2.167 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.41	5%	5%	3%
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level I Yang harus diberikan sarana kesehatan				
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.00	25	20	
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta		25	20	
	2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	0.00	5	5	
	Persentase Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak		95,90 %		
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	74.00	80	85	
2.3 Pada tahun 2030, Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2.3.1 Angka Kecukupan Protein	50 (gram/kapita/tahun)	50 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)
2.4 Pada tahun 2030, Meningkatnya Produksi Pertanian	2.4.1 Produksi komoditi pertanian	20.154 TON	20.596 TON	20.818 TON	21.041 TON
	2.4.2 Produksi komoditi perkebunan	82.080 TON	84.256 TON	84.756 TON	85.256 TON
	2.4.3 Populasi Ternak	5.253 Satuan Ternak	5.883 Satuan Ternak	6.093 Satuan Ternak	6.303 Satuan Ternak
2.5 Pada tahun 2030, Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis serta menurunnya kasus cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	2.5.1. Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	35 Kasus	23 Kasus	17 Kasus	11 Kasus
	2.5.2 Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	35 Kasus	25 Kasus	20 Kasus	15 Kasus
	2.5.3. Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	17 Kasus	12 Kasus	17 Kasus	11 Kasus

Tabel 2.168 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) yang terdata (terlaporkan).	109.32	110	102	102

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
100.000 kelahiran hidup	3.1.2*Persentase kunjungan kehamilan (ANC) yang memenuhi standar minimal 4 kali(K4)	91.72	85	90	
	3.1.2(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	81.00	75	80	
	Cakupan pelayanan nifas		97,30 %		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		99,80 %		
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per1.000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	16.88	28	26	25
	3.2.1* Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	13.73	21	19	18
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	9.84	6	5	6,1
	3.2.3* Rasio posyandu per Satuan Balita		7.90		
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		4,00		
	3.2.4* Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.83		
	3.2.5 Cakupan Pnemumonia		85,50 %		
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	36	62	68	
	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.71	0,81	1	< 1
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	58.58	70	70	
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.06	1	1	1
	3.3.4 Tingkat kematian karena malaria		1		
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	17	<30	<30	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk			5,27	
	Tingkat kematian karena tuberkolosis per 100.000 penduduk		2,004 %		
	3.3.5.(a) eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	sudah melaksanakan TAS I,II ,III dan mendapat sertifikat eliminasi			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	18.75	19.05		
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		5.8	5.6	
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	49.02	25	23	
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	7.13	16	14	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.4.1.(b) Unmeet need pelayanan kesehatan				
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	44.68	75.00	100.00	100.00
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3 Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1 Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	2.57	3.00	3.20	3.20

Tabel 2.169 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	> 100 %	100 %	100 %	100 %
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLPT/MTs/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	100%
	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	83,23 %	88,23 %	93,23%	96,73%
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan	4.2.3 (a) Indikator (PAUD) Usia 0-4 Tahun yang berpartisipasi pendidikan PAUD.		90,73	93,23	96,73%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar					
	4.6.1 Persentase masyarakat melek huruf	99,43 %	99,46 %	99,47%	99,48%
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.c.1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV, mendapatkan Sertifikasi, memenuhi Sertifikasi, Sekolah yang mengimplementasikan MBS, dan Pendidik tentang pemahaman Kurikulum		94,58%	97,58%	100%
4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS					

Tabel 2.170 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.2 (a) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	75%	85%	90%	91%
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	13,33%	0%	16,67%	17%
	5.5.2 Rasio PNS Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai	51,8%	52,8%	53,0%	6,0%

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Ekonomi terdiri dari 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi; 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.169 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi , tabel 2.170 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi, tabel 2.171 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara.

Tabel 2.171 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara berkembang.	8.1.1* Pertumbuhan ekonomi	4.64	4.32	4,37	4,42
	8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)	93,003 juta rupiah	107,894 juta rupiah	113,370 juta rupiah	119,123 juta rupiah
	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita	74.705.000	48.242.000	48.242.000	121.044,95
	8.1.1.(a) PDB per kapita	5%	5%	5%	5%
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25	30	30	30
	8.9.1. (a) Kunjungan wisata	42,42	43	45	48

Tabel 2.172 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a) Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (%)	55,57 %	57,59 %	56,85%	58,35%

Tabel 2.173 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	<4,57	<4,5	<4,5
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 (A)Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan	425 Perusahaan

3. Pilar Lingkungan Hidup

Untuk pencapaian target pilar Lingkungan Hidup terdiri dari 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.174.

Tabel 2.174 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Target (1B9:G21)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan..	11.1.1.(a) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	6%	7%	7%
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	4 wilayah	5 wilayah	5 wilayah	5 wilayah

4. Pilar Pembangunan Hukum

Untuk pencapaian target pilar Pembangunan Hukum terdiri dari 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.175

Tabel 2.175 Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. RAD Anti Korupsi	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	WDP(2016)	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA		1,99 %		

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2019	2020	2021
	Bagi hasil Kota		25,54 %		
	16.6.1.(b) Tersusunnya LAKIP Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	13,33% (2014-2019)	16,67%	16,67%	16,67%
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0%	0,09%		
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(b) Kepemilikan Akta Kelahiran	80,2 %	90%	93%	95%
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(d) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12 kasus	48 kasus	60 Kasus	72 Kasus
	16.10.2.(e) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	225 Perusahaan	420 Perusahaan	425 Perusahaan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP;
- b) Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota;
- c) Belum meratanya sebaran guru yang masih terpusat di daerah kota sehingga daerah yang dipinggir kota masih kekurangan guru untuk perluasan Akses Pendidikan;
- d) Masih adanya tenaga pendidik/tenaga kependidikan/Kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditentukan;
- e) Cenderung menurunnya rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs
- f) Persentase ruang kelas SD/MI yang dalam kondisi baik masih 41,99%, Rusak Ringan 52,80% dan Rusak berat 5,21%;

- g) Persentase ruang kelas SMP yang dalam kondisi baik masih 24,74%, rusak ringan 71,05% dan rusak berat 4,21%;
- h) Manajemen pengelolaan pendidikan belum efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan;
- i) Belum meratanya penyediaan dan/atau pengembangan system pembelajaran, data dan informasi pendidikan berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah;
- j) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- k) Angka Kelulusan SMP/MTs pada Tahun 2018 cenderung menurun;
- l) Guru yang bersertifikasi masih 90%;
- m) Menurunnya angka melek huruf Kota Dumai kurun 2016-2018;
- n) Kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pengembangan sektor pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan murah/terjangkau;
- o) Masih tingginya jumlah penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan hanya sampai pendidikan dasar (37,80%);
- p) Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai;
- q) Relativ menurunnya APK SMP/MTs;
- r) Relatif menurunnya APM SMP/MTs.

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai;
- b) Pada umumnya bangunan puskesmas pembantu serta poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak;

- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Meningkatnya Angka Kematian Bayi yang berdampak pada meningkatnya Angka Kematian Balita serta meningkatnya Angka Kematian Ibu dibanding tahun sebelumnya;
- e. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID 19;
- f. Meningkatnya jumlah kasus balita dengan gizi kurang dan gizi buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- g. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC);
- h. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal;
- i. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan;
- j. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer;
- b) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;

- c) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekuensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- d) Panjang jalan dalam kondisi baik masih baik sampai tahun 2018 52,35% ;
- e) Pada Tahun 2018 Panjang jalan dengan kondisi baik yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan (31,05%), Bukit Kapur (45%) dan Medang Kampai (49,03%);
- f) Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;
- g) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan better space better living;
- h) Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,5m;
- i) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
- j) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak; Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- k) Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapatnya rumah tidak layak huni;
- b) Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai;
- c) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
- d) Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
- e) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya rasio jumlah pol PP terhadap 10.000 penduduk;
- b) Rendahnya rasio jumlah petugas linmas terhadap total jumlah penduduk;
- c) Tingginya potensi kebakaran lahan dan hutan;
- d) Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
- e) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah;
- f) Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan.

6. Urusan sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka;
- b) Keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK;
- c) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- d) Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas;
- e) Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat;
- f) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- g) Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
- h) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

- i) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya tingkat pengangguran Kota Dumai dibanding Provinsi Riau dan Nasional;
- b) Rendahnya kualitas Pendidikan dan Keterampilan tenaga kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan legislatif masih di bawah 50%;
- b) Masih adanya KDRT yang terjadi di Kota Dumai ;
- c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai;
- d) Masih adanya korban perempuan dan anak yang belum mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu;
- e) Belum semua korban kekerasan perempuan dan anak memperoleh pelayanan rehabilitasi social;
- f) Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulangan;
- g) Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan hukum;
- h) Belum semua perangkat Daerah yang responsive gender;
- i) Belum semua puskesmas yang ramah anak;
- j) Belum semua sekolah yang ada di kota dumai ramah anak;
- k) Minimnya taman bermain yang ramah anak di Kota Dumai;
- l) Minimnya ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai;
- m) Belum semua kelurahan yang ada di Kota Dumai memiliki forum anak;
- n) Masih kurangnya Informasi Layak anak Kota Dumai;
- o) Rendahnya Partisipasi kader KAMI BERLIAN.

3. Urusan Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b) Tingginya ketergantungan impor pangan;
- c) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;
- d) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
- e) Rendahnya kuantitas ketersediaan pangan utama belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai;
- f) Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
- g) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- h) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- i) Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4. Urusan lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kualitas air tanah, air sumur bor masih rendah karena tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam;
- b) Menurunnya kualitas air laut dan air sungai;
- c) masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk);
- d) Pengawasan limbah B3;
- e) Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;
- f) Belum semua sekolah berbudaya lingkungan;
- g) Belum semua tersedia dokumen terhadap lingkungan.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum seluruh penduduk yang memiliki KTP;
- b) Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai Single Identity Number;
- c) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan responsive gender;
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP;
- b) Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c) Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah;
- e) Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f) Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif;
- b) Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sektor;
- c) Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk;
- d) Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera.

8. Urusan Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum tersedianya terminal Type C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan;
- b) Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (Becak Motor, Kendaraan Online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota;
- c) Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap Angkutan Sewa, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah di area Kota Dumai;
- d) Belum adanya Penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai Jumlah Pelabuhan Rakyat Dikota Dumai;
- e) Kurangnya Fasilitas Keselamatan jalan;
- f) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan di Kota Dumai;
- g) Rendahnya investasi Pemerintah Daerah pada Sub Sektor Perparkiran;
- h) Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi;
- i) Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan;
- j) Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.
- k) Peningkatan Pembangunan sarana PJU

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah :

- a) Belum semua organisasi perangkat daerah yang menggunakan Teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik;
- b) Informasi pada Web site Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya;

- c) Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik);
- d) Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai;
- e) Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi;
- f) Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi;
- g) Memastikan Struktur Diskominfo dan Tupoksinya sudah memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan best practice TIK seperti terdapat Bidang/Seksi yang mengurus khusus Infrastruktur; Keamanan Informasi; Aplikasi; Monitoring, Perawatan, dan Operasional Sistem dan Layanan TIK; Tata Kelola & Manajemen TIK; Integrasi Data; Pengolahan dan Penyajian Data; Komunikasi Publik; dan Service Desk semua layanan TIK;
- h) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM);
- i) Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik;
- j) Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

11. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum terbitnya peraturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga hal ini berdampak pada penerbitan izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin di Bidang Penanaman Modal;
- b) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
- c) Belum optimalnya Pengembangan sistem insentif terhadap investasi;

- d) Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait;
- e) Menurunnya jumlah Perusahaan Penanaman modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing di Dumai;
- f) Menurunnya kontribusi investasi terhadap PDRB.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
- b) Minimnya jumlah kegiatan kepemudaan;
- c) Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai.

13. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah;
- b) Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata kota Dumai;
- c) Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya;
- d) Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah;
- e) Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah;
- f) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- g) Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai;
- h) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;

- i) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.

14. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- b) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;
- c) Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas;
- d) Kurangnya kegiatan pengembangan perpustakaan;
- e) Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan.

15. Urusan Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD masih belum optimal sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b) Menurunnya dokumen arsip yang tersimpan;
- c) Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai(Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus;
- b) Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
- c) Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- d) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian.

2. Urusan Kelautan dan perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut;
- b) Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan;
- c) Ketrampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan;
 - a. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha peternakan dan perikanan;
 - b. Menurunnya produksi perikanan laut selain udang;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum;
 - d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
 - e. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan;
 - f. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah;
 - g. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur;
 - h. Secara total produksi perikanan budidaya mengalami penurunan terutama pada produksi lele.

3. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal.

4. Urusan Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Menurunnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal;
- b) Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- c) Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan;
- d) Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- e) Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah;
- f) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah;
- g) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- h) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;

- i) Kurangnya pemahaman penyedia jasa kontruksi tentang regulasi jasa kontruksi.

2. Urusan Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b) Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%;
- c) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal;
- d) Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatan- kegiatan provinsi di kota Dumai;
- e) Kurangnya Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan.

3. Urusan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
- c) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d) Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
- e) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;
- f) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
- g) Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;

- h) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
- i) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
- j) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;

4. Urusan Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.

5. Urusan Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan sangat rendah
- b) Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal;



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2022).

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 seperti yang telah dijelaskan diatas.

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2022

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Mulai Tahun 2015 perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini dikarenakan Selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB adalah :

- 1) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Sedangkan pengaruh akibat adanya perubahan tahun dasar terhadap perhitungan PDRB adalah:

- 1) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok
- 2) pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- 3) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan
- 4) Saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 5) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

Tingkat perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2016-2020 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19. Perekonomian Dumai pada tahun 2016 adalah sebesar 4,14% mengalami kenaikan ditahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai berturut-turut sampai tahun 2020 adalah 4,46%; 5,34%; 5,60%; dan -1,05%. Kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 akibat tekanan ekonomi Dunia dan pembatasan-pembatasan kegiatan perekonomian dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19 . Secara umum dampak Covid 19 yang melanda seluruh dunia juga menekan perekonomian kotaDumai secara umum. Pertumbuhan ekonomi kota Dumai pada tahun 2020 adalah -1,05 persen. Dari 17 sektor lapangan usaha, sektor yang minus terdiri dari 7 sektor yaitu:

- Pertambangan (-1,30%)
- Konstruksi (-3,02%)
- perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-10,32%)
- Transportasi dan pergudangan (-34,64%)
- Penyediaan akomodasi dan makan minum (-20,01%)

- Jasa perusahaan (-21,64%)
- Administrasi pemerintahan, pertanahandan jaminan sosial wajib (-2,16%)
- Jasa lainnya (-20,03%)

Sedangkan sektor yang tetap tumbuh namun pertumbuhannya tidak seperti tahun sebelumnya terdiri dari 4 sektor yaitu

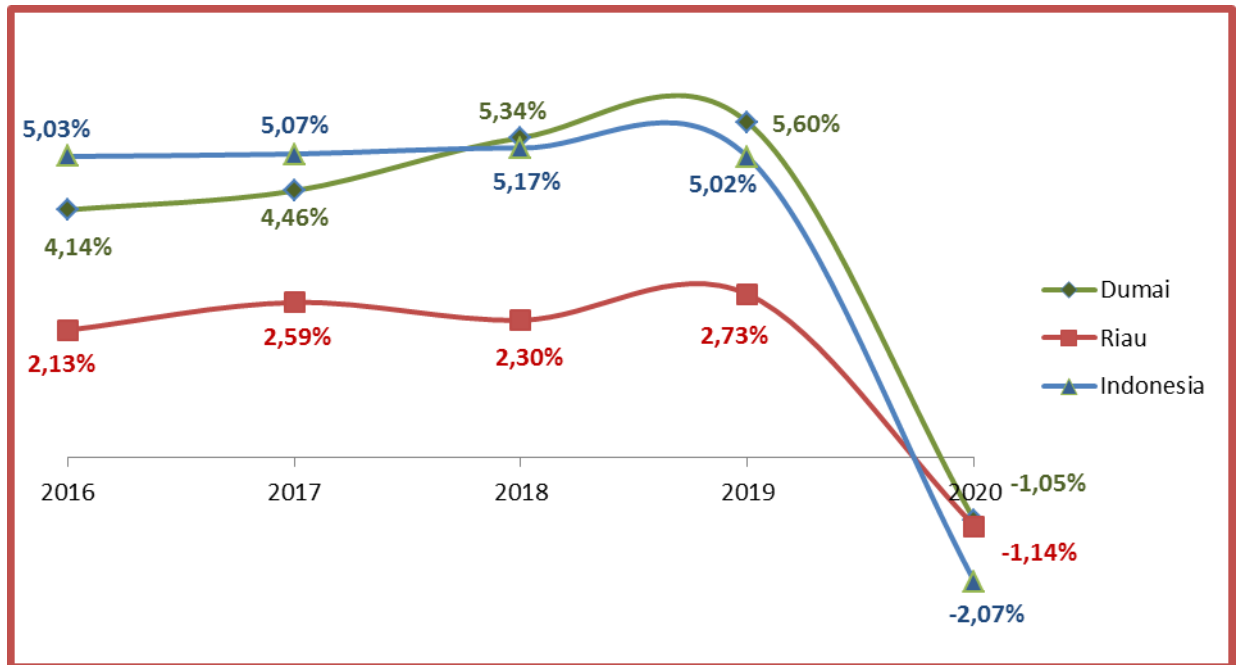
- Industri pengolahan 3,01 % dimana tahun sebelumnya tumbuh 7,17 persen, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan pada PDRB Kota Dumai
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,05% dimana tahun sebelumnya tumbuh 7,29%
- Real estate 1,66% dimana tahun sebelumnya tumbuh 5,23%
- Jasa pendidikan 1,41% dimana tahun sebelumnya tumbuh 5,62%

Adapun Sektor-sektor yang pertumbuhannya melebihi tahun sebelumnya selama pandemi covid 19 ini adalah :

- Pengadaan listrik dan gas 138,30% dimana tahun sebelumnya hanya tumbuh 7,29%. Tingginya pertumbuhan sektor ini sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 seperti kebijakan Work From home dan School From Home yang kenaikan terhadap kebutuhan penggunaan energi listrik dan gas yang sangat banyak.
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,18% dimana tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,99%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini merupakan sebagai dampak naiknya angka pengangguran selama Covid 19 dimana sektor ini menjadi lapangan usaha alternatif bagi para tenaga kerja yang menggagur
- Informasi dan komunikasi 9,24% dimana tahun sebelumnya tumbuh 9,24%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini merupakan sebagai akibat penerapan kebijakan Work From home dan School From Home dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19 dimana kebutuhan penggunaan kuota internet menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya
- Jasa kesehatan 14,59% dimana tahun sebelumnya tumbuh 10,86%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini merupakan sebagai

akibat pandemi Covid 19 sehingga biaya kesehatan menjadi meningkat sangat signifikan.

Gambar berikut memperlihatkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kota Dumai, Provinsi Riau dan dengan nasional :



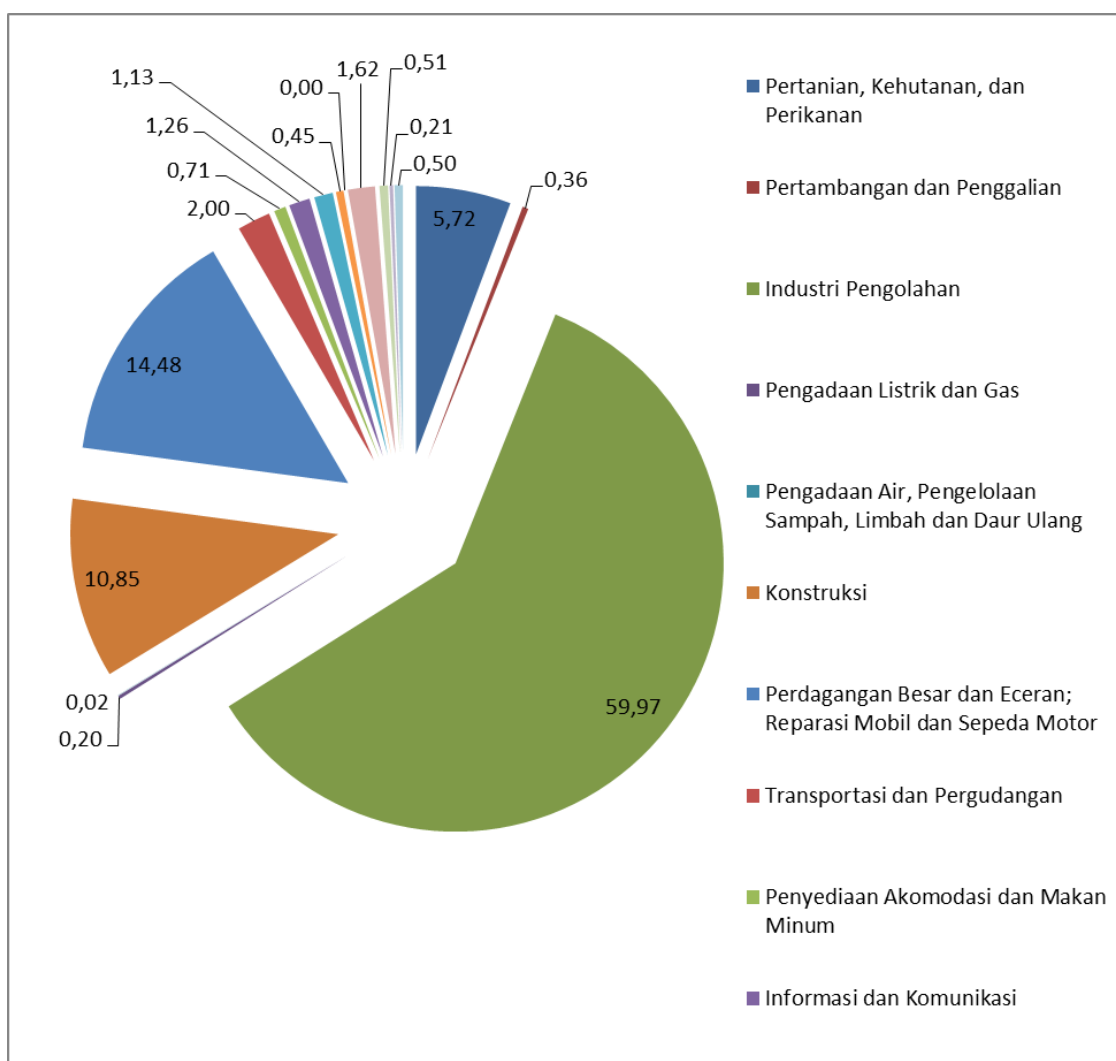
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai

Pada tahun 2020 PDRB perkapita Kota Dumai adalah sebesar 114,6 juta rupiah jika dibandingkan ditahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 2,5 juta rupiah. Hal ini disebabkan menurunnya nilai produksi disektor konstruksi, perdagangan besar eceran, reparasi mobildan sepeda motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib dan jasa lainnya.

Tabel. 3.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai Tahun 2016-2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Perkapita (juta Rp/jiwa)	95,79	101,95	109,06	117,05	114,66
Share Regional	4,10%	4,31%	4,40%	4,75%	4,98%

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2020 yaitu industri pengolahan (>50%), perdagangan besar dan eceran (>14%), reparasi mobil dan motor serta Bangunan (>10%). Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen.



Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2016-2020

Berdasarkan data dan kondisi saat ini maka perkiraan (proyeksi) pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2022 adalah 3,63 persen. Sedangkan untuk PDRB perkapita sebesar Rp. 80,98 Juta untuk ADHK dan Rp. 119,809 Juta untuk ADHB

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Maret 2021, Dumai mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93, Inflasi Tahun Kalender (Maret 2021 - Desember 2020) sebesar 0,01 persen (deflasi) dan Inflasi Year on Year (Maret 2021 terhadap Maret 2020) sebesar 2,16 persen. Deflasi di Dumai terjadi karena adanya penurunan indeks harga di 3 (tiga) kelompok pengeluaran yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,90 persen; diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,03 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Sedangkan 2 (dua) kelompok mengalami inflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,08 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,08 persen. Sementara 6 (enam) kelompok mengalami inflasi/deflasi yang relatif stabil antara lain; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok pendidikan. Komoditas yang memberikan andil terjadinya deflasi di Dumai antara lain: cabai rawit, emas perhiasan, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan serai, ikan tongkol/ambu-ambu, ayam hidup, ikan caru, buncis dan lain-lain.

Tabel. 3.2 IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2021, Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2020	IHK Des 2020	IHK Maret 2021	Tingkat Inflasi Maret 2021 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021(%)	Tingkat Inflasi/ Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Maret 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	103.69	105.10	105.93	-0.04	-0.01	2.16	-0.04
Makanan, Minuman dan Tembakau	104.91	106.92	109.55	-0.03	-0.26	4.42	-0.01
Pakaian dan Alas Kaki	105.24	106.76	106.76	0.00	0.00	1.44	0.00
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99.91	99.93	99.94	0.00	0.01	0.03	0.00
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102.90	103.47	103.78	0.00	0.30	0.86	0.00
Kesehatan	105.55	106.49	108.40	0.00	1.62	2.70	0.00
Transportasi	104.44	105.87	106.19	0.08	0.30	1.68	0.01
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	102.16	102.68	102.67	-0.01	-0.01	0.50	0.00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	102.56	102.68	102.67	0.00	0.00	0.11	0.00
Pendidikan	104.15	105.76	105.76	0.00	0.00	1.55	0.00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	104.51	104.82	105.07	0.08	0.24	0.54	0.01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107.29	114.10	111.92	-0.90	-0.67	4.32	-0.05

Sumber : BPS,2021

Pada Maret 2021 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, 2 (dua) kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,1 persen. Sedangkan 2 (dua) kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok transportasi dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
- 2) Aspek Program
 - a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyesuaian asumsi makro daerah dalam rangka

mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan

3) Aspek Komitmen dan Komunikasi

a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID

b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama periode 2016-2020 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (Daya beli masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2016 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2020 adalah sebesar 72,96 ; 73,46 ; 74,06 ; 74,64 ; 74,40

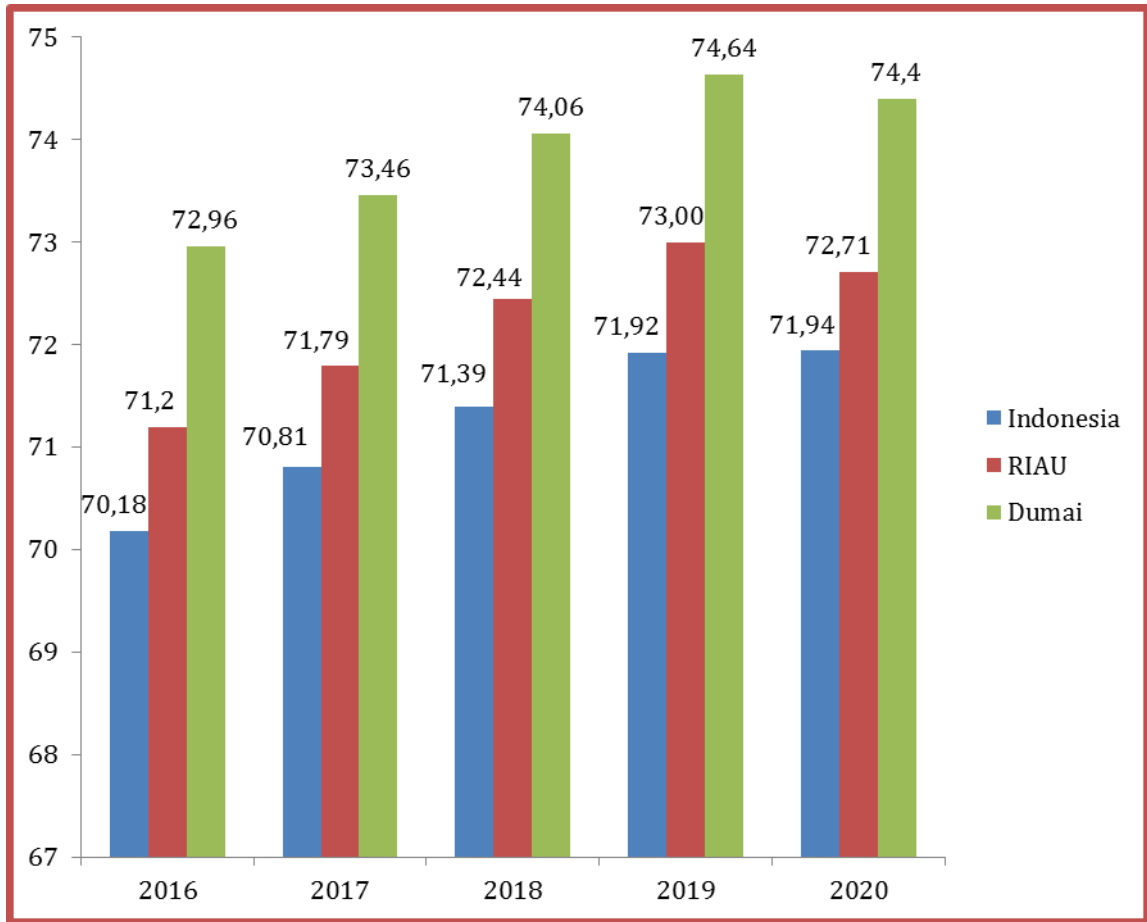
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 2.23 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2020.

Tabel 3.3 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2019

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Dumai	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40
Provinsi Riau	71,20	71,79	72,14	73,00	72,71
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

(Sumber: BPS, 2020)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2016-2020, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 dibawah. Pada tahun 2020, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 di atas.



Gambar 3.3 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional Tahun 2016-2020
(Sumber: BPS, 2020)

Tabel 3.4 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020

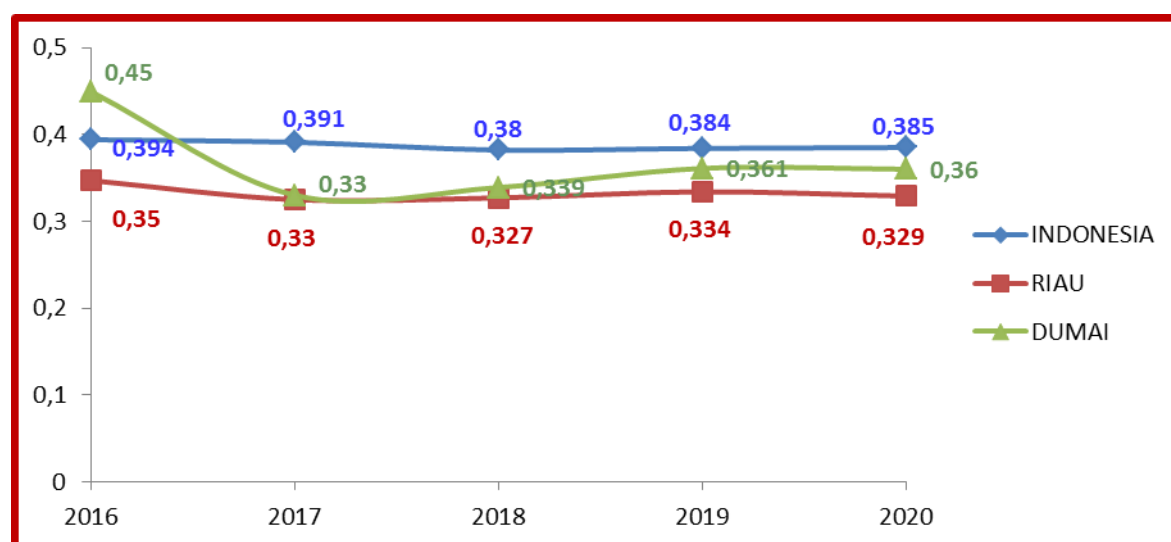
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31
Indragiri Hulu	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83
Indragiri Hilir	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54
Pelalawan	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56
Siak	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68
Kampar	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83
Rokan Hulu	67,68	68,67	69,36	69,93	69,38
Bengkalis	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46
Rokan Hilir	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15
Kepulauan Meranti	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50
Pekanbaru	79,69	79,97	80,66	81,35	81,32
Dumai	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40

(Sumber: BPS, 2020)

Berdasarkan trend datan dan kondisi yang ada pada saat ini maka perkiraan (proyeksi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2022 adalah 74,94.

d. Indeks Gini

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2016-2020, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/ kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Ketimpangan antar kelompok penduduk di Kota Dumai pada tahun 2020 masuk pada kategori sedang dan yang tertinggi di Provinsi Riau



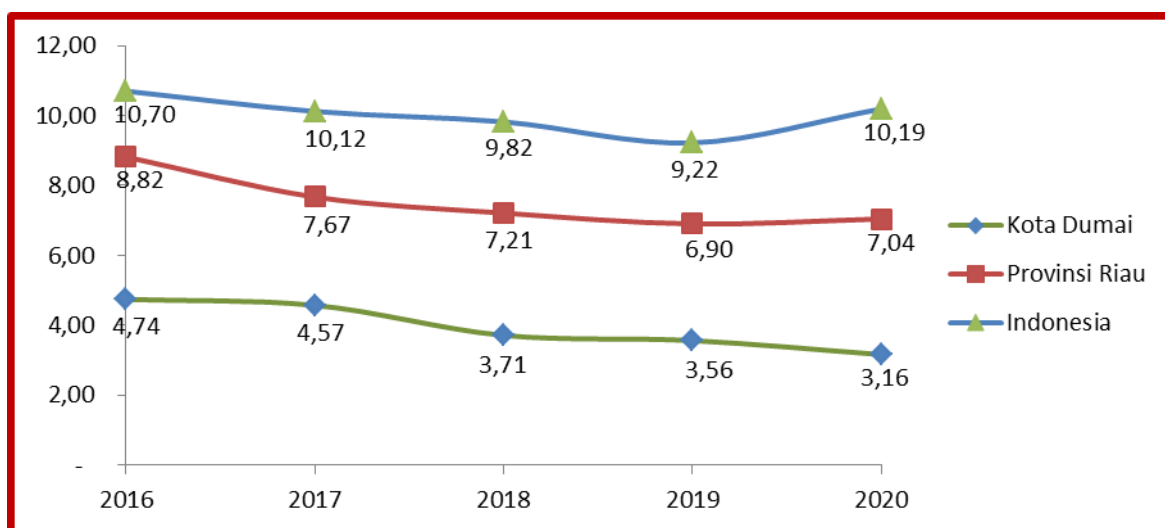
Gambar 3.4 trend Indeks Gini Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia
 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Adapun perkiraan (proyeksi) Indeks Gini Rasio (IGR) kota Dumai Tahun 2022 adalah 0,36.

e. Kemiskinan

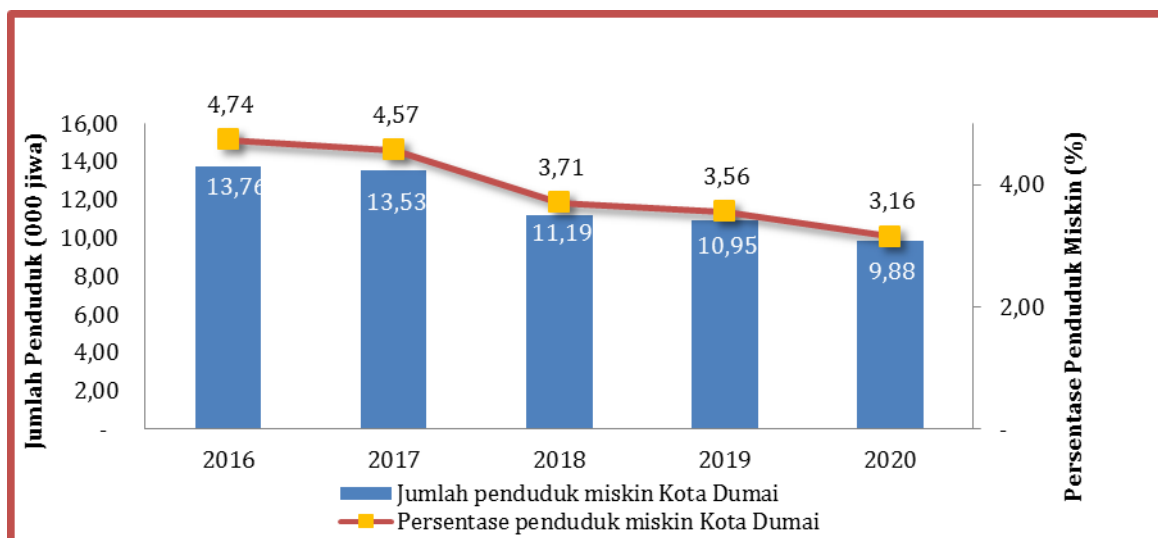
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya

menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Untuk penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada bab II. Secara umum perbandingan kondisi tingkat kemiskinan nasional dan propinsi serta Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.5 Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2016-2020
(Sumber: Badan Pusat Statistkik (BPS), diolah)

Sedangkan untuk kondisi kota dumai pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

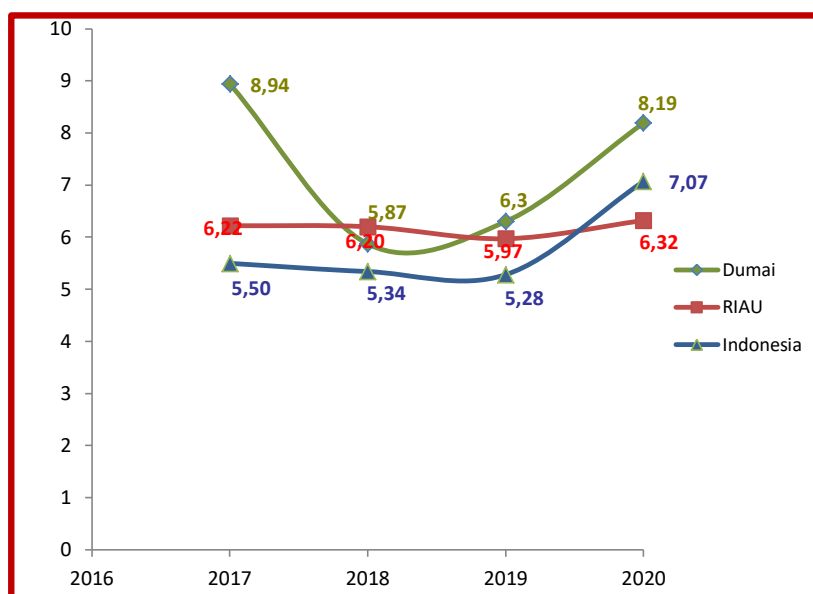


Gambar 3.6 Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kota Dumai
(Sumber: Badan Pusat Statistkik (BPS), diolah)

Tingkat Kemiskinan Kota Dumai pada tahun 2020 (kondisi Maret) tercatat sebesar 3,16% atau sekitar 9.880 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 484.609/kapita. Garis Kemiskinan ini meningkat dari tahun 2019 yaitu Rp. 439.152/kapita atau naik sebesar Rp.45.457/kapita. Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Kemiskinan kota Dumai Tahun 2022 adalah 3,01%.

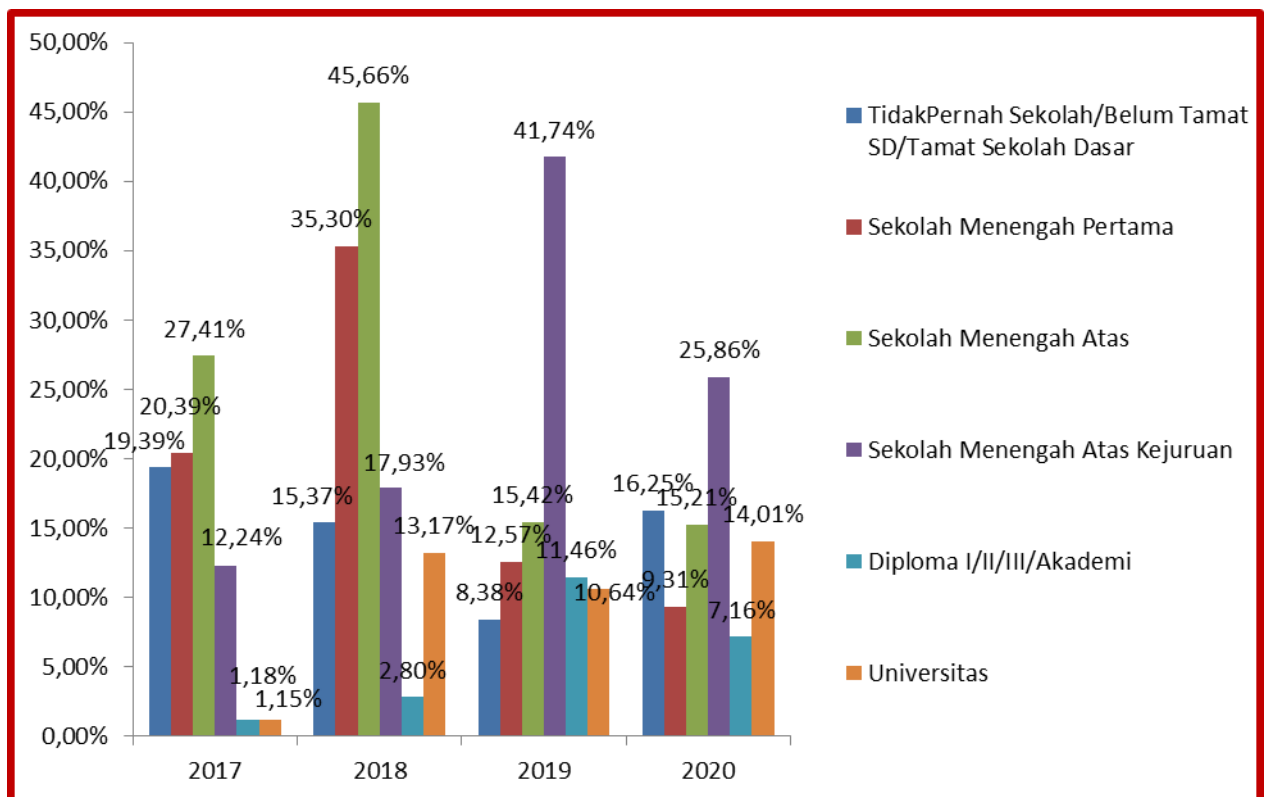
f. Pengangguran

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kondisi tingkat pengangguran nasional dan propinsi riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 3.8 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2017-2020 (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Sedangkan kondisi kota dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan persentase jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2020
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah)

Dibandingkan tahun 2019, maka pada tahun 2020 pengangguran yang terbanyak terjadi pada lapangan pekerjaan di bidang jasa sebanyak 6.720 orang dan diikuti pada lapangan pekerjaan manufaktur sebanyak 685 orang. Sedangkan di lapangan pekerjaan di bidang pertanian terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja yaitu sebanyak 1.386 orang. Adapun perkiraan (proyeksi) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Dumai Tahun 2022 adalah 7,79%.

3.1.2. Telaahan Kebijakan nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional dimana untuk tahun 2022 menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan COVID-19: Merupakan tahun kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi karena tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. Oleh sebab itu tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan untuk keluar dari *middle income trap*.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu transformasi ekonomi yang terdiri dari :

1. **Mengubah struktur perkonomian** dari *lower productivity to higher productivity sectors*;
2. **Meningkatkan produktivitas** di masing-masing sektor.

Adapun Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat termasuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera.
2. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
3. Mengoptimalkan pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan, khususnya di wilayah Pesisir Timur Sumatera.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera.
5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan penanganan bencana.

Sedangkan strategi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dalam rangka pengembangan wilayah pulau Sumatera pada tahun 2022 adalah :

1. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah → Mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan, utamanya di: KEK Arun Lhokseumawe, KPNN Sabang, KI/KEK Sei Mangkei, KI Kuala Tanjung, DPP Danau Toba, KI Dumai, KI/KEK Galang Batang, KPBPB Batam, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang
2. Penguatan konektivitas → Meningkatkan konektivitas antar kawasan pengembangan, kota-kota utama, dan pusat pelayanan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan distribusi melalui pengembangan koridor tol trans sumatera di pesisir timur,

penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan, dan pengembangan sistem transportasi wilayah multimoda di WM Medan dan WM Palembang

3. Peningkatan ekonomi lokal → Meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam dan pariwisata serta peningkatan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat.
4. Peningkatan kualitas SDM → Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan BLK dan sekolah vokasi.
5. Peningkatan pelayanan dasar → Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, dan bandara perintis (bandara/jalur penerbangan perintis), serta infrastruktur dasar lainnya, serta peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan dan kesehatan.
6. Penanggulangan bencana → Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi resiko bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa Dumai telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pada sistem perkotaan nasional. Sebagai PKN, Kota Dumai akan dilakukan percepatan pengembangan sebagai kota-kota utama kawasan perbatasan dalam bentuk pengembangan/peningkat fungsi kota. Sedangkan sebagai PKSN, Kota Dumai akan dilakukan revitalisasi dan percepatan pengembangan sebagai kota-kota pusat pertumbuhan nasional dalam bentuk pengembangan/peningkatan fungsi. Sedangkan berdasarkan struktur ruang nasional, kota Dumai akan akan dilalui oleh 2 (dua) jaringan jalan bebas hambatan antar kota yang masih dalam tahap pengembangan yaitu :

1. rute Pekanbaru-Kandis-Dumai
2. rute Dumai-Simpang sigambal-rantau prapat.

Adapun dari sisi kepelabuhanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pelabuhan Kota Dumai ditetapkan sebagai pelabuhan utama dimana direncanakan Pelabuhan Kota Dumai akan dikembangkan untuk pemantapan pelabuhan utama dan untuk pemantapan pelabuhan angkutan penyeberangan. Sedangkan dari sisi energy, Pemeirntah pusat telah menetapkan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik kota Dumai masuk dalam tahapan pengembangan untuk peningkatan kapasitas pembangkitan tenaga listrik. Terkait sektor unggulan, Kota Dumai telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan andalan Duri-Dumai dan sekitarnya. Adapun Kawasan Andalan Duri-Dumai dan sekitarnya masuk dalam tahapan pengembangan:

1. Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan
2. Pengembangan kawasan andalan untuk perkebunan
3. Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan
4. Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian
5. Pengembangan kawasan andalan untuk minyak dan gas bumi.

3.1.3.Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang tertuang dalm visi dan misi dan RKPD Provinsi Riau tahun 2022. Adapun rancangan misi pemerintah provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan BerwawasanLingkungan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi.

Disamping menelaah RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer
3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkar kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Terminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota DUMai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas
11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang kampai sebagai pengumpul skala tersier.

13. Rencana pengembangan pembangkit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

Adapun proyek Prioritas Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan major project dan prioritas nasional pada tahun 2022 yang berlokasi di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Usulan Teknis Daerah (Prioritas Nasional)

No	Major Project	Prioritas Nasional	Usulan Teknis Daerah		
			Rincian Output	Target	Detail Lokasi
1		05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan jalan Sp Batang-Lubuk Gaung	17 Km	14.72 KOTA DUMAI : Pembangunan jalan Sp Batang-Lubuk Gaung
2		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : SMA Bukit Kapur
3		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Meubilier SMA	70 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : SMAN 3 DUMAI
4	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Peralatan Utama	13 sekolah	14.72 KOTA DUMAI : - SMKN 5 DUMAI - SMK

No	Major Project	Prioritas Nasional	Usulan Teknis Daerah		
			Rincian Output	Target	Detail Lokasi
	untuk Industri 4.0				Perikanan Provinsi Riau
5	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengadaan Peralatan Praktik Siswa	15 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : - SMKN 4 DUMAI - SMKN 5 DUMAI
6	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya	5 SMK	14.72 KOTA DUMAI : - SMKN 1 DUMAI
7	17-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	11 Sekolah	14.72 KOTA DUMAI : - SMK Perikanan Provinsi Riau SMKN 6 DUMAI
8		05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan dermaga penyeberangan baru di Dumai dan di Tanjung Kapal, Rupert	2 Unit	14.72 KOTA DUMAI : Dermaga Dumai : sekaligus merupakan rencana dermaga untuk Ro-Ro Dumai-Malaka, koridor ekonomi kerjasama internasional IMT-GT Dermaga 2 Rupert : DED disusun tahun 2019

3.1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu stategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha mikro,kecil menengah(umkm/ikm)
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan investasi.
4. Ketahanan pangan daerah

5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sebagai daerah yang struktur ekonominya oleh sektor industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya maka Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh Perekonomian nasional Global. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19 seperti beberapa kebijakan tentang pembatasan berdampak langsung pada Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (small and medium enterprises) dan juga turut mempengaruhi kontribusi barang/jasa dan jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB kota Dumai sehingga ketika usaha kecil dan menengah ini mengalami stagnasi, maka akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat termasuk jumlah tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perekonomian kota Dumai Tahun 2021 dan tahun 2022 antara lain adalah Adanya kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran yang digunakan untuk upaya pencegahan dan penyebaran penyakit menular yaitu virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, Provinsi Riau Maupun perekonomian Kota Dumai hal ini tentunya akan menjadi salah satu tantangan perekonomian yang harus dihadapi karena dengan adanya covid dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sector lainnya. adanya kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak yang mengikuti trend harga pasar dunia sehingga harga bahan bakar bisa berubah setiap saat.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah termasuk kebijakan refocusing anggaran berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang menjadi acuan perdagangan internasional diperkirakan juga mempengaruhi nilai perdagangan kota Dumai yang berakibat pada inflasi. Situasi dan stabilitas keamanan pusat dan daerah juga turut memberi andil terhadap prospek pembangunan kota Dumai. Di tahun mendatang, kemungkinan kondisi pembangunan ekonomi Kota Dumai masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor. Disamping hal tersebut terjaganya stabilitas ekonomi makro terutama mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan akan difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas yang selama ini masih berorientasi pada wilayah pemukiman. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi

dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.

4. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan

DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, APBD diklasifikasi dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanjadan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

1.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2018 sampai proyeksi tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Target APBD Tahun 2021	Target Pendapatan 2022	Proyeksi/Target Pendapatan 2023
	Realisasi	Realisasi		Target APBD Tahun 2021	Target Pendapatan 2022	Proyeksi/Target Pendapatan 2023
PENDAPATAN DAERAH	1,326,357,465,590.53	1,465,674,372,306.33	PENDAPATAN DAERAH	1.181.028.560.529,00	1.783.319.523.803	1.887.029.432.390,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	291,620,030,783.75	378,738,044,466.72	PENDAPATAN ASLI DAERAH	345.725.526.611,00	378.326.919.636,51	373.762.405.721,78
Pendapatan Pajak Daerah	141,149,748,921.00	165,259,957,085.00	Pendapatan Pajak Daerah	163.180.200.000,00	180.351.137.262,00	194.423.947.755,78
Pendapatan Retribusi Daerah	31,101,350,827.00	32,672,832,980.00	Pendapatan Retribusi Daerah	39.199.304.600,00	45.191.539.936,00	46.624.980.067,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,342,756,372.00	1,242,457,348.00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.600.830.961,00	2.623.198.107,26	2.668.776.849,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117,026,174,663.75	179,562,797,053.72	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.745.191.050,00	150.161.044.331,25	130.044.701.050,00
DANA PERIMBANGAN	877,596,885,781.00	917,175,087,631.00	Pendapatan Transfer	795.339.433.918	1.368.957.576.951,49	1.477.232.985.806,00
			Tranfer Pemerintah Pusat	713.840.094.218	1.261.191.181.299,49	1.365.161.422.372,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	205,314,397,663.00	243,996,573,029.00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	118.409.036.000,00	450.896.674.814,49	477.484.209.609,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	457,514,401,000.00	424,090,440,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)	443.636.431.000,00	538.698.783.982,00	577.873.471.326,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	193,300,558,118.00	203,368,509,602.00	Dana Alokasi Khusus (DAK)	120.206.474.143,00	238.900.133.030,00	278.819.811.820,00
Dana Insentif Daerah	21,467,529,000.00	45,719,565,000.00	Dana Insentif Daerah	31.588.153.075	32.695.589.473,00	30.983.929.617,00
			Transfer antar Daerah	81.499.339.700	107.766.395.652,00	112.071.563.434,00
			Pendapatan bagi hasil	81.499.339.700	94.346.975.265,00	98.249.951.746,00
			Bantuan keuangan	-	13.419.420.387	13.821.611.688,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157,140,549,025.78	169,761,240,208.61	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.963.600.000,00	36.035.027.215,00	36.034.040.863
Pendapatan Hibah	38,089,929,579.00	40,900,800,000.00	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	39.963.600.000,00	36.035.027.215,00	36.034.040.863,00

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Target APBD Tahun 2021	Target Pendapatan 2022	Proyeksi/Target Pendapatan 2023
	Realisasi	Realisasi				
			undangan			
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	111,798,200,446.78	88,124,940,208.61				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,252,419,000.00	40,735,500,000.00				

Penjelasan Tabel 3.4 untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.783.319.523.803,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan),
4. Pajak Air Tanah,
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan,
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
8. Pajak Parkir,
9. Pajak sarang Burung Walet,
10. Retribusi Pelayanan Pasar,
11. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
16. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
17. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,
18. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
19. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
20. Retribusi Izin Trayek,
21. Retribusi Rumah Potong Hewan,
22. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,

23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
24. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
25. Retribusi Puskesmas, dan
26. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 direncanakan Rp. 378.326.919.636,51 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 180.351.137.262,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 45.191.539.936,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 2.623.198.107,26 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 150.161.044.331,25.

2) Pendapatan transfer

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2021, prediksi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.368.957.576.951,49. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2022 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari pendapatan untuk Tahun Anggaran 2022 masing-masing terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.261.191.181299,49
b. Transfer antar daerah	Rp. 538.698.783.982,00

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 36.035.027.215,00 yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2022 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2021 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2020.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.

- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Transfer

- a. Pusat Transfer Pemerintah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perhitungan alokasi Dana transfer pemerintah pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 serta mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Perhitungan alokasi dana transfer antar daerah didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran

2021 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2020. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang termasuk Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2022 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang

mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
5. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
6. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
7. Koordiasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
10. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
16. Updating Basis Data Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;

18. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2022. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel 3.5 berikut menggambarkan

realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2019-2020, target pada APBD tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun 2019 s.d 2022

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Uraian	Belanja pada APBD Tahun 2021	Belanja Daerah Tahun 2022	Belanja Daerah Tahun 2023
	Realisasi	Realisasi				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	527,609,559,159.00	674,246,573,387.00	Belanja Operasi	1.073.637.505.134	1.293.228.081.785	1.394.653.822.549
Belanja Pegawai	502,619,658,039.00	516,330,812,752.00	Belanja Pegawai	596.120.076.218	783.692.754.175	828.026.217.763
Belanja Bunga	-	-	Belanja Barang dan Jasa	596.120.076.218	470.252.244.940	525.138.737.156
Belanja Subsidi			Belanja Bunga	-		
Belanja Hibah	20,282,212,800.00	35,706,875,500.00	Belanja Hibah	41.198.492.109	36.763.082.670	38.968.867.630
Belanja Bantuan Sosial	2,520,000,000.00	3,844,800,000.00	Belanja Bantuan Sosial	90.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	Belanja Modal	165.619.072.594	470.091.442.018	472.375.609.842
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,187,688,320.00	-	Belanja Tidak Terduga	7.086.058.256	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	-	118,364,085,135.00	Belanja Transfer	-	-	
BELANJA LANGSUNG	783,949,296,918.06	750,456,543,246.85				
Belanja Pegawai	90,259,997,069.16	79,700,014,854.00				
Belanja Barang dan Jasa	427,867,059,655.55	426,049,898,518.52				
Belanja Modal	265,822,240,193.35	244,706,629,874.33				

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan E-planning Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.8 Rekap Perbandingan Pagu Rancangan Awal, Pagu Rancangan dan Pagu Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2022

NO	OPD	Pagu Rancangan Awal	Pagu Rancangan	Pagu Rancangan Akhir
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	309.432.806.134	349.432.806.134	365.327.050.134
2	Dinas Kesehatan	120.873.172.648	151.873.172.648	152.109.172.648
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	234.785.826.988	237.985.826.988	237.985.826.988
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.747.210.351	180.747.210.351	292.715.192.977
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.241.670.388	18.241.670.388	26.905.459.388
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.999.649.584	11.999.649.584	11.999.649.584
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.932.731.538	13.932.731.538	13.932.731.538
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.670.934.562	6.670.934.562	9.690.497.362
9	Dinas Sosial	12.921.514.160	14.000.000.000	14.150.000.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.795.723.039	15.770.337.546	16.860.337.546
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.538.463.898	8.843.463.898	8.993.463.898
12	Dinas Lingkungan Hidup	20.430.572.382	30.430.572.382	31.990.572.382
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.233.540.728	12.333.900.728	12.333.900.728
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.648.253.592	7.948.253.592	8.288.193.592
15	Dinas Perhubungan	39.274.278.983	46.774.278.983	54.996.403.735
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.125.987.926	16.125.987.926	16.525.987.926
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.679.773.822	14.679.773.822	14.879.773.822
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.481.028.831	16.193.693.277	16.193.693.277
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.975.094.718	12.712.975.047	20.812.975.047
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.214.582.951	17.214.582.951	17.422.902.951
21	Dinas Perikanan	9.081.768.219	10.081.768.219	12.469.228.219
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.028.666.474	16.028.666.474	21.727.776.378
23	Dinas Perdagangan	13.504.293.395	13.504.293.395	13.504.293.395
24	Sekretariat Daerah	52.157.347.738	70.157.347.738	81.282.325.696
25	Sekretariat DPRD	44.179.033.573	60.179.033.573	60.179.033.573
26	Kecamatan Dumai Barat	7.847.526.800	13.847.526.800	13.847.526.800
27	Kecamatan Dumai Timur	7.451.304.954	14.951.304.954	14.951.304.954
28	Kecamatan Bukit Kapur	8.346.918.876	18.846.918.876	18.846.918.876
29	Kecamatan Medang Kampai	7.227.982.312	13.227.982.312	13.227.982.312

NO	OPD	Pagu Rancangan Awal	Pagu Rancangan	Pagu Rancangan Akhir
30	Kecamatan Sungai Sembilan	8.079.934.142	17.079.934.142	17.079.934.142
31	Kecamatan Dumai Kota	8.207.199.732	15.707.199.732	16.107.199.732
32	Kecamatan Dumai Selatan	8.054.020.247	15.554.020.247	15.554.020.247
33	Inspektorat	20.868.412.987	24.068.412.987	24.368.412.987
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.336.982.050	16.636.982.050	16.936.982.050
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.639.366.346	62.639.366.346	62.639.366.346
36	Badan Pendapatan Daerah	18.271.822.567	23.271.822.567	23.271.822.567
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.749.874.256	13.211.610.006	13.211.610.006
	Total	1.297.035.271.884	1.602.906.012.763	1.783.319.523.803

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2022 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2022 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan misi serta program prioritas kepala daerah.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2022 sesuai dengan amanat UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;
7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun pemerintah pusat;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2022 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau.

c. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi
Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk

- menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian

sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik

swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).

- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

d. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga

perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

- atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

f. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2022 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota

atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahnprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desasebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku

pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kota Dumai Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021	Proyeksi Pada tahun 2022
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	23.704.008.005,09	151,195,171,725.69	192,166,427,398.17		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah penerimaan pembiayaan		23.704.008.005,09	136,396,562,212.22	151,195,171,725.69		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya					

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Pada tahun 2021	Proyeksi Pada tahun 2022
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
Jumlah pengeluaran pembiayaan						
Jumlah pembiayaan NETTO		23.704.008.005,09	136,396,562,212.22	151,195,171,725.69		

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *deviden* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



**PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022**
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01** Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02** Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03** Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05** Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2022

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Kota Dumai merupakan penjabaran Visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. RKPD Kota Dumai Tahun 2022 juga mempedomani Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dan RKP tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2020-2024.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Pokok-pokok Pikiran Dewan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. RPJMD Tahun 2021-2026

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor

dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga

pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan

kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator keberhasilan adalah skor pola pangan harapan. Adapun sasaran pembangunan dari tujuan ini adalah :
 - a) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
3. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
4. Mewujudkan infrastruktuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase jalan dalam kondisi baik; Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan; Luas Kawasan Kumuh dan Cakupan pelayanan air bersih dan luas wilayah dengan penerangan jalan umum ;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup dan Cakupan pelayanan persampahan

- d) Meningkatnya pelayanan kebencanaan dengan indikator keberhasilan yaitu Response time rate kejadian bencana.
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
- a) Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Indeks layanan SPBE

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Meningkatkan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		Meningkatkan Produktivitas masyarakat	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			Meningkatkan Kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
			Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		Meningkatkan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	Peningkatan Kualitas Pelayanan investasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
			Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan perlindungan sosial	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
Membangun masyarakat dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis
			Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan disemua jenjang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
			Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
			Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
			Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan daya Beli Masyarakat	Menjamin distribusi bahan pokok
			Meningkatkan Pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan	Meningkatnya infrastruktur Kota	meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
lingkungan			barang, dan jasa
		Meningkatkan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundangundangan ((Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain))
		Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
			Memfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan
			Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
			Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			Optimalisasi pendapatan daerah
			Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

(Sumber: RPJMD Kota Dumai)

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2022 sesuai dengan Musrenbang RKPD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Industri;
- 2) Pengembangan Pertanian;
- 3) Pengembangan Pariwisata;
- 4) Pembangunan Infrastruktur;
- 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

6) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2022

Adapun arah kebijakan umum provinsi riau pada tahun 2022 adalah Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi dimana dijabarkan dengan kebijakan dibawah ini :

1. Memperbaiki iklim dan promosi investasi
2. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
4. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
5. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
6. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
7. Meningkatkan produksi hasil industry
8. Meningkatkan produksi pertanian
9. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
10. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata
11. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
12. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
13. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
14. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan public
15. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
16. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan
17. Memantapkan jalan dan jembatan
18. Memantapkan pelabuhan
19. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
20. Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
21. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruhan wilayah

22. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
23. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
24. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
25. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana
26. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
27. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS
28. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
29. Meningkatkan ketersediaan akses Pendidikan
30. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
31. Meningkatkan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
32. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
33. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
34. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
35. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan
36. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
37. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
38. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
39. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
40. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan

4.1.6. Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2022 diarahkan pada 5 arahan utama presiden Republik Indonesia yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 arahan utama tersebut, Pemerintah pusat menurunkan menjadi prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang difokuskan pada :
 - a) Kawasan Industri dan 31 Smelter
 - b) Peningkatan Peran UMKM
 - c) Energi Terbarukan
 - d) Food Estate
 - e) 10 Destinasi Wisata.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang difokuskan pada:
 - a) Major Project di Wilayah Papua
 - b) Ibu Kota Negara.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang difokuskan pada:
 - a) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
 - b) Sistem Kesehatan Nasional
 - c) Reformasi Pendidikan Keterampilan
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang difokuskan pada:
 - a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
 - b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 - c) Memperkuat Moderasi Beragama
 - d) Meningkatkan Literasi, Inovasi PP4 dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yang difokuskan pada:
 - a) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
 - b) Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan Enabler
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang difokuskan pada:
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - c) Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang difokuskan pada:
 - a) Konsolidasi Demokrasi

- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c) Penegakan Hukum Nasional
- d) Reformasi Kelembagaan Birokrasi
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Muatan skala prioritas Kota Dumai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 mengacu pada skala kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

Tabel 4.2 Perbandingan Prioritas Tahun 2021 dan 2022 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

Tahun 2021	Tahun 2022	ISU STRATEGIS
1. Pemantapan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar	1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1. Pengembangan usaha mikro,kecil menengah(umkm/ikm) 2. Ketenagakerjaan 3. Kemudahan investasi. 4. Ketahanan pangan daerah
2. SDM yang berdaya saing serta pemantapan implementasi nilai-nilai budaya dan keagamaan	2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 6. Kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
3. Pemantapan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	7. Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota
4. Pemantapan pelayanan publik	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	8. Pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah, bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah

Tahun 2021	Tahun 2022	ISU STRATEGIS
	5. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2022, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2022 adalah :

“Penataan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63
			tingkat kemiskinan	%	3,01
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,9
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,5
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	41,2
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	74,94

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,6
			Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.914,20
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	4,03

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
			Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79
			luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.34
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57
	Tujuan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116.612
	Sasaran	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk
Peningkatan akuntabilitas penyelenggara	Tujuan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC

Prioritas Pembangunan daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2022
raan pemerintahan daerah	Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun,	Opini	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83

Tabel berikut menyajikan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif untuk setiap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

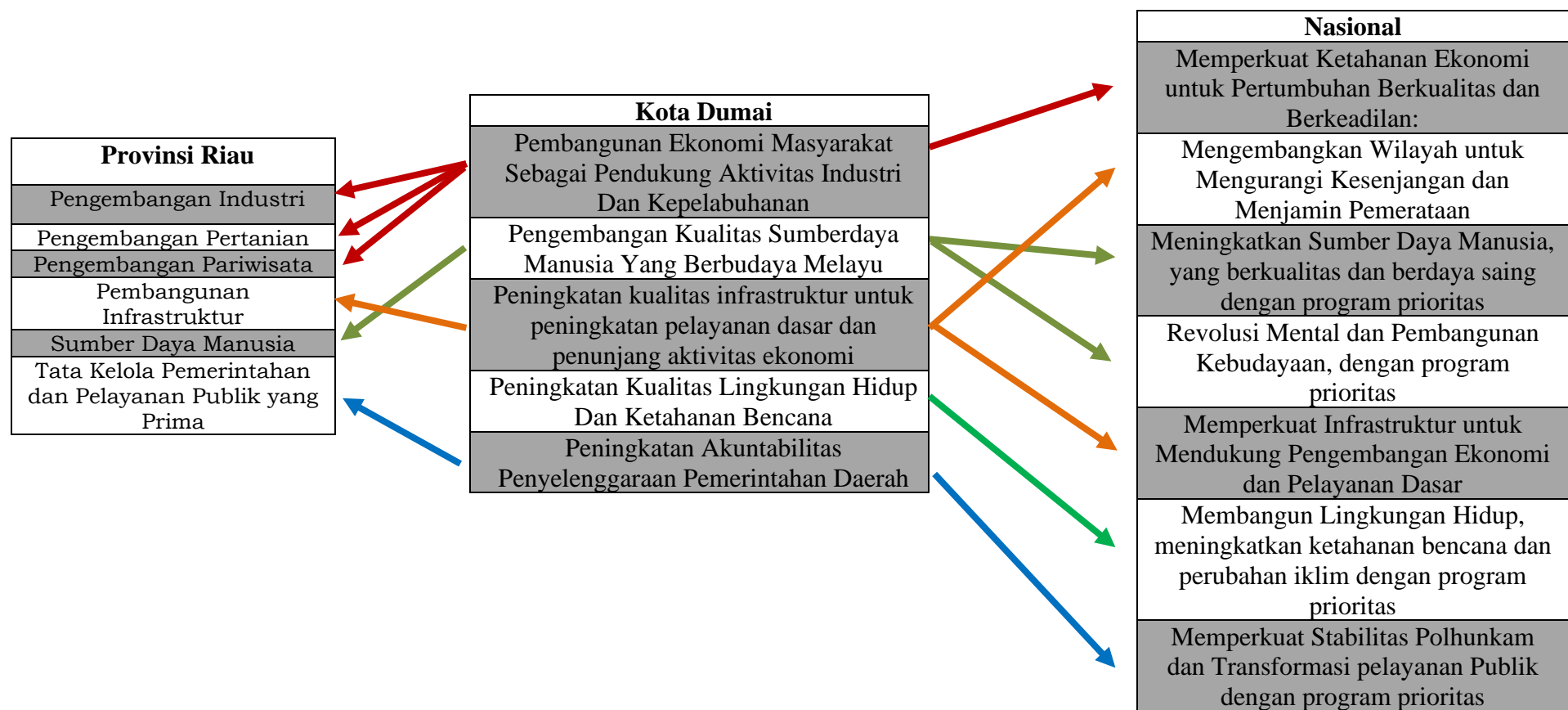
Tabel. 4.4 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan indikatif untuk prioritas pembangunan daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktifitas industri dan kepelabuhan	39	96	236	87.998.598.360
2	Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu	62	155	493	816.532.396.258

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
3	Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktifitas ekonomi	23	65	186	374.617.056.100
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	13	34	85	45.923.303.920
5	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	76	264	983	458.248.169.165
	Total	213	614	1983	1.783.319.523.803

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63	Industri	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	(%)	3,06
			tingkat kemiskinan	%	3,01		Sasaran	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK	milyar rupiah	520.328,45
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29				Koefisien Gini	Indeks	0,272
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,9		Sasaran	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	juta rupiah	167.919,66
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98		Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	%	6,5
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809				Tingkat pengangguran terbuka	%	5,89
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36	Pariwisata	Tujuan	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara	(Milyar Rupiah)	2.329,36

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79		Sasaran	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jiwa	227,748
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,5		Sasaran	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal Wisatawan mancanegara	hari	3,63
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	41,2	Pertanian	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	56
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	74,94	Sumber daya Manusia	Tujuan	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangu naManusia (IPM)	(indeks)	73,29
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785		Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun	Tahun	9,11
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,92
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756		Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,79
							Sasaran	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	Indeks	89,39

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
							Tujuan	Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman	Indeks Keurukunan Umat Beragama	Indeks	75,11
							Sasaran	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Keurukunan Umat Beragama	Indeks	75,11
						Pariwisata	Tujuan	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	%	27,27
							Sasaran	Menigkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan	%	82
									Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan	%	15
									Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan	%	15

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46	Infrastruktur	Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	%	55,53
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,6		Sasaran	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/darmaga/bandara pertahun	%	0,65
			Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.914,20		Sasaran	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	%	75,31
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	4,03				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	79,25
			Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79		Sasaran	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	%	95,14

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27		Sasaran	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	%	27,3
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	Infrastruktur	Tujuan	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,35
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.34		Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,8
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57				Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,9
	Tujuan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116.612				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	58,59
	Sasaran	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk		Sasaran	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	297.332
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima	Tujuan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,63
	Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81		Sasaran	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,63

KOTA DUMAI					Provinsi Riau						
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun,	Opini	WTP		Sasaran	Meningkatnya penerapan E-Government	SPBE	Indeks	3,33
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B						
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83						

Jika dilihat dari Program Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan Provinsi tahun 2022 pada table berikut :

Tabel 4.6 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Pengembangan Industri	10	17	45	14.879.773.822
2	Pengembangan Pertanian	10	26	50	18.179.328.219
3	Pengembangan Pariwisata	3	5	7	8.557.189.000
4	Infrastruktur dan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	36	99	271	420.540.360.020
5	Pengembangan SDM	62	155	493	816.532.396.258
6	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima	76	264	983	458.248.169.165

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.5 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2022 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	15,7
			tingkat kemiskinan	%	3,01		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity)	(US\$/m ³)	4,7
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	%	3,7
			nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,9			Kontribusi PDB kemaritiman	%	6,9
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	%	5,5

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
			PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809			Kontribusi PDB pariwisata	%	5
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36			Nilai tambah ekonomi kreatif	(Rp triliun	1.314-1.333
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79			Pertumbuhan investasi	%	6,2
	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	skor pola pangan harapan	Skor	85,5			Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta orang	2,7-3,0
								Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	3,1-3,5
	Sasaran	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	ketersediaan pangan utama	%	41,2			Kontribusi tenaga kerja industri	%	14,6
								Jumlah tenaga kerja industri	Juta orang	20,3
								Jumlah tenaga kerja pariwisata	Juta orang	13,5
								Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta orang	20

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
						Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan	%	4,3
							Biaya logistik terhadap PDB	Persen	21,1
							Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index	Peringkat	N.A.
						Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional	%	3,8
							Kontribusi UMKM terhadap PDB	%	63
							Kontribusi koperasi terhadap PDB	%	5,3
						Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri(TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	%	4,8
							Neraca perdagangan barang	USD miliar	3
							Nilai devisa pariwisata	USD miliar	25
						Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan	Juta ha	25,1

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	<72
						Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	92,8
							Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/hari	2.100,00
							Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kapita/hari	57
							Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan		5,5
							Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat		4,5
					Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Pengentasan Kemiskinan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA	Ha	1.850.000
						Peningkatan produktivitas Dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	%	48,4
							Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University		

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							a. Top 200		0
							b. Top 300		1
							c. Top 500		2
							Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	%	47
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat Dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	indeks pembangunan manusia	Indeks	74,94	Meningkatkan sumber daya Manusia berkualitas dan Berdaya saing	Peningkatan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA :	
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785			a. Membaca	Na
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706			b. Matematika	Na

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756			c. Sains		Na
								Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA	%	
								a. Membaca		Na
								b. Matematika		Na
								c. Sains		Na
								Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Tahun	8,95
								Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Tahun	13,79
							Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Angka kelahiran total (Total fertilityrate /TFR)		2,21
							Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	205
								Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	18,6

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Angka kematian neonatal	per 1000 kelahiran hidup	11,6
							Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)		62,5
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		8
							Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1000 perempuan)	21
							Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,4
							Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	7,5
							Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)		0,19
							Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	231

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		365
							Insidensi hepatitis B	%	1,39
							Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	8,9
							Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21,8
							Persentase tekanan darah tinggi	%	34,1
							Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	80
							Persentase rumah sakit terakreditasi	%	90
						Peningkatan kualitas anak, Perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,87
							Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	%	Menurun
							Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,278 96233
							Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,740 51922

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		53,756
							Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir		Menurun
							Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,5
					Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan Pembinaan ideologi pancasila Untuk memperkuat ketahanan Budaya bangsa dan membentuk Mentalitas bangsa yang maju, Modern, dan berkarakter	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	nilai	-
							Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	Nilai	-
							Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	nilai	-
							Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	nilai	-
							Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	nilai	-
							Nilai Dimensi Mental Kultural	nilai	-

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik	nilai	-
							Nilai Dimensi Kelembagaan Ekonomi	nilai	-
							Indeks Kerentanan Keluarga	nilai	-
							Indeks Karakter Remaja	nilai	-
						Meningkatkan pemajuan dan Pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan Memperteguh jati diri bangsa, Meningkatkan kesejahteraan Rakyat, dan mempengaruhi arah Perkembangan peradaban dunia	Nilai Dimensi Warisan Budaya	nilai	-
							Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	nilai	-
							Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	nilai	-
						Memperkuat moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, kerukunan dan Harmoni sosial	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	nilai	-
							Indeks Kepuasan Layanan KUA	nilai	-

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
							Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal	nilai	-	
							Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya	nilai	-	
						Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan kreativitas bagi Terwujudnya masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	-	
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46		Infrastruktur pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	%	94

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,6			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	%	84,8
			Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.914,20			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	%	58,23
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	4,03			Rasio outstanding KPR terhadap PDB	%	3,3
			Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	%	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)
			luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan	%	2,98
								Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik	%	75.28% penanganan;9.13% pengurangan

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)
							Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	10
							Volume tampungan air per kapita	m3/kapita	57,059 99842
							Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	N/A	3
							Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang Beririgasi meningkat	Hektare	116142 ,7083
							Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	N/A	20
							Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan	m3/detik	11,432 5
							Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010)	%	57

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
							Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam (Km)	Km	-
								Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)	pelabuhan	-
								Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)	%	-
								Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km')	Km	-
							Infrastruktur perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dandikembangkan (Kota)	Kota	-
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	Membangun an Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,3

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.34			Indeks Kualitas Air	Indeks	55,3
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	59,5
	Tujuan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116612			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	Indeks	63,5
	Sasaran	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk		Peningkatan ketahanan Bencana dan iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	%	0,1
								Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	%	0,81
								Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Menit	4

KOTA DUMAI					NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
						Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	%	12,8
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan	%	53,1
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah	%	9,3
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU	%	2,5
							Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisirdan kelautan	%	6,8
					Memperkuat Infrastrktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	%	100
							Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	KwH	1268

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Juta Ton	5,36
							Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	%	8,8
								Persentase pengguna internet	%	79,2
								Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalabar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	%	98,5
								proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	73
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)		75,4

KOTA DUMAI						NASIONAL				
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81		OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional		95,47
			Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun,	Opini	WTP		Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	0,69
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B		Reformasi birokrasi dan tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	Indeks	80
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	Indeks	70

KOTA DUMAI					NASIONAL					
Prioritas	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
								Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	Indeks	45
							Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Indeks Kekuatan Militer	nilai	0,24
								Indeks Global Terorisme	Nilai	4,34
								Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	>55%
								Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	nilai	3,2

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan Nasional tahun 2022 pada table berikut :

Tabel 4.9 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	39	96	236	87.998.598.360
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	23	65	186	374.617.056.100
3	Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar				
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	62	155	493	816.532.396.258
5	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan				
6	Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan perubahan iklim	13	34	85	45.923.303.920
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	76	264	983	458.248.169.165

4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2022 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2022

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2022 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun

2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota Dumai tahun 2022

Tabel 4.9. Sinkronisasi SPM Tahun 2022 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
	3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi 6. korban bencana kota Dumai	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.4. Pelaksanaan Target Sustainable Development Goals (SDG's)

Target kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.10. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022

No	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan
2	Pilar Pembangunan Ekonomi : 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

No	Sustainable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	2	3
	Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	

4.5. Penjabaran arah kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural karena PandemiCovid19

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Berkenaan dengan Fokus pembangunan tersebut, maka arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu

5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun 7 arah kebijakan umum tersebut dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan yang lebih lebih operasional yaitu :

Tabel 4.11 Tujuan , Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		Peningkatan Produktivitas masyarakat	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			Meningkatkan Kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
			Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	Peningkatan Kualitas Pelayanan investasi
			Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan perlindungan sosial	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunya masalah kesejahteraan sosial
		Peningkatan Peluang	Meningkatkan kualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Kerja Bagi Masyarakat	tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
	Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
Membangun masyarakat dumai yang Produktiv, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Menigkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis
			Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas	Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan disemua jenjang
			Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
			Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
			Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Peningkatan daya Beli Masyarakat	Menjamin distribusi bahan pokok
			Meningkatkan Pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur Kota	Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundangundangan
		Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terwujudnya penataan ruang	Mewujudkan tata ruang yang aman,	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	daerah yang konsisten	nyaman, produktif, dan berkelanjutan	konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
			Memanfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelayanan kebencanaan	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
		Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
		Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
			Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai ipekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggan
	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			Optimalisasi pendapatan daerah
			Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

01

Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Sebagai Pendukung Aktivitas Industri
Dan Kepelabuhanan

02

Pengembangan Kualitas Sumberdaya
Manusia Yang Berbudaya Melayu

03

Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar
Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi

04

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Dan Ketahanan Bencana

05

Peningkatan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2022. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2022, maka Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%	100	DPMPTSP
	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Persentase strategi penyelenggaraan promosi investasi	%	100	DPMPTSP
	2.18.05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	75	DPMPTSP
	2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7,13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,55	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	24,5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	10%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesaikannya dokumen rpik sampai dengan ditetapkan menjadi perda	%	80	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase rekomendasi teknis yang di terbitkan	%	5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam sii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	55%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen ska	%	10%	DINASPERDAGANGAN
	3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%	100	DINASPERDAGANGAN
	3.30.05	Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor	%	5%	DINASPERDAGANGAN
	3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%	64	DINASPERDAGANGAN
	3.30.07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%	10	DINASPERDAGANGAN
	3.26.02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03	Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	%	35%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.06.03	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/ kelurahan asal	%	100 persen	DINAS SOSIAL

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti sosial	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	X.xx.01	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.06.02	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	DINAS SOSIAL
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,79	
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan rtkd	%	100	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	15	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05	Program hubungan industrial	Menurunnya angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	25	DINAS TENAGA KERJA
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	165	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat	%	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase ketersediaan data dan peta kerentanan dan ketahanan pangan	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah pembudidaya terlatih	Kelompok	18	DINAS PERIKANAN
			Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	Kelompok	18	
	3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah nelayan terlatih	Kelompok	20	DINAS PERIKANAN
			Jumlah kelompok nelayan terbina	Kelompok	28	
	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Izin	0%	DINAS PERIKANAN
	3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah peningkatan produksi hasil olahan	Ton	31	DINAS PERIKANAN
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; umur harapan hidup; angka kesakitan malaria (api) per 1.000 penduduk; persentase angka kesembuhan penderita tb paru bta +; prevalensi penderita hiv terhadap penduduk beresiko; angka kesakitan demam berdarah dengue (dbd) per 100.000 penduduk; persentase balita dengan gizi kurang; persentase balita dengan gizi buruk; cakupan jaminan kesehatan nasional (jkn)		17.5 per 1.000 kh; 24.5 per 1.000 kh; 101.5 per 100.000 kh; 71.10 tahun; 0.9 per 1.000 penduduk; 88%; < 1%; 55 per 100.000 penduduk; 1%; 3%; 92.2%	DINAS KESEHATAN
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019	%	100%	DINAS KESEHATAN
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	49%	DINAS KESEHATAN
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	%	4,68	DINAS KESEHATAN
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase dukungan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100%	RSUD

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	100%	RSUD
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya persentase arg di kota dumai	%	10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%	20%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	%	60%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak		30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak (pha)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak (>700)	Skor	750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%	40%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	40%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	1	
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun	%	2,20%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	75%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya pelayanan spm pendidikan	%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan	%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Rasio lembaga yang telah memiliki izin	Rasio	1 : 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis smp (standar nasional perpustakaan)		20%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia		2 koleksi naskah kuno	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang dikuti	%	70%	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	%	100	DINASPERDAGANGAN
	2.17.08	Program pengembangan umkm	Jumlah umkm yang dibina	Umkm	85	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	%	95%	
	2.22.03	Program pengembangan kesenian tradisional	Terlaksananya program pengembangan kesenian tradisional	Sanggar	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04	Program pembinaan sejarah	Terlaksananya pembinaan sejarah			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Objek	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06	Program pengelolaan permuseuman	Jumlah evaluasi dan pengawasan cagar budaya keluar daerah	Kegiatan	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Luas wilayah banjir perkotaan yang ditangani	Ha	370 ha	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan	%	18,33%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	persentase pengelilaan dan pengembangan sistem drainase	%	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07	Program pengembangan permukiman	Jumlah pengembangan permukiman	Unit	21 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	jumlah penataan bangunan gedung	Unit	10 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan	Lokasi	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik	%	2%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.04.02	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	76,43	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni	%	11,11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Jumlah lokasi psu yang terfasilitasi	%	20%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	80%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah kota dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	Kasus	5 kasus	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan kota dumai	Persil	10 persil	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%	95%	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersedianya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	20%	DINAS PERHUBUNGAN
Eningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	70%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	%	100 persen	DINAS SOSIAL
	1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85%	BPBD
	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	85%	BPBD
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.03.02	Program kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan formasi jabatan sesuai peta jabatan dan asn yang memperoleh target kinerja bernilai baik	%	93,78%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional		4%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	%	80	DPMPPTSP
	2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%	100	DPMPPTSP
	1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		100 persen	DINAS SOSIAL
	2.24.03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip di kota dumai	%	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	82%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03	Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	80%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di kota dumai	%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase tercapainya peningkatan pajak daerah	%	7,75	BAPENDA
	8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
	X.xx.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	2.16.02	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	80%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	2.16.03	Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	13%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	75%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	75%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	4.01.02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	5.06.02	Program pengelolaan perbatasan	Terlaksananya pengelolaan perbatasan di kota dumai	%	100%	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	95%	SEKRETARIAT DPRD
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	75%	INSPEKTORAT
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	75%	INSPEKTORAT
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian tujuan rpjmd		100%	BAPPEDA
			Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100%	BAPPEDA
			Nilai indeks penerapan manajemen risiko (mri) di bappeda	Indeks	2	BAPPEDA
			Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target dalam rkpd	%	100%	BAPPEDA
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah yang diimplementasikan	%	100%	BAPPEDA
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	BAPPEDA
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	BAPPEDA
	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelibngan yang implementatif	%	20%	BAPPEDA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SAT	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%	100%	BPKAD
			Persentase dokumen pencairan anggaran sesuai standar keuangan dan tepat waktu	%		
			Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%		
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100%	BPKAD

Tabel 5.2 Sandingan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan		Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,54	
				Tingkat kemiskinan	%	3,51	
		Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	26,29	
				Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	38,9	
				Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	80,98	
				Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	119,809	
	2.18.02		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	%	100	Dpmpstsp
	2.18.03		Program promosi penanaman modal	Persentase strategi penyelenggaraan promosi investasi	%	100	Dpmpstsp
	2.18.05		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	75	Dpmpstsp
	2.17.03		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
2.17.04		Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7,13	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,55	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	24,5	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	10%	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.31.02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase terselesainya dokumen rpik sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	80	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.31.03	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase rekomendasi teknis yang di terbitkan	%	5	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam sii nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasanindustri di kab/kota	%	55%	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
	3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen ska	%	10%	Dinas perdagangan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	3.30.03		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	%	100	Dinas perdagangan
	3.30.05		Program pengembangan ekspor	Persentase volume ekspor	%	5%	Dinas perdagangan
	3.30.06		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat uttp yang ditera/tera ulang dan dilakukan pengawasan/penyuluhan	%	64	Dinas perdagangan
	3.30.07		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang ikut promosi produk dalam negeri	%	10	Dinas perdagangan
	3.26.02		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.03		Program pemasaran pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.04		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	%	35%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
	3.26.05		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
		Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	
	1.06.02		Program pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	Dinas sosial

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.06.03	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan asal	%	100 persen	Dinas sosial
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti sosial	%	100 persen	Dinas sosial
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100 persen	Dinas sosial
	X.xx.01	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	%	100 persen	Dinas sosial
	1.06.02	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota yang diberdayakan	%	100 persen	Dinas sosial
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,79	
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan rtkd	%	100	Dinas tenaga kerja
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	Dinas tenaga kerja
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	15	Dinas tenaga kerja
	2.07.05	Program hubungan industrial	Menurunnya angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	25	Dinas tenaga kerja
			Skor pola pangan harapan	Skor	85,5	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Ketersediaan pangan utama	%	41,2	
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.04	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.07	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	165	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat	%	-	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase ketersediaan data dan peta kerentanan dan ketahanan pangan	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	100%	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah pembudidaya terlatih	Kelompok	18	Dinas perikanan
			Jumlah kelompok aktif budidaya	Kelompok	18	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				terbina			
	3.25.04		Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah nelayan terlatih	Kelompok	20	Dinas perikanan
				Jumlah kelompok nelayan terbina	Kelompok	28	
	3.25.05		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Izin	0%	Dinas perikanan
	3.25.06		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah peningkatan produksi hasil olahan	Ton	31	Dinas perikanan
				Jumlah wilayah sampel aki	Kecamatan	7	
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu		Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	74,826	
		Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,785	
	1.02.02		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup; angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; umur harapan hidup; angka kesakitan malaria (api) per 1.000 penduduk; persentase angka kesembuhan penderita tb paru bta +; prevalensi penderita hiv terhadap penduduk beresiko; angka kesakitan demam berdarah dengue (dbd) per 100.000 penduduk; persentase balita dengan gizi kurang; persentase balita dengan gizi buruk; cakupan jaminan kesehatan nasional (jkn)		17.5 per 1.000 kh; 24.5 per 1.000 kh; 101.5 per 100.000 kh; 71.10 tahun; 0.9 per 1.000 penduduk; 88%; < 1%; 55 per 100.000 penduduk; 1%; 3%; 92.2%	Dinas kesehatan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.02.03	Rogram peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019	%	100%	Dinas kesehatan
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	49%	Dinas kesehatan
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	%	4,68	Dinas kesehatan
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase dukungan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100%	Rsud
	1.02.03	Rogram peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	100%	Rsud
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya persentase arg di kota dumai	%	10%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%	20%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga di kota dumai	%	60%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak		30%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak (pha)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak (>700)	Skor	750	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%	40%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	40%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda	1	
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun	%	2,20%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.14.04		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	75%	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,706	
	1.01.02		Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya pelayanan spm pendidikan	%	100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.03		Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.04		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap satuan pendidikan	%	100%	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.05		Program pengendalian perizinan pendidikan	Rasio lembaga yang telah memiliki izin	Rasio	1 : 1	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.01.06		Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	-	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.23.02		Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berbasis smp (standar nasional perpustakaan)		20%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.23.03		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia		2 koleksi naskah kuno	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.19.02		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.19.03		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti	%	70%	Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata
		Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,756	
	3.30.04		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	%	100	Dinas perdagangan
	2.17.08		Program pengembangan umkm	Jumlah umkm yang dibina	Umkm	85	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian
			Meningkatnya implementasi budaya melayu	Jenis budaya melayu yang diterapkan	Jenis	3	
	2.22.02		Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	%	95%	
	2.22.03		Program pengembangan kesenian tradisional	Terlaksananya program pengembangan kesenian tradisional	Sanggar	5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.04		Program pembinaan sejarah	Terlaksananya pembinaan sejarah			Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.05		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Objek	5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	2.22.06		Program pengelolaan permuseuman	Jumlah evaluasi dan pengawasan cagar budaya keluar daerah	Kegiatan	5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan		Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	52,46	
		Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	60,77	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Luas wilayah banjir perkotaan yang ditangani	Ha	370 ha	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan	%	18,33%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	persentase pengelilaan dan pengembangan sistem drainase	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.07	Program pengembangan permukiman	Jumlah pengembangan permukiman	Unit	21 unit	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	jumlah penataan bangunan gedung	Unit	10 unit	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Cakupan penataan bangunan dan lingkungan	Lokasi	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik	%	2%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	1.04.02	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	76,43	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni	%	11,11	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Jumlah lokasi psu yang terfasilitasi	%	20%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	80%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah kota dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	Kasus	5 kasus	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan kota dumai	Persil	10 persil	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.15.02		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%	95%	Dinas perhubungan
	2.15.03		Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersediaanya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	20%	Dinas perhubungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20	
	1.03.12		Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelayanan kebencanaan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61.34	
				Penurunan emisi gas rumah kaca			
	2.11.02		Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.03		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	80%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.04		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.05		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%	100%	Dinas lingkungan hidup
2.11.06		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	Dinas lingkungan hidup	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.11.08		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.09		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.10		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	100%	Dinas lingkungan hidup
				Cakupan pelayanan persampahan	%	57	
	1.03.04		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	100%	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
	2.11.11		Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	70%	Dinas lingkungan hidup
				Cakupan jenis bencana daerah yang diselesaikan		75%	
	1.06.06		Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	%	100 persen	Dinas sosial
	1.05.03		Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85%	Bpbd
	1.05.04		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	85%	Bpbd
Peningkatan		Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Cc	

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Sasaran	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	
	5.03.02		Program kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan formasi jabatan sesuai peta jabatan dan asn yang memperoleh target kinerja bernilai baik	%	93,78%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	5.04.02		Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional		4%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	2.18.04		Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	%	80	Dpmptsp
	2.18.06		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%	100	Dpmptsp
	1.06.07		Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		100 persen	Dinas sosial
	2.24.03		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip di kota dumai	%	100	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.12.02		Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	82%	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	2.12.03		Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	80%	Dinas kependudukan dan catatan sipil

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	2.12.04		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	56	Dinas kependudukan dan catatan sipil
	1.05.02		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di kota dumai	%	100%	satuan polisi pamong praja
	5.02.04		Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase tercapainya peningkatan pajak daerah	%	7,75	Bapenda
	8.01.02		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.03		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.04		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.05		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.06		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.04		Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai barat

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai barat
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai timur
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	0%	Kecamatan medang kampai

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan medang kumpai
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan sungai sembilan
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai kota
	X.xx.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.02		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.03		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Kecamatan dumai selatan

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	7.01.05		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100%	Kecamatan dumai selatan
				Indeks layanan spbe	Indeks	2,83	
	2.16.02		Program informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	80%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.16.03		Program aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	13%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.20.02		Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	75%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
	2.21.02		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	75%	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
		Sasaran	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	Wtp	
				Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	
	4.01.02		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100%	Sekretariat daerah kota dumai

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	4.01.03	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan	%	100%	Sekretariat daerah kota dumai
	5.06.02	Program pengelolaan perbatasan	Terlaksananya pengelolaan perbatasan di kota dumai	%	100%	Sekretariat daerah kota dumai
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	95%	Sekretariat dprd
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	75%	Inspektorat
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	75%	Inspektorat
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian tujuan rpjmd		100%	Bappeda
			Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100%	Bappeda
			Nilai indeks penerapan manajemen risiko (mri) di bappeda	Indeks	2	Bappeda
			Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran/target dalam rkpd	%	100%	Bappeda
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) kepala daerah yang diimplementasikan	%	100%	Bappeda
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	Bappeda
			Persentase dukungan rkpd kota dumai terhadap prioritas nasional	%	100%	Bappeda

PRIORITAS	KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			dan provinsi			
	5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	%	20%	Bappeda
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen anggaran yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%	100%	Bpkad
			Persentase dokumen pencairan anggaran sesuai standar keuangan dan tepat waktu	%		
			Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	%		
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100%	Bpkad

Tabel 5.3 Proporsi Pendanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mandatory Kota Dumai Tahun 2022

NO	Urusan/Mandatory	PAGU INDIKATIF	PORSI TERHADAP TOTAL BELANJA
1	Pendidikan	361.309.924.950	20,26%
2	Kesehatan	390.094.999.636	21,87%
3	Pendidikan danPelatihan	3.630.383.201	0,20%
4	APIP	24.368.412.987	1,37%
5	Sosial	12.370.000.000	0,69%
6	Penanganan Covid 19 :	156.520.591.300	8,78%
	Kesehatan	127.556.993.300	
	Satpol pp	2.763.598.000	
	Dinas Koperasi,UKM Perindustrian	6.200.000.000	
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	

Program/kegiatan pada RKPD ini masih bersifat indikatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022**.



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB VI KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri Nomor 86 tahun 2017. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,54
		Tingkat kemiskinan	%	3,51
	Sasaran 1.1 Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	26,29
		Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	38,90
		PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	80,98
		PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	119,809
	Sasaran 1.2 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	Tujuan 2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor pola pangan harapan	skor	85,5
	Sasaran 2.1 Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	Ketersediaan pangan utama	%	41,2
3	Tujuan 3 Membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,826
	Sasaran 3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,785
	Sasaran 3.2 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,706
	Sasaran 3.3 Meningkatkan standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,756
4	Tujuan 4 Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur daerah	Indeka	52,46
	Sasaran 4.1 Meningkatkan infrastruktur kota	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	59,60
		Luas wilayah kawasan banjir perkotaan	Ha	4.914,2
		Luas kawasan kumuh	Ha	4,03
		Cakupan pelayanan air bersih	%	40,79
		Luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	49,27
	Sasaran 4.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	20
	Sasaran 4.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61,34
		Cakupan pelayanan persampahan	%	57
5	Tujuan 5 Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116,612
	Sasaran 5.1 Meningkatkan pelayanan kebencanaan	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 menit wmk
6	Tujuan 6 Terlaksananya reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
	Sasaran 6.1 Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun	Opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B
		Indeks layanan SPBE	Indeks	2,83

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi,

Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 merujuk kepada penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
	Pertumbuhan ekonomi
	PDRB per kapita (ADHB)
	Indeks Gini
	Tingkat Kemiskinan
	Indek Pembangunan Manusia (IPM)
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Pendidikan
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
2	tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3	tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
4	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	Kesehatan
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
10	Persentase penderita hipertensi myang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	Pekerjaan Umum dan penataan ruang
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang di layani oleh jaringan irigasi
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
5	Persentase jumlah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota
7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan tanpa kecelakaan konstruksi
	PERUMAHAN RAKYAT
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ Kota
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota
3	Persentase Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
4	berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana Utilitas Umum)
6	Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
8	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
10	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
11	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan kebakaran
	SOSIAL
1	persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	Tenaga Kerja
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)
5	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota
	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditandatangani instansi terkait kabupaten
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
	Pangan
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)
	Pertanahan
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan pembentukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunanfasilitas umum
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap ditrisbusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
	Lingkungan Hidup
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kab/Kota
2	Terlaksananya pengolahan sampah diwilayah kab/kota
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Perekaman KTP elektronik
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Persentase pengentasan desa tertinggal
2	Persentase peningkatan status desa mandiri
	Pengendalian Penduduk dan KB
1	TFR (Angka Kelahiran Total)
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mcpr)
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
	Perhubungan
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
	Komunikasi dan Informatika
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Perindustrian Koperasi dan UKM
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha
	Penanaman Modal
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
	Kepemudaan dan Olah Raga
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3	Peningkatan prestasi olahraga
	Statistik
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
	Persandian
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah
	Kebudayaan
1	Terlestarikan cagar budaya
	Perpustakaan
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat
	Kearsipan
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan kebangsaan dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Kelautan dan perikanan
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten kota (sumber data: one data KKP)
	Pariwisata
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota
3	Tingkat hunian akomodasi
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Pertanian
1	Produktifitas pertanian per hektar per tahun
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Energi Dan Sumber Daya Mineral
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota
	Perdagangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)
2	Persentase kinerja realisasi pupuk
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Perindustrian
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usahakawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
	Perencanaan, Pengawasan Dan Keuangan
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
2	Rasio PAD

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR
1	2
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
4	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
5	Rasio belanja urusan pemerintah umum (dikurangi tranfer expenditures)
6	Opini laporan keuangan
7	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang di bawa ketahun berikutnya. Yang di tanda tangani pada kuartal pertama
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
10	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
11	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
12	Manajemen aset
13	Rasio anggran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Kepegawaian
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga keehatan)
	Tranparansi Dan Partisipasi Publik
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Dari seluruh indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 diatas, maka indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi Walikota Dumai *“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	2022
1	2	3	4	5
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,25	3,54
2	Tingkat kemiskinan	%	3,53	3,51
3	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	25,39	26,29
4	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	36,61	38,90
5	PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	79,18	80,98
6	PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	114,163	119,809
7	Indeks gini	Poin	0,36	0,36
8	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,98	7,79
9	Skor pola pangan harapan	Skor	83,74	85,5
10	Ketersediaan pangan utama	%	39,2	41,2
11	Indeks pembangunan manusia	Indeks	74,611	74,826
12	Indeks kesehatan	Indeks	0,784	0,785
13	Indeks pendidikan	Indeks	0,703	0,706
14	Indeks pengeluaran	Indeks	0,753	0,756
15	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	47,56	52,46
16	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	58,35	59,60
17	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	5.284	4.914,2
18	Luas Kawasan Kumuh	Ha	8,06	4,03
19	Cakupan pelayanan air bersih	%	33,33	40,79
20	luas wilayah dengan penerangan jalan umum	Ha	45,46	49,27
21	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	10	20
22	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61.09	61.34
23	Cakupan pelayanan persampahan	%	51	57
24	Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116.612	116.612
25	Response time rate kejadian bencana	Menit	15 Menit wmk	15 Menit wmk
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81
28	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun,	Opini	WTP	WTP
29	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B
30	Indeks layanan SPBE	Indeks	2,81	2,83

Dari tabel 6.3 diatas telah diuraikan bahwa untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu pada tahun 2022 dapat diukur melalui 30 (tiga puluh) indikator kinerja

utama. Adapun pengertian dari masing-masing indikator utama diatas adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dari seri data PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;
2. Tingkat kemiskinan: ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat miskin dalam suatu populasi. Tingkat kemiskinan didapat dengan menghitung persentase penduduk miskin;
3. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK : PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun
4. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB : PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah
5. PDRB perkapita ADHK : nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk
6. PDRB perkapita (ADHB): nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penilaian dilakukan pada harga tahun berjalan. PDRB perkapitan didapat dari perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk;
7. Indeks Gini: ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan

pendapatan penduduk yang nilainya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks ini dihitung dengan rumus koefisien gini atau dengan menggunakan kurva lorenz;

8. Tingkat Pengangguran Terbuka: ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat Kota Dumai yang tidak mempunyai pekerjaan dalam usia angkatan kerja;
9. Skor pola pangan harapan : untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan, baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah, baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.
10. Ketersediaan pangan utama : kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik;
12. Indeks kesehatan : ukuran yang digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dengan indikator angka harapan hidup.
13. Indeks pendidikan : ukuran yang digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dengan indikator angka melek huruf, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah.

14. Indeks pengeluaran : ukuran yang digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan dengan indikator pengeluaran riil per kapita
15. Indeks infrastruktur daerah : ukuran yang digunakan dalam pembangunan dengan indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.
16. Persentase jalan dalam kondisi baik : Cakupan penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan kondisi baik.
17. Wilayah Kawasan Banjir Perkotaan : kawasan Kota Dumai yang terjadi banjir
18. Kawasan Kumuh : sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dan terdapat permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.
19. Cakupan pelayanan air bersih : ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana air bersih dikonsumsi atau digunakan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
20. Luas wilayah dengan penerangan jalan umum : wilayah yang memiliki infrastruktur lampu yang menerangi jalan pada malam hari. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari..

21. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan : ukuran yang digunakan untuk mengetahui struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya yang sesuai dengan aturan.
22. Indeks kualitas lingkungan Hidup : indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
23. Cakupan pelayanan persampahan : Jumlah yang terlayani dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah.
24. Cakupan wilayah penanganan bencana : Jumlah wilayah yang terjadi bencana dan dilakukan penanganan bencana
25. Response time rate kejadian bencana : tingkat waktu tanggap (*response time rate*) adalah waktu yang dibutuhkan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dari sejak pertama kali menerima informasi kejadian bencana, hingga tiba di lokasi kejadian bencana, tidak lebih dari 30 menit.
26. Indeks Reformasi Birokrasi : nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*.
27. Indeks Kepuasan Masyarakat : data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

28. Opini BPK : merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
29. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
30. Indeks layanan SPBE : suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE



PRIORITAS KOTA DUMAI
TAHUN 2022
"Penataan Kota Dumai Sebagai
Kota Pelabuhan Dan Industri
Yang Unggul Dan Bertumpu
Pada Budaya Melayu."

- 01 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan
- 02 Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu
- 03 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi
- 04 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
- 05 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD TAHUN 2022 KOTA DUMAI

BAB VII PENUTUP

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
email : bappeda@dumaikota.go.id

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022, merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan tahap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020, Dokumen RKPD 2022 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-dua Walikota Dumai periode tahun 2021-2026 yang merupakan tahun **Tahap Penataan** yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2022 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2022, RKPD Kota Dumai Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2022.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.

6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2022 dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. RKPD Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALIKOTA DUMAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'C' with a vertical line extending downwards from the bottom right of the 'C'.

H. PAISAL, SKM, MARS

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20	Inspektorat
2	Dinas Kesehatan	21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	Dinas Perhubungan	22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	24	Badan Pendapatan Daerah
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	Sekretariat Daerah Kota Dumai
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	27	Sekretariat DPRD
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
11	Dinas Perdagangan	30	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	31	Kecamatan Bukit Kapur
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32	Kecamatan Dumai Barat
14	Dinas Tenaga Kerja	33	Kecamatan Dumai Kota
15	Dinas Lingkungan Hidup	34	Kecamatan Dumai Selatan
16	Dinas Perikanan	35	Kecamatan Dumai Timur
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	36	Kecamatan Medang Kampai
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37	Kecamatan Sungai Sembilan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		



Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021



Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Dumai Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021